

LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN BOPTN

=====

=====

Judul Penelitian : **Religiusitas, Gender dan Intoleransi (Studi Tentang Radikalisme di Kalangan Perempuan di Kota Medan dan Padang)**

Kluster : **Penelitian Interdisiplinary**

Ketua Peneliti

Nama	: Drs.Eldin H.Zainal,MA
Nip/NIDN	: 195407121980031009 / 2012065401
Pangkat/Golongan	: Lektor Kepala/IV/c
Jabatan Fungsional	: Dosen
Fakultas/Prodi	: Syariah/ Jinayah

Anggota

Nama	: Dr.Muhammad Faisal Hamdani,Mag
Nip/NIDN	: 19740131 2001121001 /2031017401
Pangkat/Golongan	: Lektor Kepala/IV/b
Jabatan Fungsional	: Dosen
Fakultas/Prodi	: Syariah/ Pascasarjana AS

Dana Penelitian	: Rp 41.000.000
Lokasi Penelitian	: Medan dan Padang
Mitra Penelitian	: -
Jangka Waktu Penelitian	: Juli 2017 dan Juli sd Oktober 2018

Medan, 01 Nopember 2018
Menyetujui
Ketua LP2M

Ketua Pelasana

Prof.Dr.Pagar, MA
Nip 19581231 199803 1 016

Drs.Eldin H.Zainal,MA
Nip 195407121980031009

**RELIGUISITAS, GENDER, DAN
INTOLERANSI:
(STUDI TENTANG RADIKALISME DI KALANGAN
PEREMPUAN DI KOTA MEDAN DAN PADANG)**

**PENELITIAN
BOPTN**



Diajukan oleh :
Drs.H.Eldin H.Zainal,MA
Dr.Muhammad Faisal Hamdani,MAg

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAKSI

Tindakan terror, sikap radikalisme dan intoleran secara nasional, masih terus terjadi. Tidak terkecuali di daerah Medan dan Padang. Tindakan ini juga tidak hanya melibatkan laki-laki namun juga melibatkan kaum perempuan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan lebih banyak mengambil data dari wawancara dengan ahli, ilmuwan dan ulama serta masyarakat dan praktisi di Padang dan Medan ditambah dengan sumber-sumber buku teori lainnya.

Menurut Sufriyono, radikalisme atau teror pertama datang ke Sumatera Barat sejak Perang Padri (1803 M - 1838 M). Ketika Haji Miskin memaksa masyarakat adat (adat) untuk mengaktualisasikan semua Hukum Syariah, penduduk asli marah dan datang ke medan perang. Saat ini, di Padang pemahaman radikalisme dan intoleransi masih terus tumbuh dan tidak dapat dengan mudah dihentikan. Kita dapat melihat fakta ini dari masih berkembangnya pengikut Jemaah Ansarud Daulah (JAD) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang terus tumbuh dan memiliki banyak pengikut walaupun organisasi-organisasi ini telah dibatalkan oleh pemerintah Indonesia.

Al-Chaidar mengatakan di Padang ada ribuan orang berpotensi teroris. Dia mendapat informasi ini dari anggota JAD walaupun akhirnya beliau membatalkan pernyataan ini dan meminta maaf karena banyak pihak yang memaksanya untuk mengeksplorasi bukti-buktinya termasuk Gus Rizal dari MUI Sumatera Barat.

Menurut Saifullah, dalam perspektif etnologi, orang Minang tidak mungkin menjadi pelaku teror, karena kebanyakan orang Minang adalah pedagang yang selalu bertanya apa manfaatnya jika kita melakukannya sesuatu. Ketika seseorang Minang ingin melakukan pemboman bunuh diri (teror), dia terlihat seperti seorang pedagang. Dia akan menghitung berapa banyak untung melakukan terror, apa yang akan diperoleh dan seterusnya.

Adapun Sufiyono mengatakan anggota MMI, Salafi dan HTI di Padang masih banyak. Majelis Mujahidin (MMI), Salafi dan Hizbut Tahrir (HTI) walaupun tidak melakukan kekerasan struktural, tetapi kekerasan budaya. Ini karena kekerasan yang mereka lakukan tidak secara langsung dalam

bentuk teror tetapi dalam bentuk aksi budaya. MMI dapat dikatakan melakukan kekerasan langsung secara budaya, misalnya semua yang mereka lihat tidak sesuai dengan syariat (menurut mereka), jadi mereka mengklaim itu bukan syariat, itu harus dinyatakan. Bahkan secara lisan, Majelis Mujahidin kadang-kadang menggunakan kata-kata kasar seperti: kita lawan mereka..!

Adapun di Medan

LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN BOPTN

=====

=====

Judul Penelitian : Religiusitas, Gender dan Intoleransi (Studi Tentang Radikalisme di Kalangan Perempuan di Kota Medan dan Padang)

Kluster : Penelitian Interdisiplinary

Ketua Peneliti

Nama : Drs.Eldin H.Zainal,MA
Nip/NIDN : 195407121980031009 / 2012065401
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IV/c
Jabatan Fungsional : Dosen
Fakultas/Prodi : Syariah/ Jinayah

Anggota

Nama : Dr.Muhammad Faisal Hamdani,Mag
Nip/NIDN : 19740131 2001121001 /2031017401
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IV/b
Jabatan Fungsional : Dosen
Fakultas/Prodi : Syariah/ Pascasarjana AS

Dana Penelitian : Rp 41.000.000
Lokasi Penelitian : Medan dan Padang
Mitra Penelitian : -
Jangka Waktu Penelitian : Juli 2017 dan Juli sd Oktober 2018

Medan, 01 Nopember 2018
Menyetujui
Ketua LP2M

Ketua Pelasana

Prof.Dr.Pagar, MA
Nip 19581231 199803 1 016

Drs.Eldin H.Zainal,MA
Nip 195407121980031009

DAFTAR ISI

RELIGUISITAS, GENDER, DAN INTOLERANSI :

(Studi Tentang Radikalisme di Kalangan Perempuan di Kota Medan dan Padang)

BAB I. PENDAHULUAN	Hal
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	3
D. Lokasi Penelitian	3
E. Jadwal Penelitian	5
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual tentang Religuisitas, Radikalisme dan Intoleransi.	6
G. Metodologi dan Pendekatan Penelitian	19
H. Penelitian Terdahulu	29
BAB II. RADIKALISME DAN INTOLERANSI DI INDONESIA	
A. Pengertian Radikalisme dan Intoleransi	30
B. Radikalisme dan Intoleransi Agama	36
C. Radikalisme dan Ketidakadilan Sosial	42
D. Radikalisme dan Gender	44
BAB III. RADIKALISME DAN GENDER DI KOTA PADANG	
A. Sejarah Munculnya Radikalisme dan Intoleransi di Kota Padang	46
B. Radikalisme dan Intoleransi Menurut Tokoh, Ulama dan Peneliti di Kota Padang	49

C. Radikalisme dan Intoleransi di Kalangan Perempuan di Kota Padang	64
---------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV. RADIKALISME DAN GENDER DI KOTA MEDAN

A. Radikalisme dan Intoleransi di Kota Medan	68
B. Radikalisme dan Intoleransi Menurut Tokoh Harakah, Ulama dan Peneliti di kota Medan	74
C. Radikalisme dan Intoleransi di Kalangan Perempuan di Kota Medan	83

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah keluarga yang saya kenal di Medan, di wilayah Perumahan Sukaramai Tegal Sari Mandala, di mana banyak kaum profesional dan kelas menengah serta terdidik tinggal di sebuah kompleks perumahan yang baru saja dibuat itu. Lingkungan yang tertata rapi, saya melihat seorang Ibu memarahi anaknya karena berteman dengan anak lain yang berbeda pemahaman mungkin. Anak sang ibu yang tinggal di perumahan itu bahkan mengusir anak kampung yang ingin berteman dengan anaknya. Ditambah lagi pengalaman saya ketika berteman dengan salah satu pimpinan jamaah besar yang tinggal di daerah Komplek dekat setia budi, ketika saya bertamu di rumah tersebut saya hanya diperbolehkan sampai ruang tamu oleh sang ibunya, konon katanya gelas dan piring yang mereka sajikan untuk makan dan minuman kepada disamak atau cuci sampai benar-benar bersih, saya hanya bisa menyeringai dan bergegas pergi meninggalkan rumah mewah teman saya itu, hanya sekali itu saja dan cukup sekali kataku dalam hati, saya hanya bisa terpana menyaksikan situasi intoleran tersebut berlangsung tanpa bisa mencegah hal itu.

Boleh jadi kedua kasus wanita atau ibu tersebut di atas mendapatkan radikalisme dari jaringan pertemanannya selama ini, atau juga pengaruh dari pemahaman suaminya atau dari kegiatan *religious gathering* yang kerap diikutinya, dari kampus tempat kuliah dulu atau dari suaminya yang sangat tertutup dan kaku, atau dari buku-buku dan media yang selama ini diaksesnya, atau sosialisasi di masa kecilnya yang hidup dilingkungan yang tidak inklusif atau kekhawatiran-kekhawatiran modern yang menyebabkan dia demikian protektif. Banyak pertanyaan menggelantng di pikiran kita untuk menjelaskan situasi intoleransi dan sikap radikal yang ditunjukkan ibu tersebut.

Indonesia selaku negara multi etnis dan agama, masih menghadapi persoalan intoleransi. Akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan berbagai kondisi yang mendera kemapanan kehidupan berbangsa dan beragama. Hujat menghujat seakan sudah menjadi situasi dan hal yang lumrah. Semenjak menyeruaknya kasus penistaan agama, intoleransi terhadap berbagai macam perbedaan yang ada di

negara kita mengalami titik nadir yang kronis dan mengkhawatirkan.¹ Maraknya pemberitaan yang menyudutkan berbagai pihak, baik non muslim maupun muslim itu sendiri, saling menyerang satu sama lain jika tidak sepaham dengan pemahamannya. Dengan mudah mengkafirkan saudara seimannya yang memiliki jalan berfikir yang berbeda dengan mereka, serta bersikap intoleran terhadap non muslim, sehingga radikalisme timbul kembali ke permukaan.

Pada tahun 2016 yang lalu al-Chaidar melakukan survey yang melibatkan 1.520 responden yang tersebar di 34 provinsi. Responden adalah umat Islam berusia diatas 17 tahun atau sudah menikah. Survey yang digelar dari 30 Maret sampai 9 April 2016 itu menggunakan metode random sampling dengan margin error sebesar 2,6 persen dan tingkat keyakinan 95 persen.² Paparan hasil Survey tersebut bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah dalam menangani intoleransi dan radikalisme. Umat Islam di Indonesia merupakan wajah Islam Moderat dunia. Sebabnya Umat Islam Indonesia dikenal mampu hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya.³

Dari survey ini ditemukan bahwa ada sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukan sweeping tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Hanya sebanyak 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal. Namun Yenny mengingatkan meski hanya 7,7 persen, persentase tersebut cukup mengkhawatirkan. Sebab persentase tersebut menjadi proyeksi dari 150 juta umat Islam di Indonesia. Artinya jika diproyeksikan, terdapat sekitar 11 juta orang bersedia bertindak radikal dan itu adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan.⁴

¹<http://www.klikberita.co.id/peristiwa/peristiwa-ibu-kota/radikalisme-dan-intoleransi-di-indonesia.html>. Di akses 21 Juni 2017

²Kerawanan intoleransi di Indonesia menjadi temuan utama survey nasional tahun 2016 bertajuk *“potensi intoleransi dan Radikalisme Sosial keagamaan di kalangan Muslim Indonesia”* yang digeak Wahid Fiundation bekerjasama dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) di Rancamaya, Bogor, (Kompas, 1/8/2016)

³Toleransi dalam survey kali ini dimaknai dengan tidak menghalangi kelompok lain, baik secara muslim maupun non muslim, yakni dalam pemenuhan hak sosial keagamaannya. sebanyak 82,4 persennya bahkan rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.

⁴ Kendati demikian ada temuan positif dalam survey kali ini. Sebanyak 67,3 persen mendukung pemberlakuan sistem demokrasi di Indonesia dan 82,3 persen menyatakan dukungannya kepada Pancasila dan UUD 1954.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan kasus-kasus yang kami sebutkan di atas dan juga hasil awal survey ini, maka pokok masalah yang kami bahas “*Bagaimana Perkembangan Radikalisme Masyarakat Perempuan di kota Medan dan Padang*”

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan gambaran umum (review) perkembangan sikap intoleransi di tengah-tengah masyarakat perempuan di kota Medan dan Padang
2. Membuat pemetaan awal jejaring aktor dan kelompok perempuan intoleran dan radikal di wilayah Medan dan Padang sekaligus menemukan faktor-faktor kunci yang mendorong keterlibatan perempuan dalam ekstrimisme sekaligus upaya pencegahannya sebagai tambahan.

Adapun Signifikasi penelitian adalah :

1. Merumuskan program inisial dan usaha pencegahan yang dilakukan aktor dan komunitas-komunitas lokal.
2. Memonitor dampak program humanisasi yang bisa diberikan kepada subyek yang sudah terpapar radikalisme dan intoleransi secara berkala;
3. Pemerintah juga bisa mengambil manfaat dari penelitian agar tidak lagi menghasilkan kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok (agama, ras, suku dan aliran) tertentu. Peran pemerintah yang ikut mendukung tindakan intoleransi dan radikalisme, melalui pembuatan peraturan maupun kebijakan yang tidak melindungi semua golongan di dalam masyarakat. Pencabutan aturan yang dipandang diskriminatif harus dilakukan oleh pemerintah agar persoalan intoleransi dapat diselesaikan

D. Lokasi Penelitian

Kota Medan dan Padang dipilih sebagai kota-kota dengan tingkat modernasi dan kepadatan penduduk yang sangat plural, multikultur dan memiliki warisan historis yang unik. Terkait warisan

historis, penanganan radikalisme keagamaan di Medan dan Padang dapat dilakukan rekonsiliasi, dakwah dan pendidikan agama yang lebih konfrehensif dan mendalam. Area konflik di Medan dan Padang dalam sepuluh tahun terakhir meliputi isu-isu domain : Penutupan rumah ibadah, penyesatan keyakinan aliran keagamaan dan pelarangan aktifitas dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dipandang diskriminatif. Medan menjadi peta penting dalam barometer toleransi keberagama karena hampir semua penganut agama hidup berdampingan secara hetoregen hampir di semua daerah.

Adapun kota Padang dipilih karena pengaruh mazhab mainstream Muhammadiyah yang sangat kental. Berbeda dengan kota-kota lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang banyak dipengaruhi oleh mazhab mainstream Nahdatul Ulama. Akar radikalisme sesungguhnya adalah intoleransi, dan peran Islam moderat di Indonesia menjadi penting atas kemajemukan agama, bahasa, serta suku di negeri kita ini. Ada beberapa peran penting NU dalam sejarah perpolitikan negeri ini yang terbukti berperan penting menjaga kesatuan Indonesia dan meredam radikalisme.⁵

Pertama, terkait orientasi politik ideologis, ditunjukkan dengan langkah NU menerima Pancasila sebagai ideologi final. Kedua, terkait orientasi keagamaan, secara teologis dan psikologis, melalui pendekatan dialogis dengan bekal teologi *ahl al-sunnah wa al-jamaah* yang moderat, inklusif, dan toleran serta dengan *dakwah bil hikmah wal mauidzah hasanah*.

Di kota Medan dan Padang ini pula ditemukan banyak pengurus Unit Kegiatan Sekolah Kerohanian Islam atau Rohis di beberapa SMA Negeri favorit yang mengidolakan tokoh-tokoh agama yang selama ini dikaitkan dengan tindak kekerasan dan intoleransi. Beberapa siswa SMA Negeri setuju untuk mengubah dasar negara Pancasila, serta memilih pemimpin semata-mata berdasarkan kesamaan agama seperti BKM Al Farabi di SMA Negeri 2 Medan dan BAKMIS (Badan Kenaziran Mushola Ibnu Sina) SMA Negeri 1 Medan, di mushola-mushola inilah mereka melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian hingga selesai kuliah mereka melanjutkan ke lembaga dakwah kampus. Para aktifis rohis sekolah ini mereka mulai mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu gerakan dakwah melalui mentor-mentor yang berasal dari para alumni mereka yang sudah aktif di beberapa lembaga dakwah kampus seperti UKMI Ad Dakwah, LDK, KAMMI ataupun Gema Pembebasan

⁵<http://ksp.go.id/2017-tangkal-potensi-radikalisme-dan-intoleransi-dengan-dialog/> diakses 21 juni 2017

yang merupakan bentukan Hizbur Tahrir Indonesia (hasil wawancara personal peneliti dengan beberapa siswa).

E. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan melalui beberapa tahap time-frame yang sudah direncanakan, dimulai dari:

1. Penyusunan draft instrumen penelitian
2. Pre-Test dan Persiapan Turun Lapangan
3. Turun Lapangan (10 hari),
4. Laporan Penelitian,
5. FGD Temuan dan Hasil Riset,
6. Diskusi, dan terakhir
7. Pembuatan Laporan Final,
8. Laporan Penelitian 2017/2018 8 9 10 11 12 1 2 3

No	Kegiatan	2017/2018							
		8	9	10	11	12	1	2	3
1	Penyusunan draft Instrumen Penelitian								
2	Pre-Test dan persiapan turun lapangan								
3	Turun Lapangan (10) hari								
5	Laporan Penelitian								
6	FGD Hasil Riset								
7	Diskusi								
8	Laporan Akhir								
9	Laporan Publik (Publik Expose)								

Semua rangkaian kegiatan penelitian ini berlangsung selama 4 bulan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual tentang Religiusitas, Radikalisme dan Intoleransi

Intoleransi sesungguhnya adalah sebuah konsep yang luas yang menyangkut ideologi keagamaan, berhubungan dan dengan

radikalisme dan suasana atau kondisi kehidupan religius suatu masyarakat. Secara teoritik, perlu adanya reinterpretasi pemaknaan dari radikalisme tersebut. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan istilah radikalisme. Radikalisme itu sendiri berasal dari kata radix (mengakar atau mendalam) yang berarti berpikir radikal artinya berpikir secara mendalam. Seharusnya radikalisme diinterpretasikan sebagai bagian konsep berpikir yang luas dan mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh kehidupan beragama secara keseluruhan, totalitas (kafah). Bukan malah pada pengkotak-kotakkan radikalisme ekstrem kanan atau ekstrem kiri, yang hanya menunjukkan pada sisi simbolik saja, bukan memahami Islam secara substansif. radikalisme bukan mencari kesalahan, apalagi ingin menggurui dan melestarikan perpecahan. Apalagi sebagai kaum muslimin kita diwajibkan mencari jalan perdamaian, mencari titik temu atau jembatan penghubung yang bisa menyatukan hati seluruh umat manusia, mampu membangun kesatuan umat beragama.

Intoleransi dan radikalisme di Indonesia dinilai kian masif kemunculannya, baik kelompok maupun individu yang intoleran semakin bertambah secara signifikan.⁶ Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi mengakibatkan semakin mudahnya individu mengakses internet dan mengikuti perbincangan di jejaring media sosial. Ada banyak kegiatan negatif yang dikiranya luhur (noble crime) oleh beberapa kelompok-kelompok yang dianggap sering melakukan tindakan intoleran dan radikal, merupakan tindakan menebarbenih kebencian berkedok agama. semua elemen masyarakat yang selama ini diam, harus berani menyuarakan penolakan dan keberatannya terhadap kelompok intoleran.

Keindonesiaan bangsa ini justru sedang bergerak ke titik nol bila kelompok politik berbaju agama dibiarkan melakukan provokasi menggunakan bahasa dan simbol-simbol agama untuk melegitimasi antikeberagaman. Karena itu, peringatan Presiden Jokowi agar bangsa ini tidak mencampuradukkan politik dan agama sangat penting dan relevan. Peringatan ini dalam konteks persatuan bangsa. Jangan sampai agama dipolitisasi atau dijadikan sebagai komoditas.

Tidak mencampuradukkan agama dengan politik bukan berarti menegasikan nilai-nilai agama dalam politik. Agama justru merupakan sumur nilai atau tempat menimba kebijaksanaan untuk membangun

⁶<http://harian.analisadaily.com/opini/news/bahaya-laten-intoleransi-dan-radikalisme/311681/2017/02/03>. Diakses 22 juni 2018

habitus ke-Indonesia-an yang berdasarkan Pancasila. Prinsip demokrasi mengatur bahwa agama secara prosedural harus ada di ruang privat. Namun, secara substansial, agama mesti mengejawantahkan diri dalam ruang publik melalui perjuangan kebaikan dan kebajikan yang universal. Jika dahulu, secara konvensional kelompok-kelompok radikal dan intoleran berkembang dari mulut ke mulut, melalui religius sermont, dakwah, pengajian-pengajian eksklusif dan mengadakan pertemuan langsung, dan melakukan rekrutmen. Tapi sekarang melalui situs atau jejaring sosial, rekrutmen bisa dilaksanakan secara online.⁷ Simpatisan atau afiliasi dari kelompok ini juga semakin berkembang di dunia maya. Beberapa kasus intoleran di tanah air juga kerap dipicu oleh media sosial. Hasutan, provokasi, dan ujaran kebencian dari media-media online yang berada di luar *mainstream*. Provokasi dan ujaran kebencian dari media-media ini sering kemudian menjadi bahan rujukan dan disebar melalui media sosial.

a. Teori Relegiusitas

Kehidupan keagamaan dan dinamika serta kecenderungan ke arah konservatisme serta radikalisme adalah kehidupan religiusitas yang kompleks. Ada kalanya terjadi sekularisasi yang cukup intens, ada kalanya terjadi putaran atau belokan ke arah konservatisme bahkan hingga ke radikalisme. Martin van Bruinessen (2014) menyebut situasi ini sebagai *conservative turn* dalam suatu religiusitas suatu masyarakat. Kita bisa melihat bagaimana tiba-tiba sikap orang-orang NU dan Muhammadiyah yang toleran dan bergaya tradisional tiba-tiba berubah menjadi eksklusif dan non-tradisional.

Religiusitas juga dipengaruhi oleh modernisasi serta semakin menguatnya gaya hidup sekuler di tengah masyarakat. Tidaklah mengherankan jika radikalisme sering muncul dalam bentuk gerakan anti kemodernan dan para penggerakannya sering menggunakan agama puritan untuk melawan dominasi agama sipil yang diproteksi oleh neagara. Para ahli teori sosial seperti Karl Marx, Sigmund Freud, Max Weber, dan Émile Durkheim, menyatakan bahwa modernisasi masyarakat akan mendorong penurunan tingkat religiusitas. Penelitian

⁷Dalam beberapa tahun ini, pemerintah lewat Menkominfo pernah “membredel” media-media online yang dianggap radikal dan berafiliasi kepada kelompok-kelompok teroris. Tapi kebijakan ini dianggap kontroversial dan ditentang banyak pihak karena dianggap memberangus kebebasan berpendapat. Tidak ada tindak lanjut dari kebijakan tersebut, dan semakin suburlah ujaran-ujaran radikalisme dan intoleransi di dunia maya.

dalam proses ini bertujuan untuk menentukan kelakuan yang menyebabkan kepercayaan, praktik dan institusi keagamaan kehilangan pengaruh publik (Gauchet, 1997). Sejumlah ahli teori membantah bahwa sekularisasi peradaban modern disebabkan oleh ketidakmampuan manusia untuk mengadopsi kebutuhan etis dan spritual manusia agar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat.

Agama Sipil adalah sebuah konsep yang muncul dari pemikiran politik di Prancis dan menjadi topik utama oleh para sosiolog Amerika semenjak dipopulerkan oleh Robert N. Bellah (1967). Konsep ini menyatakan tentang adanya fungsi implisit dari negara sebagai sebuah agama (jalan hidup), sebagaimana nampak pada perayaan publik, simbol negara, upacara dan hari-hari besar di tempat bersejarah (seperti monumen, medan perang, atau taman makam pahlawan). Praktik-praktik ini berasal dari luar ajaran agama, meski ritual keagamaan kadang diselipkan dalam praktik agama sipil tersebut (Cassanova, 1994: 44).

Tema utama dari konsep ini adalah bahwa agama sipil ini pada intinya berlandaskan pemikiran manusia bukannya berdasarkan wahyu, namun seringkali dimasukkan unsur dari keagamaan yang dianggap sesuai (Said, 1978). Di mana Konstitusi berkedudukan seperti kitab suci, para pendiri bangsa setara nabi atau imam besar, penggunaan simbol-simbol dan praktik agama yang serupa atau modifikasi dari praktik keagamaan, dll. Robert Bellah juga menyatakan akan kemungkinan Agama sipil ini dimasa depan akan dapat menggantikan agama tradisional sebagai pedoman hidup masyarakatnya. Peter Berger (1967) telah mempelajari akar dan pengembangan konsep ini dan merumuskan pembagian jenis agama di dalam politik menjadi dua, yaitu Agama Sipil dan Agama Politik.

Menurut Robert Bellah (1967: 10-21), Agama sipil meliputi hal-hal seperti: Mencuplik seruan kepada Tuhan dalam pidato politik dan monumen publik; Kutipan dari teks-teks agama pada acara-acara publik oleh para pemimpin politik; penghormatan para pemimpin politik masa lalu; penggunaan kehidupan para pemimpin ini untuk mengajarkan cita-cita moral panutan; penghormatan terhadap veteran dan korban perang suatu negara; majlis keagamaan yang diprakarsai oleh para pemimpin politik; penggunaan simbol-simbol keagamaan di gedung-gedung publik; penggunaan bangunan umum untuk ibadah; adanya mitos atau legenda tentang tokoh pendiri bangsa dan mitos nasional lainnya.

Sedangkan di antara praktik-praktiknya sebagai berikut (Bellah, 1967: 12): masyarakat menyanyikan lagu kebangsaan pada pertemuan-

pertemuan publik tertentu; parade atau pemasangan bendera nasional pada liburan hari besar nasional tertentu; sumpah setia (baiat), seperti Ikrar Kesetiaan Amerika Serikat; upacara dalam pelantikan presiden atau penobatan raja; monumen untuk memperingati pemimpin besar dari masa lalu atau peristiwa bersejarah; menceritakan kembali sejarah/legenda dari Pendiri bangsa dan para pemimpin besar lainnya atau tentang peristiwa besar pada masa lalu (misalnya, pertempuran, migrasi massal) secara berlebihan, dari satu sisi saja, dan cerita-cerita mitos/legenda secara sederhana. lihat pula nasionalisme romantik; monumen untuk pahlawan yang tewas atau upacara tahunan untuk mengingat mereka; ekspresi penghormatan untuk simbol negara atau konstitusi atau Pemimpin; Jenazah seorang penguasa politik yang baru meninggal ditampilkan kepada publik dan praktik-praktik lainnya yang menyerupai ritual keagamaan.

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya (Saler, 1990). Agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. Untuk itu terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama itu perlu dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya. Sementara agama susah untuk didefinisikan, sebuah model standar dari agama, digunakan dalam perkuliahan religious studies, diajukan oleh Clifford Geertz, yang dengan sederhana menyebutnya sebagai sebuah "sistem kultural" (Clifford Geertz, *Religion as a Cultural System*, 1973).⁸

Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga. Agama adalah sebuah koleksi terogansir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/pemerintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup atau menjelaskan asal usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang disukai. Pratik agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan atau pemujaan tuhan, dewa atau

⁸Sebuah kritikan untuk model geertz oleh Talal Asad mengkategorikan agama sebagai "sebuah kategori antropologikal". (Talal Asad, *The Contruction of Relegion as on Anthropological Category*, 1982)

dewi, pengorbanan, fesitival, pesta, trance, inisiasi, jasa penguburan, layanan pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, masyarakat layanan atau aspek lain dari budaya manusia. Agama juga mungkin mengandung mitologi (Suparlan, 1988; Koentjaraningrat, 1974).

Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan atau kadang-kadang mengatur tugas; Namun, dalam kata-kata Émile Durkheim, agama berbeda dari keyakinan pribadi dalam bahwa itu adalah "sesuatu yang nyata sosial". Émile Durkheim (1976) juga mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebuah jajak pendapat global 2012 melaporkan bahwa 59% dari populasi dunia adalah beragama, dan 36% tidak beragama, termasuk 13% yang ateis, dengan penurunan 9 persen pada keyakinan agama dari tahun 2005. Rata-rata, wanita lebih religius daripada laki-laki. Beberapa orang mengikuti beberapa agama atau beberapa prinsip-prinsip agama pada saat yang sama, terlepas dari apakah atau tidak prinsip-prinsip agama mereka mengikuti tradisional yang memungkinkan untuk terbentuk menjadi sinkretisme.

Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu: menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan, dan menaati segenap ketetapan, aturan, hukum dll yang diyakini berasal dari Tuhan (Schuon, 1993). Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama (Geertz, 1993). Lebih luasnya lagi, agama juga bisa diartikan sebagai jalan hidup. Yakni bahwa seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluknya diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beribadah, dan sebagainya ditentukan oleh aturan/tata cara agama (Wallace, 1966).

b. Teori Radikalisme Agama

Radikalisme dalam definisi BNPT dicirikan minimal 4 hal yaitu:

1. Keinginan melakukan perubahan dengan cepat
2. Menggunakan kekerasan mengatas namakan agama.

3. Mengkafirkan orang lain, mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS dan
4. Memaknai jihad secara terbatas.

Kemunculan kelompok radikal dan intoleransi merupakan masalah yang cukup serius. Perilaku mereka kerap diikuti ujaran kebencian dan tak jarang berujung kejahatan dengan kebencian (hate crimes). Bahkan, beberapa negara maju-termasuk Amerika Serikat-menjuluki aksi mereka sebagai terorisme domestik. Menghadapi kelompok tersebut, di Indonesia, dibutuhkan cara khusus untuk mencegah munculnya konflik sosial antara yang satu dan lainnya.

Dalam Ilmu Sosial, agama sebagai fakta sosial yang memiliki banyak dimensi. Secara Antropologis, banyak perilaku keagamaan yang berasal dari proses akulturasi maupun inkulturasi budaya. Dalam Psikologi, agama mampu menghadirkan gejala kejiwaan yang khas. Dalam Sosiologi, agama telah melahirkan kelompok-kelompok dan perilaku sosial. Mengingat agama memiliki banyak dimensi, maka pendekatan (baik dalam mendiagnosa, menganalisis maupun dalam penyelesaian) permasalahan radikalisme agama harus bersifat multi-disipliner dan multi-dimensional.

Radikalisme sebagai Masalah Sosial, Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, perombakan dan pergantian terhadap suatu sistem sosial sampai ke akarnya dan dilakukan secara total. Jika perlu bisa saja dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Karena itu radikalisme agama merupakan masalah sosial yang kehadirannya tidak diinginkan oleh masyarakat. Sudut pandang Sosiologi mendasarkan pada tiga kerangka teori induk, yakni teori Fungsional Struktural (Patologi Sosial, disorganisasi/disintegrasi dan teori Deviasi Sosial), teori Konflik (Konflik Nilai individual atau personal dan Konflik Nilai institusional) dan teori Interaksionisme Simbolik yang sering disebut sebagai labelling (Julian, 1986: 11).

Dua Asumsi Dasar dalam penelitian tentang radikalisme ini adalah: Pertama, masalah sosial merupakan efek tidak langsung dari pola tingkah laku serta sistem sosial yang ada. Oleh karena itu radikalisme agama harus dilihat sebagai efek atau akibat dari pola, sistem nilai maupun struktur sosial yang ada. Kedua, Dalam setiap struktur sosial, pasti ditemukan orang-orang yang bisa beradaptasi dengan struktur sosial dan sistem nilai dan juga ada orang-orang yang menyimpang. Radikalisme agama merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang secara sosial.

Radikalisme Agama Sebagai Akibat dari Struktur Sosial (Religio-Politik). Demokrasi rakyat yang “lapar” ditambah “tidak berpendidikan” dapat melahirkan persepsi yang simplistik yang kemudian akan mudah membawa pada sikap-sikap emosional karena kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai masalah yang dihadapi. Masyarakat politik (political community) lebih senang mendirikan insitusi daripada membangun budaya demokratis. Partai politik yang ada sudah tidak lagi berfungsi sebagai institusi demokrasi yang mampu menyelenggarakan pendidikan politik. Partai-partai politik sudah kehilangan idealismenya sehingga yang terjadi bukan perjuangan mempertahankan citra diri serta karakter ideologis partai tetapi bagaimana agar partai bisa digunakan menjadi alat bargaining posisi politik dan kendaraan sewaan. Euforia politik yang ditandai dengan tuntutan berlebihan atas hak-hak politik tetapi pada saat yang sama mengabaikan kewajiban politik.

Konflik elite dalam perebutan kekuasaan yang berkepanjangan juga telah ikut mewarnai struktur sosio-politik yang ada sekarang. Jargon “kepentingan rakyat” selalu dinyanyikan meskipun kenyataannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Pernyataan konstitusional “Negara Hukum”, kenyataannya politik masih dianggap sebagai panglima, bukan hukum. Pimpinan partai menjadi rebutan bukan untuk tujuan ideologis tetapi karena posisi ketua partai politik bisa dijadikan sebagai alat tawar menawar posisi politik yang ujung-ujungnya duit dan kepentingan pribadi. Para tokoh agama seharusnya muncul sebagai “guru bangsa”, yang dapat mencerdaskan warga negara akan hak-hak dan kewajibannya, malah banyak yang menjadi pelayan politisi/penguasa atau pelayan calon penguasa. Peran tokoh agama baik sebagai social engeneer maupun sebagai pengganti peran-peran kenabian tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya politik kerakyatan yang merupakan inti dari peran kenabian ini tidak pernah dimainkan dengan baik. Pada saat yang bersamaan banyak para tokoh agama yang lebih memilih berada pada wilayah politik praktis, terutama menjelang pemilihan umum lokal atau nasional.

Radikalisme Agama sebagai Deviasi Sosial (1) Deviant (orang-orang yang perilaku tidak sejalan dengan sistem nilai dan sistem sosial yang telah disepakati bersama) bisa terjadi karena banyak faktor. Dalam kaitannya dengan pemahaman keagamaan, deviasi sosial bisa saja muncul ketika model pemahaman seseorang berbeda dengan umumnya orang menafsirkan. (2) Model pemahaman tekstual, membuat orang terpasung oleh teks, sementara pendekatan pemahaman romantik dalam memandang sejarah masa lalu

juga bisa membuat orang menjadi kehilangan daya kritis. Dua model pendekatan dalam memahami ajaran agama ini sangat mungkin membuat seseorang mengalami konflik nilai.(3). Jika konflik nilai terjadi berkepanjangan pada diri seseorang, maka ketakutan, kecemasan dan frustrasi akan mengendap pada jiwa seseorang (Gordon, 1993: 393).

Ketakutan dan kecemasan inilah yang kemudian melahirkan tiga macam sikap, yakni, rigiditas, agresif dan schizophrenia.(4). Rigiditas pada umumnya disertai dengan sikap exclusive. Keduanya (rigiditas dan eksklusifitas) merupakan penyimpangan psikologis yang ditandai dengan perilaku *maladaptive* (ketidak-mampuan menyesuaikan diri). Secara psikologis, keduanya dianggap “abnormal” atau secara sosiologis disebut deviant, sebab individu yang normal selalu memiliki kemampuan untuk berpikir realistis dalam menafsirkan kejadian-kejadian di sekelilingnya. 5. Rigiditas dan Exclusiveness bermula dari suatu keyakinan akan kebenaran suatu nilai. Nilai yang diyakini benar, sudah barang pasti berasal dari sebuah otoritas. Sedangkan perilaku exclusive merupakan akibat langsung dari keberpihakan jiwa terhadap apa yang dianggap sebagai otoritas dan mengalahkan konformitas sosial (Gergen, 1990:21-24).

Semakin keras konflik nilai, semakin frustrasi seseorang, dan semakin frustrasi seseorang, maka akan semakin agresif (Gordon, 1993:397). Tapi sikap agresif ini hanya mungkin diwujudkan manakala kondisi sekitarnya memungkinkan. Jika tidak, maka dua kemungkinan bentuk perilaku akan timbul, melakukan kepatuhan semu (pseudo obedience) atau melakukan tindakan agresif berupa tindakan radikalisme keagamaan.

Penafsiran yang Memberi Kenyamanan Beragama dan Berbangsa Tafsir terhadap agama tentu saja tidak pernah tunggal. Kalau memang demikian memilih model dan hasil penafsiran keagamaan yang tidak membuat para pengikut agama berada dalam konflik nilai menjadi penting. Orang yang dilanda konflik nilai bisa berakibat kaku, eksklusif dan emosional. Pengendalian Semangat dan Emosi Keagamaan Kenyataannya setiap agama telah memunculkan dua kondisi kejiwaan para pemeluknya yang diidealkan berjalan paralel, yakni sikap agamis dan emosional. Seorang pemeluk agama tidak mungkin dikatakan agamis menurut logika agama yang dipeluknya jika tidak memiliki emosi keagamaan. Tapi jika hanya semangat, tanpa disertai dengan kemampuan memahami agama dengan baik maka radikalisme sangat mungkin terjadi.

Tidak melakukan politisasi agama adalah saran ideal, namun sering tidak realistis. Berpolitik tanpa fondasi agama bisa membawa pada tindakan pembenaran segala cara (Machiavellism). Tapi bukan berarti kita boleh melakukan eksploitasi agama untuk pemenuhan kepentingan politik. Ini penting untuk menghindari “perang tafsir” demi kepentingan politik. Membangun Paradigma Kemanusiaan Membangun kerjasama dengan sesama kelompok lain baik dalam satu agama maupun beda agama harus berdasarkan pada paradigma kemanusiaan (humanity), tidak berdasar pada paradigma politik. Dalam politik berlaku adagium “tidak ada lawan dan teman abadi yang ada hanyalah kepentingan abadi”. Jadi dalam politik yang ada hanya persahabatan semu.

c. Konsep Intoleransi

Intoleransi beragama, dalam penelitian ini, adalah suatu kondisi jika suatu kelompok (misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, menurut F Budi Hardiman (2016), pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi.

Menurut sejarawan Inggris abad ke-19 bernama Arnold Toynbee (1947: 300), suatu pembentukan agama yang menganiaya agama lain karena "dianggap salah", ironisnya membuat agama yang menganiaya menjadi salah dan merusak legitimasinya sendiri. Konsep modern mengenai intoleransi berkembang dari kontroversi religius antara Kristen dan Katolik pada abad ke-17 dan 18 di Inggris. Doktrin mengenai "toleransi beragama" pada masa tersebut bertujuan untuk menghilangkan sentimen-sentimen dan dogma-dogma beragama dari kepemilikan politik (Hobolt, Brug, Vreese, Boomgaarden, 2011: 359).

Toleransi harus dikondisikan secara politis. Sikap-sikap toleran yang sudah ada pada ranah kultural harus diangkat ke ranah politis dalam bentuk sistem hak-hak yang dijamin oleh negara. Kegagalan pemerintah dalam menjamin hak-hak publik itu justru dapat merusak toleransi kultural pada lapisan akar rumput. Semua pihak ingin diperlakukan toleran, maka negara mendapat legitimasinya jika dapat bersikap toleran terhadap warganya. Namun negara salah memakai keutamaan ini, jika dipakai untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal yang menindas minoritas dan mengancam kebebasan publik.

Dalam situasi itu toleransi justru dirasakan represif oleh masyarakat. Sebaliknya, intoleransi mengandung alasan yang baik untuk dipilih.

Norberto Bobbio, (1997: 45) menyebutkan bahwa toleransi dan intoleransi, masing-masing memiliki arti positif ataupun negatif. Toleransi dalam arti positif adalah respek terhadap orang-orang yang memiliki iman, pemikiran, atau keturunan yang berbeda. Toleransi dalam arti ini bertentangan dengan intoleransi religius, politis, ataupun rasistis. Aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran tempat ibadah, pembubaran ibadah, ataupun penganiayaan adalah intoleransi dalam arti negatif yang bertentangan dengan toleransi dalam arti positif.

Toleransi tidak selalu positif. Toleransi dalam arti negatif adalah pembiaran ataupun ketidakpedulian terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap mereka yang berbeda. Pelakunya bisa negara ataupun masyarakat sendiri. Negara mengambil sikap toleransi negatif jika tidak tegas menindak kelompok-kelompok yang menindas minoritas. Ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menindak intoleransi dapat dinilai sebagai pemihakan terhadap kelompok pelaku kekerasan tersebut. Sikap itu juga membuat kelompok-kelompok garis keras menjadi penguasa riil yang mudah memaksakan kehendak mereka, bahkan terhadap pemerintah.

Menurut Bobbio (1997: 61), intoleransi juga dapat menjadi sebuah keutamaan politis. Dalam arti positif ini intoleransi adalah sikap tegas, konsekuen, atau taat asas. Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah toleransi dalam arti positif. Hanya perlu diingat bahwa toleransi dalam arti positif itu hanya dapat dijamin oleh sebuah pemerintahan yang mempraktikkan intoleransi dalam arti positif. Sikap tegas, konsekuen, dan taat asas dibutuhkan untuk melindungi masyarakat madani (*civil society*) dari teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang intoleran dalam arti negatif. Montesquieu (2012) sudah mengingatkan bahwa demokrasi merosot karena kegagalan negara dalam menjamin keamanan publik. Apabila kebebasan lebih dirasa sebagai ancaman daripada kenikmatan, masyarakat pun mulai menaruh simpati pada tiran-tiran kecil dan bersedia menukar kebebasan dengan keamanan.

Dalam demokrasi, kebebasan hanya berarti untuk rakyat jika negara dan *civil society* gigih menghalau para musuh kebebasan. Fakta bahwa kegigihan itu sekarang ini kurang dimiliki para pemimpin kita sangatlah menggelisahkan kita semua. Semua negara maju tahu bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap para musuh toleransi. Dasar filosofisnya diberikan

oleh John Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice*, dia berpendapat bahwa toleransi adalah bagian dari sistem keadilan untuk semua orang yang mau hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk. Asas keadilan sebagai fairness dilanggar jika suatu kelompok yang intoleran de facto diberi toleransi untuk aksi-aksi kekerasannya. Menurut dia, kelompok intoleran ini bahkan tidak memiliki hak untuk berkeberatan atas sikap tegas negara terhadapnya.

Sebaliknya, civil society berhak untuk berkeberatan atas eksistensi mereka. Demi konstitusi, kelompok-kelompok yang toleran dalam masyarakat itu dapat memaksa kelompok intoleran tersebut untuk menghormati hak pihak lain. Mereka boleh mendesak pemerintah untuk membatasi kebebasan kelompok intoleran kalau aksi-aksi kelompok ini meresahkan masyarakat. Mengapa? Karena toleransi yang dikehendaki oleh semua pihak itu tak dapat dibangun di atas sikap toleran terhadap intoleransi.

Dunia internasional sudah tahu bahwa pembubaran ibadah, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan penganiayaan atas penganut agama minoritas sering terjadi dalam masyarakat kita. Semua insiden itu dapat dicegah seandainya aparat kepolisian kita memiliki sikap konsekuen, taat asas, dan tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran. Dalam demokrasi pemerintah memang harus toleran, tetapi hal itu tidak berarti juga toleran untuk intoleransi. Toleransi terhadap intoleransi pada gilirannya akan menghapus toleransi dan menghancurkan kebebasan warga. Jadi, toleransi negara hukum demokratis tidak tak terbatas. Batas-batas toleransi adalah intoleransi. Penyebab meningkatnya intoleransi bukanlah demokrasi, melainkan suatu pemerintahan yang toleran terhadap intoleransi. Pemerintahan seperti itu tidak hanya membiakkan intoleransi pada ranah sosial dan kultural. Kelembekan sikap politis para pemimpinnya merupakan sebuah pengantar ke dalam kegagalan demokrasi.

d. Konsep Gender

Dalam penelitian ini, konsep gender dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana individu yang lahir secara biologis (sebagai laki-laki dan perempuan) yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Istilah gender seringkali tumpang tindih dengan seks

(jenis kelamin), padahal dua kata itu merujuk pada bentuk yang berbeda. Seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya jelas terlihat, seperti laki-laki memiliki penis, scrotum, memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, memproduksi sel telur. Alat-alat biologis tersebut tidak dapat dipertukarkan sehingga sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan dari Tuhan (*nature*)

Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, laki-laki itu kuat, rasional, perkasa. Sedangkan perempuan itu lembut, lebih berperasaan, dan keibuan.

Ciri-ciri tersebut sebenarnya bisa dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang lembut dan lebih berperasaan. Demikian juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ini dapat terjadi dari waktu ke waktu dan bisa berbeda di masing-masing tempat. Jaman dulu, di suatu tempat, perempuan bisa menjadi kepala suku, tapi sekarang di tempat yang sama, laki-laki yang menjadi kepala suku. Sementara di tempat lain justru sebaliknya. Artinya, segala hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, komunitas ke komunitas yang lain, dikenal dengan gender.

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egalitarian*). Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat seperti di DPR, Militer, Manajer, Menteri, Gubernur, Pilot, dan pimpinan partai politik.

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Dalam proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori nurture di atas. Lalu beralih ke teori nature. Pendekatan

nurture dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (instinct). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas (division labor) begitupula dalam kehidupan keluarga. Harus ada kesepakatan antara suami istri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Dalam organisasi sosial juga dikenal ada pimpinan dan ada bawahan (anggota) yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan.

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan etimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradapan manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.

G. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk bisa menyelami ancaman radikalisme dan intoleransi yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia karena adanya unsur politik, budaya, transmisi keagamaan, sosial dan tidak semata karena deprivasi realatif secara ekonomi. Untuk menyelami kerumitan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kelompok-kelompok keagamaan, aktor-aktor dan lembaga-lembaga serta aliran dan ideologi tertentu yang bermain di keruhnya suasana radikalisme dan intoleransi sekarang ini.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian

sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Berbeda dengan kuantitatif, objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas.

Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau tragedi atau kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan pewawancara atau moderator group periset menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil

temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari pewawancara atau moderator group.

Dalam penelitian kualitatif, identitas dan peran informan serta informasi-informasi yang disampaikan menjadi hal-hal yang berharga sehingga peneliti harus memiliki tanggungjawab untuk memperlakukan identitas diri dan informasi yang disampaikan oleh informan. Identitas dan informasi tersebut dapat dibuka atau tertutup untuk khalayak, tergantung dari kesepakatan antara peneliti dan informan yang tertulis dalam formulir kesepakatan (consent form). Peneliti boleh membuka identitas selama informan sepakat dan peneliti juga harus menghargai keputusan apabila informan ingin identitasnya dilindungi. Dalam pengambilan data penelitian kualitatif, sebaiknya peneliti mendapatkan izin baik secara tertulis ataupun lisan sehingga penelitian tidak melanggar norma-norma yang mungkin dianut oleh informan atau objek penelitian. Selain penelitian yang melibatkan masyarakat dan media komunikasi yang dihasilkan, kegiatan dan manajemen komunikasi dengan informan terdapat aspek penting lainnya yaitu organisasi komunikasi yang belajar untuk sepenuhnya pemahaman dimensi tentang bagaimana sebuah organisasi berkomunikasi dan apa yang bekerja dan apa yang tidak dalam hal ini termasuk pemeriksaan penggunaan pola komunikasi elektronik sistem seperti e-mail, WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, dll.

Penelitian kualitatif adalah salah satu membentuk penelitian formatif yang menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan khalayak sasaran. Penelitian ini memungkinkan pengelola program memperoleh pemahaman mendalam tentang sikap, kepercayaan, motif dan perilaku khalayak sasaran. Kalau digunakan secara tepat, teknik kualitatif dan teknik kuantitatif bisa saling melengkapi. Sebagai contoh, pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam tentang tanggapan konsumen, sedangkan pendekatan kuantitatif memungkinkan pengukuran atas tanggapan tersebut. Pada hakekatnya, peneliti menggali aspek kontekstual dan emosional tanggapan manusia bukan melihat perilaku dan sikap yang secara obyektif dapat diukur. Penelitian kualitatif menambah “rasa”, “tekstur” dan nuansa pada temuan kuantitatif.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan “mengapa”, sedangkan penelitian kuantitatif untuk menjawab pertanyaan “berapa banyak” dan “berapa kali”. Proses penelitian kualitatif merupakan upaya “menemukan”, sedangkan penelitian

kuantitatif “mencari bukti”. Lagi pula, sifat kualitatif penelitian ini bukan hanya pada teknik penggalan jawaban, tetapi juga pada analisisnya. Penelitian kualitatif lebih bersifat interpretatif daripada deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan pada sejumlah kecil responden yang sampelnya tidak dipilih berdasarkan prinsip probabilitas. Tidak ada upaya untuk menarik kesimpulan secara pasti atau menggeneralisasikan hasil yang diperoleh pada populasi yang besar. Dua teknik penelitian kualitatif utama adalah: (1) Wawancara Perorangan Secara Mendalam (in-depth interview), dan (2) Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion).

b. Pendekatan Etnografi

Dalam kerja lapangan peneliti bisa mendapatkan kesadaran budaya dan mengenali proses sosial. Dalam proses ini mereka berinteraksi dengan mereka sendiri dan menambah pengetahuan tentang mereka dan budaya pribumi (objek). Tugas menulis adalah memfasilitasi ketika peneliti melihat proses sosial di mulai dengan proposal penelitian kemudian dialog dengan catatan lapangan membuktikan peneliti punya visi yang terbukti kepada audien tentang hasil penelitian

Kerja lapangan dapat di gunakan untuk mendesain beragam formula penelitian. Kerja lapangan penelitian proses sosial dimana peneliti berusaha masuk ke dalam makna umum dan berpartisipasi dalam sistem moral yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Antropolog azim mengacu pada makna dan sistem moral sebagai budaya masyarakat dan dengan definisi ini kita tidak bertengkar . tetapi kemudian telah berbicara seolah-olah peneliti lapangan bisa melebur atau masuk ke budaya yang sederhana. deskripsi ini menyesatkan karena jarang bahwa individu asing dapat masuk ke sebuah komunitas atau masyarakat hanya dengan pilihan pribadi, menjadi anggota adalah proses bersama melibatkan sosial dan psikologis akomodasi yang kompleks baik oleh pekerja lapangan dan kelompok penerima.

Dalam penelitian ini ditekankan bahwa peneliti berjuang untuk mengerti dan masuk ke dalam dunia tentang moral dan makna dari tuan rumah (yang kita teliti), kedua kata tersebut mempunyai konsekuensi bahwa peneliti membenamkan dirinya dalam lingkungan budaya tersebut. Dalam penelitian lapangan sering di bicarakan tentang partisipasi observer, partisipan sangat signifikan bukan karena penelitian lapangan menjadikan peneliti identik dengan tuan rumah, tetapi justru partisipan terutama dalam konteks ceremonial dia terlihat

dan sikap sukrela kepada komitmen bukan karena ideologi konsepsi kesetaraan atau identitas tetapi penerimaan paritas sosial dengan konsekuensi kewajibannya.

Langkah selanjutnya setelah penelitian lapangan adalah menulis laporan, untuk penulisan penelitian kualitatif, terutama penelitain lapangan dengan kondisi dinamis dan tak terdug dari objek penelitian, bahasa yang bagus merupakan dasar untuk interpretasi, analisis dan komunikasi. Biasanya setelah penelitian lapangan waktunya analisis dan menulis membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan penelitian lapangannya sendiri. Ketika immersion situasi di lapangan berbeda dengan deskripsi itu artinya waktunya analisa apa yng terjadi. Setelah penelitian lapangan, peneliti harus bersiap untuk berkonsentrasi dirinya kepad interpretasi, analisis dan komposisi.

Penelitian lapangan Etnografi termasuk ke dalam penelitian kelompok dan manusia tentang kehidupan mereka sehari – hari. Hal ini membawa dua aktivitas penelitian yang berbeda : pertama etnografi masuk kedalam sosial setting dan mendapatkan pengetahuan kenapa masyarakat masuk kedalam sosial setting tersebut, biasanya seting bukanlah diketahui sebelumnya dengan cara yang dipaksakan. Etnografer berpartisipasi/terlibat dalam rutinitas sehari – hari dari seting, membangun hubungan dengan masyarakat dan meneliti semua hal yang terjadi pada proses tersebut. Tentu saja istilah partisipan observer sering dijadikan untuk menyebut pendekatan penelitian ini. Yang kedua peneliti menulis secara reguler dengan cara yang sistematis atas apa yang di temui peneliti dilapangan ketika mengamati rutinitas keseharian yang menjadi subjek penelitian. Demikianlah peneliti mengkreasikan dalam akumulasi tulisan pengalaman ketika observasi. Itulah dua kegiatan yang saling berkaitan dan merupakan inti penelitian etnografi, di bahas dalam penelitian ini dan partisipasi membuat implikasi kepada peneliti untuk menulis catatan lapangan.

Etnografi Partisipasi adalah metode dimana etnografer memiliki komitmen untuk keluar dan “dekat” dengan kegiatan setiap hari dari masyarakat yang diteliti. Dekat di sini minimal tau keperluan dan kekuasaan sosial disekitar kegiatan kehidupan masyarakat tersebut. Peneliti harus mampu menempatkan diri dalam kehidupan masyarakat agar bisa meneliti dan memahami mereka. Untuk lebih dekat peneliti melakukan “immersion kepada masyarakat” apa makna dari pengalaman mereka itu sangat penting. Karena dengan immersion peneliti lapangan bisa melihat dari dalam bagaimana masyarakat melakukan kegiatan rutin, bagaimana mereka mendapatkna makna dan bagaimana mereka melakukannya, dalam hal ini immersion memberi

peneliti lapangan akses untuk mengetahui hal yang sensitif dalam interaksi dan proses.

Dalam antropologi, seorang etnografer haruslah melakukan immersion, yaitu melibatkan diri dengan masyarakat yang di teliti untuk melihat bagaimana respon mereka terhadap peristiwa yang terjadi dan pengalaman mereka terhadap peristiwa - peristiwa ini dan bagaimana peristiwa ini mempengaruhi mereka. Jelasnya immersion etnografi. Partisipasi dekat terus dalam kehidupan masyarakat lain mendorong apresiasi kehidupan sosial didasari oleh proses berkelanjutan, melalui partisipasi peneliti lapangan melihat dari tangan tangan pertama dan dari dekat bagaimana orang bergulat dengan ketidakpastian dan kebingungan bagaimana makna muncul melalui pembicaraan dan tindakan kolektif, bagaimana pemahaman dan interpretasi perubahan dari waktu ke waktu. dalam semua hal kedekatan peneliti lapangan untuk kehidupan sehari-hari dan kegiatan lain mempertinggi kepekaan terhadap kehidupan sosial sebagai proses.

Catatan lapangan membuat gambaran pengalaman dan observasi peneliti ketika berpartisipasi secara intens dan terlibat dalam masyarakat yang di teliti, menulis deskripsi tentang pengalaman dan observasi sebisa mungkin mendekati kenyataan yang ada dilapangan walaupun memang tidak ada yang sepenuhnya natural atau benar tentang pengamatan. Karena deskripsi terpengaruh oleh persepsi dan interpretasi, deskripsi yang berbeda dari situasi dan peristiwa yang sama itu lebih memungkinkan, peristiwa yang sama tapi dengan tujuan dan fokus yang berbeda.

Menulis catatan lapangan bukan hanya menulis tentang fakta dan apa yang terjadi tetapi termasuk kedalamnya proses proses interpretasi. Dalam hal ini penting memasukan “inskripsi” dari kehidupan sosial. Sebagai prasasti catatan lapangan adalah produk dari dan mencerminkan konvensi untuk mengubah peristiwa yang disaksikan, orang, dan tempat ke dalam kata-kata di atas kertas. di bagian transformasi ini melibatkan proses yang tak terelakkan seleksi ethnografer yang menulis tentang hal-hal tertentu dan dengan demikian ada beberapa hal yang di abaikan. Namun lebih signifikan catatan lapangan deskriptif juga pasti hadir, dan presentasi ini mencerminkan dan memasukkan sensitivitas, yang berarti, dan memahami penelitian lapangan telah diperoleh dari dekat dengan berpartisipasi. implikasi untuk menulis catatan lapangan kita menarik empat implikasi dari pemahaman kita tentang etnografi sebagai inskripsi pengalaman partisipatif (1) apa yang diamati dan akhirnya diperlakukan sebagai data atau penemuan adalah tidak dapat dipisahkan dari proses

pengamatan, (2) dalam menulis catatan lapangan, peneliti lapangan harus memberikan perhatian khusus terhadap makna adat dan kekhawatiran dari orang-orang mempelajari catatan lapangan, (3) kontemporer tertulis landasan penting dan sumber daya untuk menulis lebih luas, lebih koheren dari kehidupan orang lain dan keprihatinan, (4) catatan lapangan tersebut harus rinci proses sosial dan interaksional yang membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat dan kegiatan.

Yang pertama adalah seorang etnografer ketika dilapangan membuat catatan lapanga tentang bagaimana, dan kapan, berkaitan dengan kapan dan bagaimana kita membuat catatan karena harus difahami seorang etnografer terkadang ada beberapa fakta dilapangan yang ditemui adahal hal yang sangat sensitif, misalkan sebuah rahasia, hal yang memalukan atau bahkan hal yang membahayakan.

Yang kedua adalah partisipasi untuk menulis, perhatian etnografer harus seimbang antara dua orientasi yang berbeda, terutama ketika pertama kali peneliti masuk ke lapangan penelitian, peneliti mengidentifikasi berdasarkan kesan dan reaksi pertama yang dia dapatkan. Dengan partispasi dalam kehidupan sosial yang bagus peneliti menjadi semakin sensitif dan mengalami peningkatan tentang apresiasi dari kesan pertama yang didapatkan. Menulis catatan tidak hanya menulis tentang aktivitas tetapi juga pola pikir, bebrapa hal dibawah ini yang harus diperhatikan ketika menulis catatan, pertama catatan harus detail dari apa yangdirasakan dari observasi atau interaksi. Selanjutnya jauhi membuat statement generalisasi tentang karakteristik maayarakat, catatan harus detail tentang proses dan percakapan yang terjadi, catatan secara umum membantu etnografer mengingat apa yang terjadi di lapangan seperti dialog ataupun proses sosial, serta catatan bisa digunakan oleh peneliti sebagai kesan dan perasaan ketika di lapangan.

c. Pendekatan Transdisiplinary

Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat persoalan Radikalisme dari sisi Gender (ilmu gender), factor-faktor penyebabnya dengan melibatakan ilmu agama, tafsir terhadap ayat-ayat Allah (ilmu tafsir), konsep jihad dalam perspektif ilmu fikih yang difahami pelaku radikalisme (ilmu fikih), pendekatan sosio kultural (ilmu social), pengaruh ekonomi atau ketidakadilan ekonomi misalnya (ilmu ekonomi), sistem tata negara dan hukum yang berlaku (ilmu tata negara dan hukum) dalam pandangan pelaku dan juga ilmu etnografi sehingga

dengan pendekatan ini ditemukan persoalan radikalisme dan juga ditemukan solusinya yang lebih efektif

d. Pemilihan Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini akan terdiri dari banyak perempuan di berbagai tingkatan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. **Pertama**, kaum perempuan di kalangan masyarakat umum, khususnya yang berada di tingkat akar rumput. Masyarakat umum khususnya perempuan memiliki perspektif tentang penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Penyebarluasan paham radikal dan seruan-seruan kebencian yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) wajib dibendung, namun ideologi-ideologi keagamaan transnasional masuk menyeruak dan mendekam di negeri ini dengan bebas dan nyaman dan banyak mempengaruhi perempuan.

Kedua, perempuan di lingkungan sekolah dan kampus (guru, dosen, mahasiswa, murid) yang mendapatkan atau menyebarkan paradigma pendidikan agama yang tidak hanya mengajarkan dogma. Justru bangku sekolah seharusnya mengajarkan apa yang tidak didapat di tempat ibadah. Daripada soal ritual agama, murid lebih perlu mendapatkan ihwal dan sejarah agama-agama di Indonesia. Anak-anak perlu mengerti bagaimana menempatkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah tidak lagi mengukur atau menguji sedalam apa keimanan siswa, karena itu adalah domain ulama, lembaga agama atau tempat ibadah. Sekolah bukan pesantren atau seminari yang memang lebih menekankan soal keimanan dan pengetahuan akan agama. Sedangkan pendidikan sekolah idealnya mengukur bagaimana pengetahuan siswa terhadap semua agama, hubungan antarumat dalam keberagaman, atau peran masing-masing agama yang tidak saling meniadakan melainkan bersama membangun bangsa. Dengan demikian, mata pelajaran agama memungkinkan murid yang berbeda agama bertemu dalam satu ruangan karena materi ajarnya bukan soal dogma melainkan soal bagaimana semua umat beragama membangun bangsa.

Ketiga, ulama-ulama perempuan yang mengalami radikalisasi karena berbagai sebab. Biarlah masing-masing ulama dan lembaga agama atau tempat ibadah yang mengurus peribadahan dan ritual-ritual keagamaan serta bagaimana umat harus tunduk dan taat pada ajaran. Sementara sekolah berkewajiban memupuk kesadaran siswa sejak dini bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dipercayainya

adalah hal privat. Apa yang didapat dari penghayatan dan keimanannya itulah yang mewujudkan kepada perilaku keseharian.

Keempat, perempuan di berbagai organisasi keagamaan yang berperan serta dalam membentuk pemikiran radikal dan sikap yang intoleran terutama organisasi sayap pemuda. Patahkan serangan kepada kaum muda, maka sebuah negara bisa dikuasai. Dialog antariman yang sudah ada sejak lama perlu mengajak serta anak-anak muda. Bila belum memungkinkan, maka hasil dialog harus disampaikan, dengan gaya bahasa yang sesuai, kepada anak-anak muda lintas agama. Virus intoleran dan antikeberagaman yang diembuskan dan disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal yang tidak menghargai pluralitas harus dibendung agar generasi muda bangsa Indonesia tidak terpecah belah.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Patton (1990) berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif. Karena itu, maka prosedur analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada sejumlah teori (Creswell, 1994; Patton, 1990; Bogdan & Taylor, 1984) dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Analisis data kualitatif menurut (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif menurut (Seiddel, 1998), proses perjalanan sebagai berikut: (1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, (2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikstisar, dan membuat indeksinya. (3) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Selajutnya menurut Janice Mcdrury (Collaborative Group Analysis of Data, 1999), menjelaskan tahapan analisis data kualitatif

adalah sebagai berikut: (1) membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data; (2) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data. (3) Menuliskan ‘model’ yang ditemukan; (4)Koding yang telah dilakukan

Analisis data, menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Dari definisi-definisi tersebut dapatlah kita pahami bahwa ada yang menggunakan proses, ada pula komponen-komponen yang perlu ada dalam sesuatu analisis data. Sehingga dapat dipahami bahwa urgensi sebuah analisis data yakni terjadinya sebuah proses yang menitikberatkan pada komponen-komponen yang ada. Sehingga di dapat sebuah temuan yang dapat dimaknai sebagai tujuan dari penelitian.

f. Teknik Interpretasi Data

Teknik interpretasi data menurut Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen (2007), antara lain: (1) Mengulas hasil analisis data. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan misalnya apa asumsi dasar interaksi simbolik?, bagaimana temuan data dikorelasikan dengan premis yang telah dirumuskan? apakah cara berfikir peneliti merefleksikan ide-ide tersebut? Atau peneliti mencoba menggunakan kerangka teoretik yang lain? Kerangka apa yang digunakan? (2)Membaca hasil penelitian serupa. Mempelajari bagaimana peneliti lain menggagas konsep, ide dan teorinya, membingkai data-data mereka, apakah perbedaan dan persamaan data yang dihipunkan, apa yang terlewat dari temuan penelitian maupun analisis data? (3) Berusaha evaluatif terhadap subjek dan situasi penelitian. (4)Mengajukan beberapa pertanyaan dasar, seperti: apa implikasi temuan penelitian bagi kehidupan sehari-hari peneliti? Bagi orang lain? (5) Berspekulasi terhadap asumsi yang dimiliki oleh subjek, berstrategi bagaimana menginterpretasi temuan. (6) Kemukakan cerita yang mungkin ada untuk menghasilkan pemahaman yang maksimal atas penelitian yang dilakukan. (7) Buatlah laporan penelitian sejelas mungkin.

Barney G. Glaser dan Anselm L. Strauss (1990), dalam Constant Comparative Method, menyatakan bahwa penyusunan teori yang berasal dari data dapat dilakukan melalui analisis komparatif seperti yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss, meskipun pada awalnya metode ini dikenalkan oleh Weber, Durkheim dan Mannheim. Terdapat empat tahap dalam metode komparatif konstan, yakni: (1) membandingkan kejadian yang aplikatif terhadap setiap kategori, (2) mengintegrasikan kategori beserta kawasannya, (3) memutuskan batasan teori, dan (4) menulis teori.

Ada beberapa saran yang dapat dilakukan jika menggunakan metode ini untuk menganalisis data penelitian. (1) Mengkaji seluruh data yang terhimpun dengan melihat sumber data yakni wawancara, pengamatan dan dokumen; (2) Menelaah semua indikator dari kategori-kategori yang sedang diamati dalam dokumen dan memberinya kode; (3) Membandingkan kode-kode yang sejenis untuk melihat persamaan dan perbedaan yang muncul antar data yang berkode sama; (4) Kesamaan yang muncul antar kode merupakan bentuk keteraturan yang nantinya dapat diklasifikasikan ke dalam sebuah kategori; (5) Perbedaan yang ada merupakan indikasi bahwa data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda; (6) Proses pengkategorian data selesai bila semua data sudah diberi kode dan semua kode sudah dikelompokkan ke dalam kategori; (7) Proses analisis data berakhir bila telah ditentukan kategori-kategori tertentu yang merupakan kategori penting (esensial) sedangkan kategori yang lain sebagai kategori penunjang dan menyimpulkan hubungan dari semua kategori yang ada.

H. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh para Ilmuan, tokoh dan lainnya seperti

1. AL-Chaidar : Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia, 2016 Penelitian itu fokus pada seberapa banyak (presentasi) masyarakat yang cenderung menyetujui sikap radikalisme.
2. Majelis Ulama SUMUT (1998) : Toleransi Umat Beragama (focus pada bahasan dan contoh kasus-kasus toleransi di kota Medan)
3. Ansari Yamamah: Radikalisme di Kalangan Mahasiswa UIN SU (semi penelitian) 2016 fokus pada bahasan mahasiswa

4. Lembaga Penelitian UIN Jakarta : Gerakan-Gerakan Islam Konservatif dan Garis Keras, 2010 (bahasannya focus pada macam-macam aliran keras, pendirinya dan aspek gerakannya)
5. Hasani Ahmad 2017 : Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam (focus bahasan pada gerakan radikalisme agama yg berpotensi melahirkan terorisme, teks teks keagamaan)
6. M. Zuhdi 2017 : Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Alquran
7. J. Abdillah : Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan (Tafsir)
8. AM Ya'kub : Radikalisme dan Metode memahami Teks Agama
9. Zuhairi Misrawi 2010: Alquran kitab Toleransi : Inklusivisme
10. Darmawati ; Respon siswa MAN terhadap Radikalisme Agama di Makassar (sisi kognitif, afektif dan afektif) (Jurnal Sulesana, Fak.Ushuluddin UIN Alauddin Makassar)
11. Amir Mahmud 2016 : Persepsi Ulama terhadap Radikalisme Agama (Studi Ulama kota Palangkaraya) Fokus pada pemahaman ulama Palangkaraya
12. Galih Puji Mulyono : Radikalisme Agama di Indonesia (Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan) (awal muncul dan factor-factor penyebab radikalisme) dan lain-lain

Adapun Radikalisme di kota Medan dan Padang terutama melihat sisi gendernya (perempuannya), maka tentu belum ada yang membahasanya. Maka di sinilah letak signifikansi penelitian ini.

:

BAB II RADIKALISME DAN INTOLERANSI DI INDONESIA

A. Pengertian Radikalisme dan Intoleransi

Radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar. Maksudnya yakni berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Di dalam *Cambridge Advanced Learners Dictionary*; *Radical is believing or expressing the belief that there should be great or extreme social or political change*.¹ Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim.

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan dan pergantian terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akar-akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. Terkait dengan radikalisme ini, seringkali beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi terror bom tumbuh bersama sistem. Sikap ekstrem ini berkembang biak di tengah-tengah panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan.²

Menurut kamus Bahasa Inggris, kata radikal diartikan sebagai ekstrem atau garis keras. Radikalisme berarti satu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau fundamental reform. Radikalisme memiliki inti sebuah kehendak untuk mengubah dengan kecenderungan menggunakan kekerasan. Ini juga dapat diartikan sebagai paham politik yang menghendaki perubahan yang ekstrim, sesuai dengan penjawantahan ideologi yang dianut.³

Agus SB⁴ mengungkapkan, terkait bentuknya, radikalisme bisa dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pemikiran dan tindakan. Menurut hal pemikiran, radikalisme berfungsi sebagai ide yang bersifat

¹Cambridge University, *Cambridge Advanced Learners Dictionary*, (Singapore: Cambridge University Press, 2008), 1170.

² Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 117.

³Agus, SB, *Deradikalisasi Nusantara Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Jakarta: Daulat Press, 2016), 76

⁴*Ibid*, 155

abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme telah berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan utamanya. Baik dibidang keagamaan, sosial, politik dan ekonomi.⁵

Agus SB mengungkapkan, untuk menjadi seorang radikal, seseorang melewati beberapa tahapan, yaitu: pra-radikalisasi, tahap seseorang menjalani kehidupan sehari-harinya sebelum mengalami radikalisasi; identifikasi diri, fase individu mulai mengidentifikasi diri dengan ideologi radikal; indoktrinasi, ketika seseorang mulai mengintensifikasi dan memfokuskan diri pada apa yang diyakininya; jihadisasi, ketika individu mulai mengambil tindakan berdasar keyakinannya.⁶

Zen menungkapkan bahwa radikalisme secara bahasa berasal dari kata *radic* (akar). Ketika radikalisme digabungkan dengan kata Islam, maka pendefinisianya secara akademik harus hati-hati dan mengacu pada sejumlah rujukan ilmiah.⁷ Misalnya, radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Pada skala global, label radikalisme bagi gerakan Islam yang menentang Barat dan sekutusekutunya dengan sengaja dijadikan komoditi politik. Istilah radikalisme sendiri sampai saat ini belum ada kesimpulan dan kesepakatan di antara pengamat tentang istilah yang tepat untuk menggambarkan gerakan yang radikal. Terdapat istilah lain yang umum, yaitu fundamentalisme. Guna menunjukkan sikap kalangan muslim yang menolak tatanan sosial yang ada dan berusaha menerapkan suatu model tatanan tersendiri yang berbasiskan nilai-nilai keagamaan.⁸

Sementara Sartono Kartodirdjo mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki

⁵*Ibid*, 155

⁶*Ibid*, 156

⁷Fathurin, Zen, *Radikalisme Retoris*. (Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012),

⁸*Ibid*, 3

hak-hak istimewa dan yang berkuasa.⁹ Radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan.¹⁰ Sedangkan dalam studi Ilmu Sosial, Radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas social atau ideologi yang dianutnya.¹¹ Dengan demikian, radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Mungkin dari definisi-defenisi inilah BNPT membuat/menetapkan ciri radikalisme menjadi 4 hal yaitu:

1. Keinginan melakukan perubahan dengan cepat
2. Menggunakan kekerasan, mengatas namakan agama.
3. Mengkafirkan orang lain, mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS dan
4. Memaknai jihad secara terbatas.

Radikalisme terjadi karena beberapa faktor dan bukanlah sebuah paham yang muncul begitu saja. Beberapa faktor pendorong munculnya gerakan/aksi radikalisme di antaranya:

1. Kapitalisme Global dan Problem Kemiskinan

Sistem kapitalisme yang sampai hari ini berkuasa berhasil menciptakan kesejahteraan dengan kemajuan tingkat produktivitas dan kecanggihan teknologi yang semakin tinggi. Sebagai sistem ekonomi, kapitalisme yang diterapkan dunia Barat dinilai merusak dasar-dasar kebudayaan dan menyingkirkan mereka yang lemah secara ekonomi, di samping mampu berkuasa secara politik di level kebijakan negara. Ketidakberdayaan umat Islam terhadap hegemoni ekonomi kapitalisme barat menyebabkan sebagian umat Islam melakukan resistensi.

⁹Sartono Kartodirdjo, Ratu Adil (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 38.

¹⁰A.Rubaidi, Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), 33.

¹¹Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010), 19.

2. Pemahaman Agama

Menurut Dalmeri bahwa perkembangan pemikiran manusia terhadap agama dalam sejarahnya mengalami pasang surut, seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada cara pandang manusia terhadap dunianya, namun juga cara manusia memaknakan dirinya ditengah keterkaitannya dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Kenyataan ini kemudian memposisikan agama dengan segala aspeknya, tidak terlepas dari konteks sejarah kemanusiaan. Permasalahan mendasar dalam pemikiran agama tidak hanya sebatas urusan transendensional manusia dengan Tuhan, namun juga meliputi bagian dari model *world of view* manusia yang berlaku dan ikut mempengaruhi manusia dalam pembentukan sejarahnya.¹²

Oleh karenanya, lemahnya pemahaman agama menjadi salah satu faktor mudahnya masyarakat menerima paham ini. Radikalisme ini merupakan sasaran yang tepat bagi orang-orang yang bertujuan menyelewengkan ajaran agama atau mengajarkan paham-paham keagamaan yang sesat. "Umat yang lemah dari segi pemahaman biasanya mudah tergiur dengan bujukan material untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Selain itu, masyarakat yang memiliki pengetahuan agama yang lemah dari segi pengamalan perlu diberi sentuhan-sentuhan tasawuf atau penjelasan tentang himatut tasyri'. Sentuhan tersebut dapat mendorong untuk memahami esensi dari perintah dan larangan agama secara lebih luas. Dari berbagai hasil penelitian, pengikut tarekat memiliki tingkat kesadaran menjalankan ibadah yang tinggi dan menampilkan kesadaran moral yang tinggi pula. Kondisi itu merupakan suatu bentuk sumbangan yang berharga dalam rangka membangun moral bangsa secara umum.

Komitmen komunitas penganut tarekat seperti ini diharapkan senantiasa menjadi contoh penegakan nilai-nilai moral keagamaan dan penghayatan spiritual sehingga tanggung jawab ulama ke depan semakin berat sebab masyarakat saat ini semakin terbuka terhadap pengaruh dari luar akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peran ulama di lingkungan ponpes juga perlu dipertahankan.

¹²Dalmeri. 2010. *Membayangkan Islam dan Toleransi di Era Postmodernitas: Kritik terhadap Rasionalisme Kaum Muslim Modernis*. Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. IX, Nomor 35 Tahun 2010.

Selain itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Telah menjadi rahasia umum bahwa radikalisme Islam (dan juga dalam agama-agama lain) lebih sering dimotivasi oleh persoalan-persoalan ekonomi ketimbang masalah agama. Peningkatan kesejahteraan bisa diartikan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Untuk mewujudkan semua itu dapat dilakukan, misalnya, dengan memberikan kredit lunak kepada rakyat kecil, reoptimalisasi koperasi, peningkatan industri agraris, dan memberikan pelatihan-pelatihan kerja.

3. Sosial Politik

Gejala kekerasan “agama” lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial-politik daripada gejala keagamaan. Gerakan yang secara salah kaprah oleh Barat disebut sebagai radikalisme itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya dari sudut konteks sosialpolitik dalam kerangka historisitas manusia yang ada di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Azyumardi Azra bahwa memburuknya posisi negara-negara muslim dalam konflik Utara-Selatan menjadi penopong utama munculnya radikalisme.¹³ Secara historis kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosialpolitik.

Dalam hal ini kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Dengan membawa bahasa dan simbol serta sloganslogan agama kaum radikal mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan “mulia” dari politikanya. Tentu saja hal ini tidak selamanya dapat disebut memanipulasi agama karena sebagian perilaku mereka berakar pada interpretasi agama dalam melihat fenomena historis. Karena dilihatnya terjadi banyak penyimpangan dan ketimpangan sosial yang merugikan komunitas muslim maka terjadilah gerakan radikalisme yang ditopang oleh sentimen dan emosi keagamaan.

¹³Azyumardi Azra. *Konflik Baru antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*. (Jakarta: Rajawali Press 2002),

4. Emosi Keagamaan

Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama walalupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad dan mati syahid. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif. Jadi sifatnya nisbi dan subjektif. Umpamanya ada sebagian kelompok atau kalangan yang mempunyai pandangan bahwa apa yang dipahaminya adalah hal yang paling benar. Sedangkan, orang lain yang tak memiliki pandangan yang sama dengannya dinyatakan salah. Seharusnya, meskipun adanya perbedaan yang muncul dapat diselesaikan secara baik-baik melalui komunikasi dan dialog. Bukannya mengedepankan penyelesaian yang melibatkan kekerasan. Kita mestinya menarik teladan dari tokoh-tokoh Islam terdahulu, seperti Mohamad Natsir, yang meski berbeda pandang dengan tokoh lainnya, namun tetap mengedepankan dialog dan tetap saling menghormati di antara mereka. Mereka memberikan contoh yang bijak dalam menghadapi perbedaan yang ada.

5. Faktor Kultural Faktor

Kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, sebagaimana diungkapkan Musa bahwa di dalam masyarakat selalu diketemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Beliau menyatakan bahwa faktor kultural adalah sebagai anti tesa terhadap budaya sekularisme.¹⁴ Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah menunjukkan adanya dominasi barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya muslim. Peradaban barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia. Barat telah dengan sengaja melakukan proses marjinalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan muslim sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Barat, dengan sekularismenya,

¹⁴Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al Qur'an*. (Yogyakarta: LESFI, 1992),

sudah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budaya-budaya bangsa Timur dan Islam, juga dianggap bahaya terbesar dari keberlangsungan moralitas Islam.

Sedangkan pengertian Intoleransi adalah keadaan tidak menunjukkan sikap toleransi (menghargai).¹⁵ Selama ini imej Islam hanya sebagai agama yang tidak bisa mewujudkan kesejahteraan, banyak negara-negara yang mayoritas Islam jauh dari cita-cita kehidupan. Padahal Islam terlahir sebagai agama yang multi-dimensi, ajarannya meliputi seluruh mekanisme hidup. Sehingga wajar Islam juga memiliki ayat-ayat intoleransi, sebagai keunggulan dari agama lain. Islam memiliki alasan yang kuat untuk tidak menghargai (intoleran) agama lain, setelah lebih mengutamakan penjelasan bagi mereka atas kebenaran-kebenaran yang diajarkan dalam Al-Qur'an, jika mereka mengimani wajib kita hargai, namun sebaliknya jika mereka tidak mengimani dan menghargai kita, maka tidak ada pula kata menghargai bagi mereka. Tidak menghargai (intoleransi) dalam ajaran Islam, sangatlah jelas untuk memberikan rambu-rambu agar kita umat Islam jangan terlalu tergesah-gesah terhadap non Islam tanpa melihat sebab-sebabnya. Namun apabila hal itu jelas-jelas mencari jalan untuk memusuhi Islam, sebaiknya tidak perlu kita menghargai mereka dan bekerja sama dalam hal apapun.

B.. Radikalisme dan Intoleransi Agama

Merujuk pada ragam sumber yang membahas mengenai arti kata radikalisme, dapat dikatakan bahwa radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan perubahan dan pembaharuan secara drastis hingga ke titik paling mendasar dari sebuah kerangka berpikir. Lebih jauh, radikalisme bahkan menuntut terjadinya perubahan tersebut dengan cara yang paling ekstrem hingga melibatkan kekerasan baik fisik maupun non-fisik.

Radikalisme juga kerap dikaitkan dengan konsep agama yang kemudian sering disebut radikalisme agama sehingga menjadi persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti, memori kolektif dan penafsiran agama.¹⁶ Secara umum setiap agama memiliki dua

¹⁵Pius Abdillah P, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Surabaya, Arkola, T.Th), 229

¹⁶Zuhdi, M. H. 2017. *Radikalisme Agama Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan*. AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam, 22(1), 199-224

fungsi: pertama, fungsi manifesto, yaitu fungsi yang disadari betul oleh para pengikutnya sebagai manifestasi objektif dari suatu sistem sosial. Kedua, fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak dikehendaki secara sadar dari sistem sosial tersebut dalam memunculkan radikalisme, dan agama merupakan lahan empuk untuk menjadi crying banner dalam melakukan tindakan radikalisme. Radikalisme keagamaan yakni pengimplementasian faham dan nilai ajaran agama dengan cara radikal (keras), fanatik, ekstrim atau mendasar. Inilah persoalan penting yang hemat penulis harus dicarikan jalan keluarnya, sehingga agama sebagai institusi resmi tidak terjebak dalam keberagaman yang simbolik-ideologis.

Istilah Radikalisme sebenarnya bukan merupakan konsep yang asing. Secara umum ada tiga kecenderungan yang menjadi indikasi radikalisme. Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata 'radic', sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar. Ketiga adalah kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan panafian kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti 'kerakyatan' atau kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum radikal.

Peristiwa demi peristiwa yang ditengarai sebagai praktik dari paham radikalisme yang berakar pada rasa fanatisme juga kian mewarnai wajah berita Indonesia. Menurut Haryatmoko¹⁷ dari sisi pelaku, proses menjadi fanatik dan menolak yang berbeda

¹⁷Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas.2014), 113

menyebabkan orang lepas dari tanggung jawab terhadap tindakannya. Segala tindak kekerasan yang dilakukannya bersembunyi dibalik membenaran simbolis, ideologis, atau teologis. Dalam konteks ini seakan pelajaran agama kurang mendapatkan tempat. Namun dijelaskan pula oleh Haryatmoko bahwa masalahnya bukan pada pelajaran agama, melainkan pada bagaimana disampaikan. Banyak kisah tentang pelajaran agama yang dijadikan alat pencuci otak sejak masih kanak-kanak oleh para guru agama, pemuka agama, atau pengkhotbah yang beredar di masyarakat.¹⁸

Pada dasarnya, gejala tindakan yang bermuatan kekerasan dan menjadi pemicu konflik dapat terjadi ketika kecintaan akan sistem nilai tertentu terus ditumbuhkembangkan sehingga bermuatan politis. Dengan memojokkan orang lain atas kepemilikan agamanya atau etnisnya, maka tindakan kebencian sebenarnya sedang berlangsung dalam bentuk penolakan dan perlawanan, terutama aspek ide dan kelembagaan yang dianggap bertentangan dengan keyakinannya. Bentuk penolakan dan buah kebencian inilah yang seringkali menjadi penyebab utama kekerasan massal. Upaya untuk menguatkan sistem nilai dan cara pandang yang merujuk pada tataran ideologi tertentu pada akhirnya akan menguatkan sendi-sendi keyakinan akan kebenaran ideologi tertentu yang lebih unggul daripada yang lain.

Radikalisme kerap dikaitkan dengan terorisme karena terorisme merupakan tindakan yang memiliki keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Dalam perspektif kritis, setiap gerakan yang berlandaskan paham radikalisme pasti terselubung agenda politik kekuasaan tertentu yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjadikan gerakan radikalisme sebagai aksi teror dan meresahkan. Tak jarang pula gerakan radikal ini dijadikan kedok untuk melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan atau sekedar menebar teror di masyarakat.

Peristiwa teror bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia pada bulan Ramadhan tahun 2016 seakan membawa kembali memori tentang berbagai peristiwa berlabel terorisme di tanah air. Indonesia kemudian disebut sebagai ‘sarang terorisme’ tempat para teroris mengatur strategi pengeboman dan mengeksekusinya. Mereka memegang prinsip ‘menghalalkan segala cara’ dimana cara berpikir ini menurut

¹⁸*ibid*, 113-114

Haryatmoko ¹⁹ justru akan menumpulkan nurani dan memperlakukan orang lain sebagai alat kepentingan dirinya dan kelompoknya.

Menyadari bahwa makin meluasnya praktik kekerasan yang ditanggung oleh kepentingan politik tertentu, peran media massa menjadi penting dalam menyajikan peristiwa ke hadapan publik yang majemuk. Tugas media bukan saja soal melaporkan peristiwa yang akurat, namun juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan pentingnya penyelesaian konflik. Selain itu, media massa juga dituntut mampu menyosialisasikan toleransi ketidaksepakatan. Dimana ketidaksepakatan ini menurut Ida & Subiakto ²⁰, dapat dimaknai sebagai buah demokrasi yang indah, bukannya dijadikan landasan untuk berkonfrontasi.

Radikalisme dan terorisme bagaikan dua hal yang saling beriringan, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masalah radikalisme dan terorisme tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya di mana ideologi terorisme itu tumbuh dan berkembang. Menurutnya terorisme merupakan hasil dari proses radikalisasi mulai dari level individu hingga kelompok. Pada kelompok teroris yang mengatasnamakan agama, proses tersebut meliputi praradikalisasi (interaksi antara predisposisi individu dan lingkungan), identifikasi diri, komitmen dan indoktrinasi, dan ideologisasi jihad. ²¹

Teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Ada banyak pengertian tentang terorisme seperti terorisme adalah puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna

¹⁹*Ibid*, 111

²⁰ Ida, R. & Subiakto, H. 2014. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.

²¹[www.antaranews.com].
<https://otomotif.antaranews.com/berita/543184/akademisi-pencegahan-radikalisme-harus-lebih-keras> diakses 1 Februari 2016 pukul 22.30.

terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., terorisme merupakan pandangan yang subjektif.²²

Meningkatnya kekerasan yang terjadi di masyarakat akibat radikalisme dan terorisme maka diperlukan gerakan intoleransi. Toleransi adalah sikap lapang dada ketika melihat adanya perbedaan dalam interaksi dengan orang lain. Misalnya dalam hal suku, ras, bangsa, pemikiran, keyakinan, dan agama. Toleransi tidaklah berarti bahwa kita harus setuju atau sama dengan pemikiran atau keyakinan orang lain, tetapi sikap menerima adanya perbedaan dalam kehidupan manusia dengan berbagai latar belakangnya.²³

Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok (misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah *bukan* termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi.²⁴

Adapun sikap sebaliknya disebut intoleransi, yakni memandang orang yang berbeda dengan kita sebagai musuh yang harus dilenyapkan keberadaannya. Sikap intoleransi ini sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apabila sikap seperti itu dibiarkan sudah pasti akan timbul berbagai kekacauan dan tindak kekerasan dalam masyarakat tersebut. Karena adanya perbedaan itulah maka diperlukan persatuan. Persatuan bukan berarti bahwa kita harus mencampurkan pemikiran, keyakinan, atau agama kita dengan orang lain. Tetapi merupakan usaha untuk menyatukan berbagai

²²Indriyanto Seno Adji. *Terorisme dan HAM" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.).

²³Lihat Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi>. Toleransi adalah membiarkan orang lain berpendapat lain, melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa kita ganggu ataupun intimidasi. istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat menghormati keberadaan agama atau kepercayaan lainnya yang berbeda. Di akses 11 Sept 2018

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Intoleransi_keberagamaan. Diakses 11 Sept 2011

kelebihan yang ada pada setiap orang untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis.

Terkait dengan sikap intoleran itu sangat penting untuk kita soroti karena dampak buruknya yang sangat merusak terhadap masyarakat. Adanya berbagai tindak kekerasan terhadap mereka yang berbeda keyakinan dan agama, yang terjadi di negara kita baik di masa lalu maupun sekarang ini, adalah karena hilangnya rasa dan sikap toleransi itu. Salah satu peristiwa cukup mengejutkan yang baru saja terjadi adalah kerusuhan yang disusul dengan tindakan pembakaran sejumlah vihara dan kelenteng di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 29 Juli malam hingga 30 Juli dini hari. Tindakan intoleran tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang tersulut emosinya karena adanya protes dari seorang warga etnis Tionghoa terhadap suara Toa dari masjid yang menurutnya terlalu keras.²⁵ Ini berarti sudah tidak adalagi sikap toleransi antar umat beragama dan berbagai tindak kekerasan yang berlatarkan SARA.

Selain itu, faktor SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan selama masa reformasi muncul kembali dengan memanfaatkan suasana kebebasan yang disalahgunakan oleh orang atau golongan untuk kepentingannya sendiri-sendiri dan menurut tafsirannya masing-masing. Kebebasan telah dibajak dan dengan memanfaatkan sentimen-sentimen primordial yang berbau SARA, ditambah lagi oleh kenyataan bahwa struktur penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik ternyata berkembang sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya fenomena konflik dan kasus-kasus kekerasan dan ketidakadilan. Sikap dan semangat kedaerahan juga semakin berkembang seiring dengan kebijakan otonomi daerah, sehingga semakin diperlukan kewaspadaan bagi semua pemimpin bangsa untuk memberikan contoh dan teladan mengenai semangat kebangsaan untuk merawat dengan baik kebhinekaan kita sebagai bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

C. Radikalisme dan Ketidak Adilan Sosial

Salah satu sosok perilaku yang merupakan refleksi dari penafsiran yang radikal terhadap ajaran agama adalah perilaku

²⁵Republika. "Kurir Santoso Ditangkap." Jakarta: Republika, August 19, 2016. "Sudahi Konflik SARA." Jakarta: Republika, August 02, 2016.

kekerasan, yang seringkali disebut perilaku terorisme. Namun dari sisi psikologi penafsiran yang radikal itu hanyalah salah satu justifikasi atas perilaku yang tidak adil terhadap ummat Islam. Kekerasan (violence) seperti bom bunuh diri adalah salah satu cara yang dianggap sah oleh pelaku, dengan membuat interpretasi yang radikal terhadap ajaran agama. Pemaksaan ideologi oleh suatu kelompok, misalnya pemaksaan sistem kapitalis liberalis oleh Amerika Serikat pada suatu negara dengan menekan cara ekspresi ideologi suatu faham yang tidak sejalan dengan sistem kapitalis dan liberalis, akan dibalas dengan sebuah tindakan radikal yang berwujud perilaku kekerasan.

Menurut pandangan Adams perasaan adil terwujud bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain dalam interaksi sosialnya memberikan kepada pihak lain (input) dan memperoleh sesuatu dari pihak lain (output) yang setara jika dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh pihak lain (input) dan apa yang diperoleh dari pihak lain (output).²⁶ Ada tiga jenis ketidakadilan terhadap radikalisme dalam agama yang dikemukakan oleh Greenberg, yakni Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Keadilan Interaksional.²⁷ Berdasarkan hasil penelitiannya menguji konsep ini dalam konteks budaya Indonesia (budaya Jawa) dan menemukan bahwa ketiga konsep keadilan tersebut hadir dalam budaya Indonesia.²⁸

Persepsi Ketidakadilan Distributif Pihak Barat menuduh keterbelakangan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial disebabkan oleh ajaran Islam yang menghambat kemajuan.²⁹ Pihak Barat menutup mata bahwa keterbelakangan itu disebabkan oleh tindakan yang dilakukan pihak Barat pada masyarakat Islam melalui penjajahan langsung dengan menduduki wilayah yang berpenduduk muslim dan menguras sumberdaya ekonomi masyarakat Islam.³⁰ Pada era Neo-Liberalisme Pihak Barat tidak lagi secara langsung menduduki

²⁶Adams, J.S. Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (ed.). *Advances in Experimental Social Psychology*. Vol. 2 (New York: Wiley, 1965), 267-269

²⁷Greenberg, J., *The quest for justice on the job*. (London: Sage Publication, 1996)

²⁸Faturochman, *Keadilan, Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),

²⁹Mellon, J.G. (2001) Islam and international politics: Examining Huntington's 'Civilizational Clash' thesis. *Totalitarian Movement and Political Religions*, Vol. 2, No. 1, 73-83.

³⁰Hossein-Zadeh. I. The Muslim world and the West: The roots of conflict. *Arab Studies Quarterly*, Vol. 27, 1-20

wilayah suatu negara, tetapi menjajah ekonomi dan politik dengan membuat berbagai peraturan dan lembaga seperti IMF, World Bank dan WTO yang sangat merugikan negara dunia ke tiga, khususnya negara-negara yang berpenduduk muslim.³¹ Masyarakat Barat melakukan embargo ekonomi dan persenjataan pada negara Islam yang dianggap tidak mau mengikuti keinginan politik dan ekonomi mereka. Pihak Barat mengembargo produk yang tidak bersih lingkungan, tapi USA sebagai negara penghasil polusi terbesar tidak di apaapakan.

Persepsi Ketidakadilan Interaksional dalam perlakuan pada kepentingan Barat dan Kepentingan Dunia Ketiga (khususnya negara berpenduduk muslim) terjadi standar ganda (*double standard*). Pelanggaran yang dilakukan Israel selalu dibela oleh USA dan Inggris. Sementara pelanggaran kecil yang dilakukan negara berpenduduk Islam dikecam dengan keras melalui PBB atau statement politik di media massa. Amerika Serikat & Inggris serta sekutunya mendiamkan saja kegiatan nuklir Israel, tetapi memboikot dan mengancam untuk mengembargo secara ekonomi dan politik negara yang mengembangkan nuklir yang bukan sahabat mereka (Iran dan Korea Utara). Amerika Serikat bahkan mengancam akan menyerang Negara Iran kalau mereka tidak menghentikan pengembangan kemampuan nuklirnya. Perlakuan yang buruk pada rezim Saddam Husein di Irak dipandang oleh banyak masyarakat muslim sebagai sebuah ketidakadilan. Tanpa bukti yang jelas apakah Iraq memiliki senjata pemusnah massal, Amerika Serikat langsung menyerang tanpa mengindahkan suara Negara lain di PBB yang menentang tindakan sepihak Amerika Serikat. Setelah Iraq diduduki dengan makan banyak korban manusia yang tidak berdosa, ternyata Amerika Serikat dan Inggris tidak menemukan sama sekali bukti adanya senjata pemusnah massal.

Reaksi negatif terhadap pengembangan senjata nuklir oleh India (karena India bukan negara berpenduduk mayoritas Islam), tidak sekeras reaksi terhadap pengembangan senjata nuklir Pakistan (yang penduduknya mayoritas Islam). Bahkan Bom Nuklir Pakistan diberi label Bom Nuklir Islam (*Islamic Nuclear Bomb*). Kini Amerika Serikat mengancam akan menyerang negara Iran kalau Iran tidak menghentikan kegiatan pengembangan reaktor nuklir. Sementara Israel

³¹Peet, R. *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO* (New York: Zed Books, 2003).

yang sudah mengembangkan senjata nuklir tidak dipermasalahkan oleh USA.

Statement politik dan pemberitaan pers yang bias dan berpihak pada kepentingan Barat dipersepsikan oleh sebagian ummat Islam sebagai ketidakadilan dalam memperlakukan negara Islam. Segala perlakuan buruk di negara Islam yang dipimpin oleh rezim anti Barat diekspos besar-besaran. Hal sama yang dilakukan di negara yang pro Barat didiamkan saja. Contoh kasus bom bunuh diri oleh pejuang Palestina pada Israel di ekspos besarbesaran dan dikutuk, tetapi pembunuhan yang dilakukan oleh Israel pada penduduk Palestina didiamkan saja oleh pemerintah, dan kurang mendapat ekspose yang setara dengan ekspose terhadap perlakuan negatif Palaestina pada Israel.

Pemberian label yang sangat buruk pada Islam dan Rezim Islam yang berseberangan dengan kepentingan Barat dengan menggunakan istilah: Poros setan, Agama teroris, Agama barbar, Agama kekerasan, Islam agama berdarah-darah. Sementara kegiatan di negara beragama kristen (negara di Amerika Selatan) yang melawan rezim Barat tidak pernah dilabel seperti itu. Menuduh pesantren sebagai sumber pengembangan terorisme di berbagai negara Islam, dan ingin mengganti kurikulum yang lebih akseptabel di mata pihak Barat. Mereka tidak melihat berapa banyak orang-orang keluaran pesantren yang tidak terlibat terorisme dan menjadi tokoh yang menonjol anti kekerasan, dan pendukung setia pihak Barat.

BAB IV

RADIKALISME DAN INTOLERANSI DI KOTA MEDAN

A. Radikalisme dan Intoleransi di Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.

Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga Pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran.

Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Mandailing, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman

Berkumpulnya multi etnis dan berbagai agama menjadikan kota Medan sebagai tolak ukur kerukunan yang tetap terjaga hingga saat ini. Walaupun ada saja berbagai isu-isu yang mencoba

memecahkan kerukunan umat, namun tetap saja Medan menjadi barometer kerukunan yang tetap terpelihara

Pasca gerakan 212 atau aksi bela Ulama kemarin akhirnya mulai membuka peluang-peluang atau celah masuknya sikap intoleransi di Kota Medan, walaupun sesama atau sekeyakinan, mereka menganggap bahwa yang bukan atau turut serta dalam membela umat adalah bagian dari kelompok penista Agama, di tambah lagi perbedaan pandangan Politik atau partai mereka menganggap bahwa partai pendukung penista Agama harus di lawan. (Wawancara penulis).

Di beberapa kelompok pengajian dan organisasi Remaja Masjid isu-isu sikap tentang tidak berpihak kepada kelompok penguasa dan penista agama jangan kita bela atau di dukung terus di gulirkan. Jika ini terus berlanjut penulis menyadari ini akan tumbuh benih-benih kebencian yang akhirnya akan di manfaatkan oleh kelompok yang tidak senang akan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap dibawah batang tubuh UU 45 dan Pancasila, jika nilai-nilai intoleransi ini terus dipupuk akhirnya akan timbul watak Radikalisme, karena Terorisme berakar pada radikalisme. Radikalisme berakar pada intoleransi, baik di dunia nyata maupun media sosial baik membawa isu agama maupun tidak.

Bahwa radikalisme agama adalah bentuk-bentuk interpretasi keagamaan yang mendorong penganutnya, baik secara aktif maupun pasif, mendesak penggantian sistem politik yang berlaku di sebuah Negara. Sementara intoleransi adalah orientasi negatif atau penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang tidak disetujui. Berdasarkan definisi tersebut, karakter radikalisme adalah memiliki spirasi untuk mengganti dasar Negara dan sistem politik yang berlaku serta menolak hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang tidak disetujui. Mencegah masuknya paham radikal dan terorisme di tingkat keluarga merupakan kunci utama membendung penyebaran cepatnya karena "berkembangnya ideologi terorisme di masyarakat luas terjadi karena gerakan, gagasan atau ide radikalisme seringkali terjadi melalui keluarga.

Negara harus makin intensif menanganulangnya hingga ke akarnya, karena ini memang berbahaya, Karena sikap Intoleransi itu merupakan bibit-bibit terorisme dan radikalisme.

Indonesia merupakan negara yang pluralisme, itu diakui dengan adanya keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat, budaya hingga agama. Keanekaragaman ini merupakan suatu anugerah

Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menciptakan tali persaudaraan, saling mengisi dan melengkapi demi kemajuan negeri. Jauh sebelum kemerdekaan, keanekaragaman ini telah dipupuk oleh masyarakat Indonesia, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda yang dikumandangkan oleh para pemuda Indonesia yang berbeda latar belakang. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa adanya keinginan yang kuat untuk membangun negara Indonesia diatas dasar pluralisme, dan perjuangan itu terus berlanjut hingga pada tahun 1945 menghantarkan Indonesia pada kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan, Orde Baru dan hingga sekarang pada zaman reformasi tantangan besar untuk menjaga persatuan bangsa terus saja bergulir. Keanekaragaman yang ada dipandang sebagai potensi untuk memajukan bangsa Indonesia, namun disisi yang lain juga dianggap sebagai ancaman yang serius republik ini karena dengan mudahnya dapat dipecah belah oleh konflik. Perilaku toleransi terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, budaya hingga agama merupakan suatu hal yang mutlak yang harus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga pandangan negatif 2 mengenai dapat dengan mudahnya bangsa dipecah belah oleh konflik tidak terjadi. Memasuki awal abad 21, diberbagai daerah di Indonesia masih terdapat banyak masalah seperti banyak umat beragama khususnya minoritas mengalami kesulitan hidup ditengah kehidupan mayoritas umat agama lain. Tindakan-tindakan intoleransi tersebut dilakukan terus menerus oleh aktoraktor yang tidak bertanggungjawab. Padahal konstitusi negara Indonesia telah secara tegas memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara yang ada di Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, seperti yang tertuang didalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi, “Negara berhak menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam bidang agama, arah kebijakan pembangunan nasional yang dicitacitakan saat ini, menyangkut 4 hal seperti; peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Untuk mewujudkan cita-cita dan arah kebijakan pembangunan nasional itu tentu diperlukan kerja maksimal, seperti sinergi dan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra pemerintah dalam pengelolaan keberagaman umat beragama. Program-program yang dirancang oleh pemerintah khususnya ditingkat lokal/ daerah juga perlu dievaluasi, terutama berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, karena 3 program yang sudah dijalankan belum memberikan hasil

yang baik. Padahal itu merupakan suatu kewajiban pemerintah sebagai perwakilan dari negara untuk menjamin kerukunan di masyarakat yang beragama. Tertangkapnya terduga teroris setahun yang lalu di medan (AA, RA, JH) di tiga wilayah berbeda yakni Kecamatan Medan Denai, Polonia dan Marelán, penulis sempat dialog dengan salah satu terduga teroris yang kini di tahan di mako brimob depok, dari hasil diskusi saya menilai sikap intoleransi lah yang memulai ini semua, bahkan terduga juga pernah menyampaikan bahwa paham syiah di Medan dan orang-orangnya harus di musnahkan di Bumi Allah ini sebegitu bencinya mereka dengan hal-hal yang berbeda sudut pandangan, apalagi berbicara tentang Negara hari ini, yang tak memiliki kepastian hukum bagi umatnya untuk menjalankan Ibadah secara Kaffah ini akan menjadi perlawanan yang nyata bagi mereka ini Jihad dan bagi mereka Mati dalam perjuangan adalah syahid dan jika di buru dan dikejar bagi mereka adala merupakan wisata apalagi tertangkap mereka menganggap sedang berada di Universitasnya Allah. Pelaku yang merupakan mantan ketua salah satu remaja masjid di Medan ini awalnya adalah seorang pelajar yang baik sempat menjadi bandit jalanan sehingga 2004 mendapat hidayah katanya ini, mulai belajar agama, mengaji dan beribadah teratur, sehngga akhirnya berkenalan dengan para Murobbi yan mengajak untuk bertindak radikalisme walaupun proses yang panjang hingga sampai di ambil sumpah setianya (pengakuan terpidana teroris). Tanpa disadari dia mulai terbawa dengan membenci orang-orang yang tidak sepaham dengannya sembari merekut orang yang mau di ajak masuk kepada gerakanya. Ini bagian kecil dari Sikap intoleransi menjadi salah satu pelaku teror di Kota Medan. Islam itu represif. Islam itu intoleran. Islam itu menakutkan. Setidaknya pandangan itulah yang kemudian muncul di benak banyak orang seiring banyaknya media berbasis internet yang menyebarkan pesan kebencian, yang pada akhirnya membangun kesan bahwa Islam adalah agama yang menakutkan dan tidak toleran. Media *online* selama ini memang digunakan sebagai salah satu sumber informasi, pembelajaran, serta alat penyebaran pesan keagamaan. Namun sebagai alat, media bisa digunakan sesuai keinginan pengguna, termasuk untuk menyebar kebencian dan radikalisme atas nama agama. Media penyebar kebencian yang mengklaim diri berbasis Islam inilah yang justru mencoreng citra Islam sebagai agama yang cinta damai dan menjunjung tinggi toleransi

Saat ini kita sedang menghadapi tahun-tahun politik yang dimana gesekannya cukup tinggi. Lihat saja isu ulama yang dzolimi menjadi modal bagi mereka untuk membenturkan sesame elemen bangsa. Bukan hanya para kau pria yang tampl namun kaum hawa juga hadir turut berpartisipasi turun kejalan. Aksi bela Ulama menurut penulis sah dan wajib hukumnya,

namun jika di goreng menjadi sesuatu stimulant untuk melakukan kebencian kepada Pemerintah dan kelompok yang tidak sejalan ini yang cukup berbahaya, lihat saja di Kota Medan kemarin kedatangan Eno Warisman dala kegiatan dakwahnya di jaga dan di pagar betis sepanjang jalan di depan masjid Raya karena ada kegiatan yang sama yakni acara relawan Jokowi, bayangkan saja mata memandannya padahal sesame anak bangsa kenapa terjadi hal seperti ini. Seolah ada dua kelompok yang berbeda jika tidak dijaga dan dikawal akan terjadi tindakan yang tak di inginkan. Penulis terkaang bertanya dalam hati , dimanakah nilai-nilai toleransi yang dulu ada !

Menurut Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Direktur Eksekutif ASB, Veryanto Sitohang Berdasarkan hasil pemantauan dan penanganan kasus intoleransi, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan pada tahun 2011 dan 2012 dengan modus dan target yang hamper sama. “Dalam laporan pemantauan tahun 2011, sepanjang tahun 2011 ditemukan sebanyak 63 kasus intoleransi. Tahun 2012 ditemukan 75 kasus, sedangkan tahun 2013 ditemukan sebanyak 85 kasus intoleransi,” kata Veryanto Ke-85 kasus tersebut terbagi dalam sembilan kategori berita yakni: tindakan/ Pernyataan diskriminatif, tuntutan ormas terhadap pemerintah/penguasa, upaya pemberantasan tempat maksiat, pernyataan negatif terhadap kehidupan beragama, pengrusakan dan pencurian rumah ibadah, permasalahan pendirian rumah ibadah, penistaan dan penyalahgunaan symbol agama, intimidasi berbasis agama dan pelarangan/penghambatan aktivitas keagamaan.

Kasus warga perempuan etnis thiongha di Tanjung balai yang mengeluhkan kerasnya suara adzan disana merupakan sikap intoleransi sehingga memancing emosi umat disana sehingga terjadi perusakan tempat ibadah, namun sekali lagi penulis menegaskan kasus perempuan yang sekarang sudah di jatuhkan hukuman tersebut melakukan tindakan intoleransi namun tidak mengarah ketindakan radikalisme maupun menjadi gerakan terorisme seperti yang kita ceritakan diatas bahwa intoleransi yang kita maksud dalam penelitian ini nantinya adalah bagaimana sikap intoleransi yang mengarah ke Radikalisme dan menjadi Terorisme dengan impian dan cita-cita membantu atau turut serta untuk merubah idiologi suatu Negara sesuai sudut pandang dari gerakan atau pemahaman yang dia anut. Dengan kata lain mengajak, mengarahkan serta melakukan kegiatan yang mengarah kepada tindakan radikalisme dan terorisme untuk mengubah sudut pandang atau suatu idiologi Negara.

Indonesia merupakan negara yang pluralisme, itu diakui dengan adanya keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat, budaya hingga agama. Keanekaragaman ini merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menciptakan tali persaudaraan, saling mengisi dan melengkapi demi kemajuan negeri. Jauh sebelum kemerdekaan, keanekaragaman ini telah dipupuk oleh masyarakat Indonesia, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda yang dikumandangkan oleh para pemuda Indonesia yang berbeda latar belakang. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa adanya keinginan yang kuat untuk membangun negara Indonesia diatas dasar pluralisme, dan perjuangan itu terus berlanjut hingga pada tahun 1945 menghantarkan Indonesia pada kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan, Orde Baru dan hingga sekarang pada zaman reformasi tantangan besar untuk menjaga persatuan bangsa terus saja bergulir. Keanekaragaman yang ada dipandang sebagai potensi untuk memajukan bangsa Indonesia, namun disisi yang lain juga dianggap sebagai ancaman yang serius republik ini karena dengan mudahnya dapat dipecah belah oleh konflik. Perilaku toleransi terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, budaya hingga agama merupakan suatu hal yang mutlak yang harus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga pandangan negatif 2 mengenai dapat dengan mudahnya bangsa dipecah belah oleh konflik tidak terjadi. Memasuki awal abad 21, diberbagai daerah di Indonesia masih terdapat banyak masalah seperti banyak umat beragama khususnya minoritas mengalami kesulitan hidup ditengah kehidupan mayoritas umat agama lain. Tindakan-tindakan intoleransi tersebut dilakukan terus menerus oleh aktoraktor yang tidak bertanggungjawab. Padahal konstitusi negara Indonesia telah secara tegas memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara yang ada di Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, seperti yang tertuang didalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi, “Negara berhak menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam bidang agama, arah kebijakan pembangunan nasional yang dicitacitakan saat ini, menyangkut 4 hal seperti; peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Untuk mewujudkan cita-cita dan arah kebijakan pembangunan nasional itu tentu diperlukan kerja maksimal, seperti sinergi dan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra pemerintah dalam pengelolaan keberagaman umat beragama. Program-program yang dirancang oleh pemerintah

khususnya ditingkat lokal/ daerah juga perlu dievaluasi, terutama berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, karena 3 program yang sudah dijalankan belum memberikan hasil yang baik. Padahal itu merupakan suatu kewajiban pemerintah sebagai perwakilan dari negara untuk menjamin kerukunan di masyarakat yang beragam.

B. Radikalisme dan Intoleransi Menurut Tokoh Harakah, Ulama dan Peneliti di kota Medan

Aksi terorisme di dunia dan di Indonesia dilakukan oleh mereka yang mengaku beragama Islam dan mengklaim bahwa perbuatan mereka merupakan wujud dari jihad fisabilillah, yaitu suatu perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan terhadap umat Islam oleh kekuatan asing (Barat) khususnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di beberapa bagian dunia seperti di Afganistan, Irak, dan Palestina. Sejak peristiwa 11 September 2001 yang menggemparkan dunia, ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian terorisme seakan identik dengan agama Islam. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebagai Negara berpenduduk Islam terbesar di dunia juga dituduh sebagai sarang terorisme. Realita di atas perlu mendapat perhatian dari para pemuka atau tokoh agama Islam agar dapat memberikan penjelasan tentang terorisme dan jihad menurut agama Islam.

Menurut Afrian Efendi Lubis sekretaris Liga Muslim Indonesia bahwa Radikalisme dalam artian saat ini adalah umat Islam, yang memperjuangkan keyakinannya di luar sistem demokrasi artinya bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Sistem Islam, karena menurut nya agama islam itu bukan hanya mempersoalkan tentang Ibadah saja tapi berbicara tentang segalanya termasuk tentang Hukum dan Negara. Sebagai contoh gerakan yang pernah ada untuk mewujudkan cita cita tersebut adalah Hizbur Tahrir, NII/DI TII, JAD dan JAT yang berafiliasi dengan ISIS . Peristiwa demi peristiwa teror selama ini terjadi merupakan suatu perwujudan perlawanan berbagai gerakan untuk menunjukkan bahwa mereka sudah jenuh dengan sistem demokrasi yang tidak berpihak kepada Umat Islam. Banyaknya aksi teror yang mengatas namakan harakah tertentu ini sebagai bukti mereka ingin merubah tatanan bangsa ini jauh lebih baik menuju sistem Negara dibawa panji panji Islam. Sementara itu Intoleransi menurut beliau saat ini adalah Umat Islam yang memperjuangkan keyakinannya dalam sistem demokrasi, ini sangat unik bahwa ada kelompok umat islam yang masih percaya tentang dan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia masih bisa di pertahankan tanpa harus memeranginya walaupun mereka seringkali di stigma sebagai kelompok Intoleransi seperti, FPI, FUI dan lainnya, bahwa mereka memang memiliki sikap intoleransi kepada kelompok tertentu, namun mereka tidak ada niatan untuk melakukan tindakan radikalisme atau teror untuk merubah Negara dan idiologinya, karena gerakan mereka hanya melakukan tekanan kepada pemerintah dengan suara umat dengan aksi aksi tanpa kekerasan dan sekalipun melakukan kekerasan ini bukan termasuk dalam daftar lembaga yang memiliki impian atau cita cita mengganti idiologi Negara, tapi yang pasti saat ini impian teradikal mereka hanya hastag ganti presiden saja.

Menurut Ustadz Zulkarnaen, SS yang juga ketua Bidang Pengkaderan Anggota Majelis Mujahidin Pusat ini mengatakan justru Radikalisme negaralah yang membelenggu hak dan kebebasan warga pemicu intoleransi Karena alasan politik dan kekuasaan Negara menjadikan idiologi sebagai alat mendelegitimasi kebebasan warga dengan memonopoli tafsirnya menurut selera dan kepentingan syahwat kekuasaan.

Setiap warga yang berusaha menjaga keyakinannya dari intervensi idiologi dan keyakinan yang merusak agama mereka, malah dianggap intoleran karena menolak kebebasan orang lain dengan dalih agama.

Beliau mengatakan beberapa contoh upaya-upaya masyarakat yang merupakan reaksi terhadap ketidakadilan dari sikap negara.

1. Masyarakat yang menentang eksisnya LGBT
2. Penolakan berbagai aliran sesat yang menyempal dan merusak ajaran Islam, seperti Syiah, Liberal, dan Inus (Islam Nusantara)

Ketika negara manafikan tugas utamanya sesuai apa yang diamanahkan konstitusi negara yang termaktup dalam UUD 1945, yaitu melindungi hak-hak rakyatnya, maka negara dianggap gagal menjalankan pemerintahan. Era rezim Jokowi adalah masa terberat bagi umat Islam terutama yang tinggal di perkotaan seperti Medan, dalam upaya menjaga kayakinannya karena terus mengalami tekanan dari berbagai sisi. fenomena adanya kelompok orang yang melakukan perilaku sosial menyimpang, yang dianggap melanggar nilai-nilai agama seperti LGBT, yang kemudian ditentang oleh umat Islam bahkan juga menutup aktivitas mereka, bukanlah

merupakan sikap intoleran. Hal itu lebih merupakan sikap reaktif dari sebuah aksi kaum LGBT yang dianggap melakukan tindakan “amoral” dengan dalih kebebasan.

Di luar hukum positif negara, bukankah masyarakat hidup dengan norma dan kesusilaan? Dan bahwa setiap orang yang hidup di tengah masyarakat harus menghormati nilai-nilai dalam masyarakat? Ketika kaum LGBT mempertontonkan perilaku amoralnya di tengah kehidupan umat Islam, berarti kaum LGBT bersikap intoleran pada umat Islam, bukan sebaliknya.

Pembelaan pemerintah atas nama negara pada kaum LGBT, yang disebut sebagai kelompok minoritas yang juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam merefleksikan budaya dan perilakunya, kemudian ditanggapi oleh umat Islam sebagai wujud ketidakadilan pemerintah bagi umat Islam. Mereka menilai, sikap pemerintah yang demikian, menyebabkan kaum LGBT makin berani mempertontonkan perilaku amoralnya. Dan negara terkesan melakukan pembiaran.

Dan anehnya lagi, Umat Islam yang melakukan perlawanan terhadap kaum LGBT ataupun aliran sesat, malah dituduh intoleran karena dianggap menghalangi kebebasan orang lain. Dan kemudian kalau dilakukan upaya menuntut keadilan pada negara atas persoalan tersebut, umat Islam disebut radikal bahkan anti Pancasila. Dari kasus-kasus tersebut terkesan pemerintah memiliki standar ganda dalam menafsirkan Pancasila sebagai ideologi negara, yang cenderung bias dan sering merugikan umat Islam. Seharusnya pemerintah membuat Undang-undang organik tentang dasar negara agar memiliki tafsir tunggal. Dan tidak dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan dan memberengus kebebasan warga negara.

Demikian pula dengan kemunculan kelompok gerakan wanita sebagai respon atas ketidakadilan yang menimpa umat Islam, yang mulai intens melakukan pembinaan kemasyarakatan yang terfokus pada persoalan keumatan harus disikapi dengan positif. Negara harus memberikan keleluasaan semua elemen masyarakat terutama kaum hawa dalam merefleksikan diri. Jangan ada pembelengguan, tekanan apalagi persekusi.

Fenomena gerakan terorisme di Indonesia tidak terlepas dari hadirnya kelompok-kelompok radikal dalam Islam yang merasakan ketidakadilan terhadap umat Islam oleh barat terutama Amerika dan sekutunya baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Dominasi barat terhadap negara-negara Islam dirasakan sebagai upaya untuk melemahkan

kekuatan Islam secara menyeluruh. Secara politis tindakan terorisme pada dasarnya lebih disebabkan oleh ketidakadilan, imperialisme, dan kolonialisme yang telah lama terjadi dan terus bercokol dalam dunia Islam. Oleh karena itu, secara teoritis dapat dikatakan selama ketimpangan-ketimpangan dan pelanggaran HAM masih terjadi reaksi yang berupa terorisme akan tetap bermunculan. Maka, perlu adanya upaya yang bersifat terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan dari berbagai elemen dan bangsa-bangsa di dunia atas dasar persamaan atau kesetaraan (humanisasi).

Menurut Al chaidar pengamat dan peneliti teroris ini, mengatakan Bagi kita semua yang telah mencicipi kebebasan dan prestasi modernitas, kita tak boleh berhenti untuk berempati dan bersimpati terhadap kesusahan dan penderitaan yang dialami sebagian komunitas kaum fundamentalis Islam dan kelompok intolir . Ibarat pecandu narkoba, mereka tidak boleh dianggap sebagai kaum yang melanggar hukum yang harus dikejar-kejar, melainkan harus dipandang sebagai kaum yang membutuhkan perawatan untuk mengobati penyakit ketergantungan dan ketakutan irasional mereka. “Modernisasi”, menurut Karen Armstrong, “seringkali dirasakan tidak sebagai sebuah pembebasan melainkan sebuah serangan agresif”

Kaum radikal Islam yang bangkit dengan garis yang berbeda, bahkan secara diametral berlawanan dengan fundamentalis adalah taksonomi pergerakan Islam yang mesti dilihat secara berhati-hati. Adanya fakta bahwa fundamentalisme telah muncul dalam ledakan-ledakan kecil dan besar di semua budaya (budaya agama monotheis, maupun politheis) mengindikasikan sebuah kekecewaan yang meluas terhadap masyarakat modern di mana banyak di antara kita malah merasakannya sebagai sesuatu yang membebaskan, menyenangkan dan memberdayakan. Pro-yek-proyek yang secara kasat mata dipandang baik oleh kaum liberal, di mana kaum radikal Islam juga termasuk di dalamnya, —seperti demokrasi, penciptaan perdamaian, kepedulian terhadap lingkungan, pembebasan wanita, atau kebebasan berbicara— dapat dipandang buruk, bahkan haram, oleh kaum fundamentalis.

Sekarang banyak masyarakat dalam komunitas dunia Islam yang menolak persepsi bahwa Barat sebagai tak bertuhan, tidak adil, dan dekaden. Kaum Islam radikal baru tidaklah sesederhana kaum fundamentalis yang membenci Barat Bagaimanapun, kaum radikal baru Islam tidak merupakan gerakan yang homogen. Muslim radikal pada pokoknya berupaya meletakkan rumah mereka sendiri dalam suatu tata-aturan yang berbeda sesuai dengan yang mereka

persepsikan. Tidak sebagaimana kaum fundamentalis yang mengidap dislokasi kultural yang parah, kaum radikal juga merasa nyaman dengan zaman modern

Sebenarnya, kaum teroris bukanlah kelompok baru dalam dunia pergerakan radikal dan fundamentalis Indonesia. Kaum teroris adalah gabungan dari inti ajaran fundamentalis dan radikal yang bertemu dalam satu titik perencanaan perang melawan apa yang mereka persepsikan sebagai 'kezaliman'. Di Indonesia, kelompok teroris ini berjumlah kecil: (1) Jamaah Islamiyyah, dan (2) Darul Islam (terbatas pada faksi tertentu).

Namun, jika radikalisme dan fundamentalisme terus-menerus mendapatkan momentum untuk bersatu, maka akan sulit sekali mengatasi terorisme. Terorisme akan tumbuh subur di kalangan di mana antara simbol dan hakikat bertemu. Jama'ah Islamiyyah pada awalnya bukanlah organisasi teroris, ia merupakan organisasi radikal yang mengalami fundamentalisasi di Malaysia setelah bertemu dengan banyak kalangan fundamentalis di luar Indonesia. Sementara Darul Islam yang mempraktekkan terorisme hanyalah sebagian kecil saja. Peristiwa Bom Bali yang menelan ratusan korban jiwa yang tak berdosa pada tanggal 12 Oktober 2002 telah memunculkan kaum fundamentalis Islam (Jama'ah Islamiyah) sebagai "teroris" dalam peta bumi politik dunia saat ini. Kaum yang berusaha melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam secara kaffah (totalitas) dalam kehidupan kesehariannya ini dipandang sebagai kaum yang tidak bisa hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat "modern" yang menerapkan cara-cara hidup Barat. Bagi mereka, Barat (termasuk seluruh kultur dan bahkan orang-orangnya) adalah haram dan najis berada di dunia ini. Pada akhir abad ke-20, fundamentalisme Islam telah muncul sebagai kekuatan yang sangat dahsyat di dunia yang berusaha menyaingi dominasi nilai-nilai sekular modern dan kehadirannya ini dianggap telah mengancam perdamaian dan harmoni jagat bumi ini. Kaum fundamentalis adalah kaum militan yang selalu menerapkan sikap tegas terhadap anasir-anasir yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama ini dan merasa bahwa hanya dengan agama mereka bisa mengembalikan keseimbangan dunia ini ke keadaan semula. Manifestasi perbedaan cara pandang ini dalam panggung politik sering mengejutkan terutama dengan serangan terorismenya yang memakan banyak korban yang tak berdosa.

Muncul sikap intoleransi dari kalangan kaum fundamentalis dan radikalisme inilah memufuk dan memicu berbagai serangan dan teror di berbagai daerah, karena menurut mereka jika tidak mengikuti gerakan/harakah mereka dianggap kafir dan sebagainya karena tidak patuh

kepada perintah Allah yakni harus taat dan patuh terhadap hukum Allah saja. Selalu saja pada setiap masyarakat, di setiap zaman dan tradisi ada orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap modernitas. Ini merupakan sebuah reaksi terhadap kultur ilmiah dan sekular yang berawal dari Barat namun telah berakar di semua tempat di dunia ini. Barat telah mengembangkan “an entirely unprecedented and wholly different type of civilization”, sehingga respon agama terhadap Barat menjadi sangat unik. Gerakan kaum fundamentalis di zaman modern sekarang memiliki hubungan simbiotik dengan modernitas itu sendiri. Mereka mungkin saja menolak rasionalisme ilmiah Barat, namun mereka tidak dapat lari darinya. Peradaban Barat telah mengubah dunia, dan kaum Fundamentalis pun akan berusaha mengembalikannya sejauh yang telah diubah oleh Barat tersebut (Al Chaidar)

Zulkarnaen ketua FKPT Sumatera Utara juga mengatakan bahwa Intoleransi merupakan pintu masuknya paham Radikalisme dan mengarah ke gerakan terorisme, menurut Zulkarnaen cara mencegah pemahaman ini adalah dengan melakukan pembinaan dan penanganan yang soft (lembut) kepada terduga teroris sehingga anak dan istri dan keluarga terduga teroris tidak dendam dan memunculkan sikap intolerannya kepada Negara ini sehingga dia akan menjadi calon bomber baru pengganti ayah atau suaminya dalam kata lain balas dendam, berbeda di Negara Malaysia cara penanganan terpidana teroris dan keluarga benar benar diperhatikan, setiap penyeragaman tersangka teroris pemerintah Malaysia tidak memblow Up beritanya, namun di Indonesia kebalikannya sehingga keluarga terpidana teroris merasa kecil hati dan malu akhirnya timbul rasa balas dendam bukan empati. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Intoleransi itu mengandung arti orientasi negatif atau penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang tidak disetujui, sedangkan kan radikalisme agama adalah bentukbentuk interpretasi keagamaan yang mendorong penganutnya, baik secara aktif maupu pasif, mendesak pengantian sistem politik yang berlaku di sebuah Negara. Walaupun kita paham bahwa Radikal itu perlu dan penting karena jika tidak radikal maka tidak ada bangsa Indonesia ini lahir menjadi sebuah Negara, karena para pejuang kita memiliki jiwa jiwa radikal lah sehingga Indonesia mereka, yang tidak boleh itu adalah paham radikalisme yakni adanya paham atau gerakan yang mencoba merubah idiologi Negara yang Sah ini merupakan kegiatan terlarang dan akan dikenakan dalam kategori UU no. 15 tahun 2018 tentang terorisme.

Teka-teki yang muncul atas motif apakah yang mendasari makin maraknya kaum profesional yang berkecukupan tergiur untuk menjadi tentara Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) atau yang lebih dikenal dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Hingga saat ini sudah sekitar 518 warga negara Indonesia diduga bergabung dengan ISIS. Menurut catatan Sidney Jones dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), sudah lebih dari 800 warga negara Indonesia yang sudah berangkat dan bergabung dengan gerakan “teroris” tersebut di Suriah. The Intercept (8 Juli 2015) mengungkapkan dua pilot Indonesia (Ridwan Agustin alias Ridwan Ahmad al-Indunesiy dan kapten Tommy Hendratno alias Tommy Abu Al Fatih Hendratno) yang pernah menjadi aparat keamanan negara dan kemudian menjadi pilot sebuah maskapai multinasional, kini bergabung dengan ISIS. Banyak yang kemudian khawatir atas pilihan hidup yang dijalani dua profesional di usianya yang masih sangat produktif ini. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan tentang motif keduanya ikut bergabung menjadi tentara ISIS, membela sesuatu yang mungkin dianggap sangat ideal di suatu tempat nun jauh di sana di luar tanah Indonesia. Bahkan kalangan politisi di dunia Barat cemas dengan rekam jejak mereka yang sebelumnya pernah bergabung dengan kesatuan keamanan negara yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya, seorang anggota polisi aktif di Jambi, Syahputra (alias Abu Azzayn al Indunesiy) meninggalkan anak istrinya dan berangkat melalui Medan ke Suriah untuk berjihad melawan apa yang mereka persepsikan sebagai “thoghut” (musuh) yaitu rezim Bashir Al Asad. Statusnya sebagai anggota kepolisian negara ini dengan gaji yang berkecukupan tentu mengundang tanda-tanya besar: ada apa di balik semua ini? Tindakannya meninggalkan anak istri untuk berjihad ke sana, menceburkan diri ke dalam kancah perang, tentulah bukan sebuah keputusan rasional biasa. Ada sesuatu yang tak teridentifikasi dari realitas sosial yang problematik ini. Semua kekhawatiran dan kecemasan berbagai kalangan ini sangat rasional. Kaum profesional dengan basis status sosial ekonomi kelas menengah dan dengan latar-belakang keluarga yang relatif sakinah ini tentunya mengharapkan jawaban nyata atas tanya yang membingungkan. Tindakan Syahputra menceraikan istrinya dan pergi ke tanah asing berperang tentunya tidak bisa dijelaskan dari perspektif psikososial generik. Pasti ada alasan-alasan teologis atau bahkan eskatologis dari tindakan yang tidak biasa ini.

Menurut Ustadz Daud Sagita Putera Keluarnya Fatwa MUI Nomor 56/2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non muslim pada 14 Desember 2016, misalnya, berimbas pada terjadinya kasus intoleransi di daerah, Fatwa tertanggal 14 Desember 2016 itu berisi tentang hukum menggunakan atribut non-Muslim bagi umat Islam. Ada enam rekomendasi fatwa itu. Salah satunya menyebut: "Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim. Menggunakan atribut keagamaan nonmuslim adalah haram. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan nonmuslim adalah haram, karena ini sangat bertentangan dengan ajaran Umat Islam.

Menurut dia, fatwa MUI itu dikeluarkan atas dasar adanya keluhan umat Islam yang diminta untuk mengenakan atribut bernuansa natal. Fatwa tersebut ditujukan bagi perusahaan maupun mal yang mewajibkan karyawannya mengenakan atribut natal. Ini kita serukan kepada pimpinan perusahaan, mal-mal, supaya jangan memaksa masyarakat menggunakan atribut-atribut itu. Dan juga kita minta petugas keamanan untuk mengamankan itu. Sehingga tidak terjadi kegaduhan

Jadi jangan umat islam saja yang di anggap intoleran selama ini, justru seharusnya seluruh umat beragama harus menghargai kepercayaan dan ibadah tiap tiap penganut dalam menjalankan ibadahnya, hal-hal seperti ini justru memicu tindakan-tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai umat beragama, apalagi saat ini kepekaan terhadap nilai nilai kepedulian umat saat ini terhadap tindakan-tindakan yang menyinggung perasaan akan memicu emosi yang tinggi, lihat kasus satpan di salah satu Bank di Medan 2017 yang melarang karyawannya untuk tidak sholat jumat misalnya ini memancing kemarahan umat saat itu, ketika forum Umat Islam dan Somasi Umat pimpinan Indra Buana Tanjung melakukan aksi dianggap menjadi gerakan yang akan memecah belah bangsa di Sumatera Utara, padahal menurut Indra Buana Tanjung justru merekalah yang memulai melakukan sikap intoleransi Kasus Tanjung Balai dan juga Kasus Sukmawati misalnya melahirkan gerakan aksi besar-besaran di Indonesia begitu juga di Kota Medan menurut Indra Buana Tanjung Selaku Kordinator Aksi Bela Umat (somasi) hampir 5000 orang lebih hadir dan tumpah di jalan meminta para penista agama itu di adili (Adili sukrawati) jika tidak di adili akan terjadi jihad besar katanya pada saat orasinya, begitu juga kasus Tanjung Balai dalam hal ini penghentian Suara adzan yang di anggap bising oleh seorang warga thiongha ini harus di adili jika tidak ada geraka-gerakan yang akan mengancam stabilitas di Sumatera Utara jika terlambat dalam penanganannya, untuk saja pihak keamanan cepat bertindak. Menurut Indra Buana Tanjung intoleransi yang dilakukan pihak-

pihak tertentu yang mendesdritikan Islam lah yang melahirkan bibit bibit radikalisme tersebut karena kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak hadir dalam menjaga hati umat. Sehingga akan lahir kelompo-kelompok yang kecewa akan sistem Negara yang ada, dan mereka akan membentuk gerakan-gerakan yang dimana gerakan itu ingin merubah sistem yang ada menjadi sistem yang jauh lebih baik menurut mereka, ini yang di kawatirkan situasi umat yang sedang kalap akan di dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama tertentu untuk melakukan gerakan Radikalisme sampai terror-teror terhadap pemerintah. Karena doktrin – doktrin yang di tanamkan tentang kebencian terhadap Negara yang tidak peduli tentang keberpihakannya kepada kemauan umat. Intinya pemerintah haru hadir dan bersikap adil terhadap seluruh lapisan elemen dan agama yang ada dan dia akui di republic Indonesia ini, sehingga tetap terjalin komunikasi yang baik tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki cita-cita untuk mendirikan Negara yang ingin merubah Idiologi yang telah ada.

C. Radikalisme dan Intoleransi di Kalangan Perempuan di Kota Medan

Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan, konflik intoleransi agama menimbulkan dampak berkepanjangan bagi perempuan. Sebab, korban perempuan memiliki kerentanan khusus dibandingkan korban laki-laki. "Meskipun korban laki-laki juga mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang sama, namun perempuan berhadapan dengan kerentanan khusus akibat peran gender yang dimainkannya baik dalam perannya sebagai perempuan, istri, ibu dan sebagai anggota masyarakat beberapa kekerasan yang dialami perempuan karena konflik berbasis keyakinan. Pertama, perempuan mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Ini antara lain pemaksaan perceraian, kawin gantung karena beda keyakinan, ancaman perkosaan, stigma, dan pelabelan sebagai perempuan tidak baik saat antar anak ke sekolah. Kedua, perempuan kehilangan rasa aman, ketakutan gagal melindungi anak-anak. Mereka pun khawatir akan pendidikan serta masa depan anak-anak. Ketiga, terkoyaknya relasi sosial baik dalam konteks keluarga maupun tetangga sebagai ruang sosial perempuan. Kemudian, perempuan mengalami gangguan kesehatan utamanya kesehatan reproduksi. Perempuan pun mengalami kesulitan mengakses bantuan Pemerintah dan Hak-hak Adminduk seperti KTP, akte nikah, akte lahir, dan sebagainya. Mereka juga kehilangan mata pencaharian dan tercerabutnya sumber-sumber penghidupan, termasuk pemindahan tempat kerja ke wilayah yang jauh dan sulit mendapatkan mata pencaharian dan akhirnya timbul kekecewaan besar sehingga lahir sikap intoleran terhadap apapun baik antar sesama umat maupun pemerintah itu sendiri, kekecewaan

demis kekecewaan inilah akhirnya dimanfaatkan oleh beberapa kelompok sebagai pintu masuk mereka hingga bertindak dari Intoleran hingga menjadi Radikal

Dunia tersentak ketika seorang perempuan bernama Dian Yulia Novi tertangkap ketika hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Indonesia. Dia pernah jadi buruh migran di Singapura dan ternyata juga isteri Bahrudin Naim, pelaku bom Sarinah. Rencananya, tanggal 11 Desember 2016 dia akan meledakkan Istana Negara dengan bom rice cooker, lalu tertangkap polisi. Tragedi ini menyibak fakta keterlibatan sejumlah perempuan Muslim dalam gerakan terorisme di Indonesia.

Agaknya trend baru dalam aksi terorisme menjadikan perempuan sebagai pelaku. Kalau sebelumnya aksi-aksi teror berwajah maskulin dan menggunakan pendekatan patriarkal, belakangan aksi-aksi teror memanfaatkan perempuan sebagai pelaku dan dengan pendekatan feminin. Meskipun faktanya perempuan adalah pelaku, hakikinya mereka adalah korban. Korban dari kondisi ketidaktahuan mereka lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki rencana yang sistematis untuk aksi terorisme. Sejumlah faktor ditengarai sebagai penyebab mengapa perempuan terlibat terorisme. Di antaranya, faktor pergaulan dan pertemanan, perasaan teralienasi dan terpinggirkan, perasaan frustrasi dan dendam, namun faktor ideologi radikal menjadi kata kunci ketika mereka sudah berada dalam kelompok teroris. Sejumlah penelitian mengungkapkan, para perempuan yang direkrut dalam jaringan tersebut didoktrin setiap saat dengan pandangan keislaman yang radikal. Mereka dijejali dengan narasi-narasi Islam tertindas, tentang romantisme kejayaan Islam masa khilafah. Tentang wajibnya mendirikan negara khilafah yang akan membebaskan mereka dari ketidakadilan dan kemiskinan. Mereka juga didoktrin dengan kisah-kisah figur perempuan pemberani dalam sejarah Islam. Wajibnya menegakkan syariat Islam dan pentingnya menghapus demokrasi dan negara Pancasila yang mereka juluki sebagai *thagut* (musuh Islam).

Mengapa perempuan? Seperti dibahas dalam isu feminisme, perempuan adalah kelompok yang paling diandalkan dalam soal kesetiaan dan kepatuhan. Kelompok yang paling mudah percaya pada semua hal terkait agama. Perempuan sangat bersahabat dengan agama meski agama seringkali tidak ramah terhadap mereka. Dan yang paling meyakinkan adalah perempuan mampu menjadi benteng pertama yang melindungi keluarga jika terjadi hal-hal tak

diinginkan. Para perempuan yang terlibat dalam gerakan radikalisme Islam Indonesia terdiri dari para istri dan keluarga teroris yang terlibat dalam aksi-aksi pengeboman di Indonesia, isteri dan keluarga para jihadis di Suriah, Lebanon dan Turki. Umumnya suami atau keluarga mereka adalah anggota Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Tauhid, Negara Islam Indonesia, ISIS, Salafi Jihadis dan organisasi Islam radikal lain. sel-sel jihad di Medan sudah lama beraksi dan masih aktif, mulai dari Komando Jihad 1976, pembajakan Garuda Woyla 1981, peledakan gereja di tahun 2000, perampokan Lippo Bank di 2003, perampokan Bank Sumut pada 2009, perampokan Bank CIMB Niaga dan penyerangan Polsek Hamparan Perak pada 2010

Menarik disebutkan, umumnya mereka bukanlah perempuan bodoh dan tidak terdidik. Kebanyakan mereka lulusan perguruan tinggi, selebihnya lulusan pesantren dan sekolah menengah atas. Lalu dari aspek ekonomi, mereka tidak selalu dari kelompok miskin. Umumnya mereka dari kalangan menengah. Profesi mereka pun beragam: dosen, guru, muballighah, ustazah, dokter gigi, pengusaha, karyawan, aktivis organisasi, pedagang (kebab, herbal, busana dan sebagainya), pelayan toko, dan pekerja pabrik. Motivasi utama perempuan terlibat dalam gerakan ini adalah bersifat teologis. Mereka mulanya terpapar pemahaman keislaman yang radikal, misalnya memercayai wajib hukumnya membunuh orang-orang kafir, (non-Muslim). Mereka meyakini wajib menegakkan negara Islam dengan melakukan jihad menumpas ketidakadilan. Perempuan harus ikut berjihad membela Islam dan Muslim yang tertindas.

Rangkaian aksi teror belakangan ini banyak disoroti elemen masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah para pelaku merupakan satu keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak yang dilibatkan. Dalam aksi bom bunuh diri di Surabaya, Minggu (13/5/2018), pelaku bukan hanya Dita Oepriarto. Istri Dita, Puji Kuswati, turut menjadi pelaku bom bunuh diri, bahkan mengikut sertakan anak-anaknya. Kemudian, keterlibatan perempuan juga terjadi pada ledakan di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo. Aksi tersebut dilakukan oleh Anton, beserta istri dan anaknya. Tidak hanya itu, ada pula aksi bom bunuh diri yang dilakukan di Mapolrestabes Surabaya pada Senin (14/5/2018) pagi. Tri Murtiono, pelaku bom tersebut, mengajak serta istri dan anak-anaknya. Sebelumnya, pada Sabtu (12/5/2018) lalu, aparat kepolisian mengamankan dua perempuan yang diduga akan melakukan penusukan terhadap anggota Brimob. Kedua perempuan berinisial DSM dan SNA diamankan bersama barang bukti berupa KTP, gunting, dan ponsel (<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/16/07495471/ketika-peran-perempuan-kian-nyata-dalam-aksi-radikal>.)

Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia, banyaknya Populasi Perempuan di Kota Medan menjadi lahan empuk bagi para mentor mentor yang sedang mencari kader – kader barunya, semakin ketat dan sempitnya pelaku teror kaum laki-laki menjadi hal baru untuk merekrut kaum perempuan. Perlu diketahui meski bukan hal baru lagi bahwa kaum perempuan sebenarnya memiliki potensi dan kesetiaan yang sangat tinggi terhadap kelompoknya, terbukti ketika tertangkapnya terduga teroris di Medan 2017 kemarin, mereka para istri melindungi dan menjaga para suami mereka, sebutkan Rina nama samaran ini mengatakan dia mengetahui bahwa suaminya aktif dalam gerakan yang dianggap radikal ini semenjak tahun 2006, bayangkan saja jika tidak terkontaminasi dengan paham yang dibawa suami bisa saja dari awal dia akan membebaskan apa saja gerakan gerakan yang dilakukan suaminya tersebut. Bahkan beliau malah menjadi mentor bagi para kaum ibu-ibu untuk mau bergabung dan menjadi bagian dari gerakan tersebut, lain hal nya dengan Anisa nama samaran juga mengaku dia mengenal dan bergabung dalam kelompok ini semenjak kuliah di semester 3 dan menikah dengan suaminya yang memang satu firqoh/kelompok dengannya, keinginan dan satu visi misi bersama inilah kami disatukan, walaupun di kelompok kami tidak ada tujuan untuk melakukan kekerasan, namun cita-cita untuk mendirikan Negara Karunia Allah merupakan impian yang cukup lama, karena kami jenuh dengan Negara yang tidak ber hukum dengan Islam ini. Anisa sendiri mengaku sudah banyak yang di rekrutnya untuk bergabung di kelompoknya dengan membentuk kajian-kajian dan doktrin hidup di alam jihad sehingga sampai Bai'at (sumpah setia), adapun sasaran atau ladang dakwah nya adalah para Pelajar Islam dan Mahasiswa yang sedang proses mencari jati diri, setelah berhasil di rekrut mereka akan melakukan perjanjian Aqobah 1 bagi pemula dan dilanjutkan dengan Aqobah 2 bagi mereka yang memang sudah siap bahwa hidup dan matinya hanya diserahkan bagi kelompok dan ajaran yang ditanamkan padanya, dengan proses ujian yang panjang tentunya, setidaknya diadakan kegiatan penyegaran fisik dengan sampel kegiatan olahraga atau tadabur alam.

Pertanyaan besar hari ini adalah pergi kemanakah para Akhawwat Hizbrur Tahri Indonesia Sumatera Utara, yang kita ketahui bahwa organisasi ini dianggap terlarang ? diamkah mereka? Tentu saja tidak mereka akan tetap ada walaupun secara fisik mereka tidak ada lagi di permukaan, namun ajaran dan ideologinya tetap berjalan meski raga mereka mati namun sesungguhnya ideology mendirikan khilafah tidak akan pernah hilang dalam ingatan mereka, ketika penulis bertanya kepada salah satu ukhti Hti. Mereka akan masuk kekelompokan

pengajian-pengajian tertentu dengan doktrin yang tetap sama namun dengan pola gerak yang berbeda tentunya. Ini akan menjadi gelinding bola salju yang semakin lama akan semakin besar nantinya apalagi jumlah mereka di Medan yang cukup signifikan tentunya. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang tidak berpihak terhadap hukum Allah menjadi modal mereka untuk tetap berjuang dan terus bertahan.

Keterlibatan perempuan dalam gerakan radikalisme menjadikan perempuan sebagai pelaku aksi-aksi teroris sekaligus juga sebagai korban. Mereka adalah korban ideologi suami atau keluarga, korban indoktrinasi agama, korban stigmatisasi dari masyarakat, korban media, dan juga korban dari akses konflik. Perempuan lagi-lagi hanyalah korban dari kondisi yang diciptakan oleh kekuasaan patriarki. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasinya harus dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan dan memberi tempat kepada mereka dalam pergaulan sosial arus-utama. Kampanye yang terus-menerus memojokkan mereka tanpa mempertimbangkan sentuhan kemanusiaan hanya akan membuat mereka mati suri. Di balik itu, mereka tetap beroperasi di bawah tanah untuk menata ulang sel-sel rahasia mereka yang suatu saat mengobarkan kembali api dan semangat jihad yang seringkali berujung dengan ledakan terorisme.

Perempuan bisa menjadi *agent of disengagement*. Kalau mereka bisa direkrut menjadi teroris seharusnya lebih mudah mengajak mereka menjadi agen perdamaian. Diperlukan strategi yang komprehensif dan pendekatan yang lembut dan manusiawi, namun mengena kepada mereka yang terlibat gerakan terorisme. Pendekatan yang semata bertumpu pada kekuatan militeristik dengan prinsip keamanan harus ditinjau ulang. Hal paling penting adalah keinginan politik yang kuat dari pemerintah untuk mengikis akar-akar penyebab terorisme, seperti kesenjangan dan ketidakadilan sosial yang sudah sedemikian akut di masyarakat. Selain itu, sangat penting bagi semua elemen dalam Islam mengusung ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai humanis, keadilan, kesetaraan, toleransi dan perdamaian. Esensi Islam adalah memanusiakan manusia dan membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Islam seharusnya menjadi rahmat bagi semua makhluk di alam semesta.

BAB IV

PERKEMBANGAN RADIKALISME DI PADANG

A. Sejarah Munculnya Radikalisme dan Intoleransi di Kota Padang

1. Perang Padri

Menurut Saifullah dan Sufriyono, radikalisme dan intoleransi di Padang bemula dari Padri. Perang Padri terjadi di Sumatra Barat di kerajaan Pagaruyung sejak tahun 1803 sampai 1838 M. Perang ini dilatar belakangi oleh masalah agama, walaupun pada akhirnya berubah menjadi perang melawan penjajah Belanda. Kata Padri terambil dari kata Pidari atau Padre, artinya ulama yang selalu berpakaian putih. Oleh karena itu kelompok gerakan padri selalu memakai jubah putih, berbeda dengan kaum adat suka dengan pakaian hitam. Sebagian berpendapat disebut Padri karena pemimpin Padri ini adalah orang Padari itu sendiri. Orang-orang dari Pedir kemudian berangkat haji ke Mekah lewat pelabuhan Aceh yaitu Pedir.

Tujuan dari Padri ini sebenarnya ingin memperbaiki keadaan masyarakat Minangkabau, mengajak mereka agar beramal sesuai ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini diterima dengan senang hati oleh para ulama, walaupun menghadapi tantangan dari kaum adat.

Oleh karena kedua golongan ini berseberangan, di mana golongan adat tetap teguh mempertahankan adat di daerah mereka dan Padri ingin mengendalikan kaum adat pada ajaran Islam murni secara paksa maka terjadilah konflik bersaudara antar orang minang. Namun kaum Adat kalah dan akhirnya mereka minta bantuan Belanda sehingga menyebabkan konflik semakin berkembang dan membara Belanda.

Perang antara Padri berhadapan dengan kaum Adat berlansung antar tahun 1803 sampai tahun 1821. Hal ini terjadi diawali kedatangan 3 orang yang pulang dari Makkah menunaikan haji. Mereka adalah H. Miskin asal pantai Sikat, H. Sumanik, Delapan Kota, dan H. Piabang dari daerah Tanah Datar. Di Saudi Arabia mereka menerima doktrin Wahabi, karena pada masa itu Wahabi sedang dalam keadaan berjaya. Pada dasarnya mereka menjadi perpanjangan tangan ajaran Wahabi di Minangkabau dan menyebut diri mereka sebagai golongan Padri.

Kaum Padri sangat menentang kebiasaan buruk yang berkembang dan menyebar di tengah-tengah masyarakat adat seperti judi, adu/sabung ayam, ganja, mabuk-mabukan/minuman keras,

tembakau, sirih, dan hukum adat yang dianggap melanggar agama seperti matriarkat dalam hal warisan. Oleh karena gerakan ini dianggap melakukan pemaksaan dan kekerasan maka gerakan Wahabi ini disebut oleh Supriono sebagai gerakan awal Radikalisme. Memang, pada awalnya pertentangan ini akan diselesaikan dengan damai, namun karena tidak ada kesepakatan, maka Tuanku Nan Renceh mengajak kelompok Padri menyelesaikannya dengan kekerasan sehingga muncullah perang saudara yang antar Padri melawan kelompok adat.

Perang Padri pertama terjadi di Kotalawas. Selanjutnya melebar ke daerah-daerah lainnya. Awalnya kaum Paderi dipimpin oleh Datuk Bandaro menyerang kaum Adat yang dipimpin oleh Datuk Sati. Kemudian Datuk Bandaro terkena racun dan wafat lalu kaum Padri dipimpin oleh Muhammad Syahab (Pelo (Pendito) Syarif). Pelo Syarif inilah yang dikenal dalam sejarah dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Disebut Tuanku Imam Bonjol karena beliau bertempat tinggal di Bonjol. Beliau adalah anak Tuanku Rajanuddin yang berasal dari Kampung Padang Bubus, Tanjung Bungo, daerah Lembah Alahan Panjang.

Kaum Padri menang dan sejak tahun 18815 posisi kaum Adat semakin lemah bahkan keluarga kerajaan Minangkabau tewas di Tanah Datar. Akibatnya kaum Adat (penghulu) dan sisa-sisa keluarga kerajaan yang masih hidup minta bantuan Inggris (saat itu di bawah pimpinan Raffles). Namun, sebab Inggris menyerahkan Sumatera Barat kepada Belanda, maka kaum Adat minta bantuan Belanda. Bantuan ini diiringi janji imbalan bagi Belanda bisa menguasai seluruh Minangkabau. Perjanjian ini disepakati pada 18 Februari 1821 oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar dan Belanda. Kesempatan emas ini diambil Belanda untuk melakukan ekspansi wilayah jajahan di Sumatera Barat. Konsekwensinya, Belanda menganggapnya sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung pada Hindia Belanda, dan akhirnya Belanda mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai *Regent Tanah Datar*.¹

Pemimpin-pemimpin yang terlibat pada Perang Padri, Perang saudara adalah Datuk Bandaro, Datuk Malim Basa, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Renceh, dan Tuanku Nan Cerdik dari Padri dan kaum Adat dipimpin oleh Datuk Sati.

Menurut Catatan autobiografi Tuanku Imam Bonjol yang ditulis sendiri oleh beliau terdapat pernyataan yang berisi

¹G. Kepper, *Wapenfeiten van Het Nederlands Indische Leger; 1816-1900*. (Den Haag: M.M. Cuvee, 1990)

penyesalannya atas kekejaman Wahabi Paderi. Tulisan ini adalah karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu dan disimpan oleh keturunan Imam Bonjol lalu dipublikasikan tahun 1925 di Berkley dan di Padang tahun 2004. Apakah hal ini benar atau tidak penulis juga masih mempertanyakanya.

2. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Menurut Saifullah, gerakan PRRI ini juga bagian dari gerakan Radikal yang muncul di Padang tahun 1949, 4 tahun setelah Proklamasi kemerdekaan RI.

PRRI singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan ini telah ada di saat-saat pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Penyebab munculnya gerakan ini karena ketidakpuasan pada kebijakan pemerintah pusat yang mengerutkan Divisi Banteng hingga 1 brigade saja. Bahkan juga ketidakpuasan ini muncul di berbagai daerah seperti Sumatera dan Sulawesi berkaitan alokasi anggaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat ditambah lagi tekanan ekonomi dan rendahnya kesejahteraan prajurit dan masyarakat

PRRI kemudian membentuk Dewan Perjuangan, tidak mengakui kabinet Djuanda dan juga membentuk kabinet PRRI. Pada tanggal 19 Januari 1958 para tokoh militer dan sipil mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, Sumatera Barat yang menghasilkan sebuah pernyataan “Piagam Jakarta” dengan tuntutan agar Presiden Soekarno bersedia kembali kepada konstitusional dan menghapus segala akibat dari tindakan yang melanggar UUD 1945 dan membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan.

Setelah pusat menolak permohonan di atas, maka pada tanggal 15 Februari 1958 Letnan Kolonel Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Perdana Menteri nya Syafruddin Prawiranegara. PRRI juga mendapat dukungan dari PERMESTA dan rakyat setempat sehingga gerakan ini disebut PRRI/PERMESTA.

Kemudian Pemerintah Pusat meluncurkan operasi militer gabungan yang disebut dengan Operasi Merdeka, dibawah komando Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi gabungan ini sangat hebat karena PRRI dianggap mempunyai senjata modern buatan Amerika Serikat yang mampu menembak jatuh Pesawat Angkatan Udara Revolusioner (Aurev) yang dibawa oleh Allan L. Pope seorang warga negara Amerika Serikat. Namun pemberontakan PRRI/Permesta ini dapat diselesaikan bulan Agustus 1958, hanya berlangsung sekitar 6 atau 7 bulan dan kemudian tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali kepangkuan Republik Indonesia.

Menurut Saifullah PRRI ini tidak dikomandoi orang Padang melainkan oleh Orang Batak, yaitu Letnan Kolonel Ahmad Husein. Hanya saja beliau tinggal di Sumatera Barat. Ini dijadikan justifikasi oleh beliau bahwa pada dasarnya orang minang itu kritis, walaupun demikian sulit untuk melakukan tindakan terror karena dianggap merugikan.

Adapun menurut Adri Febrianto, salah satu dosen UNP yang sedang menyelesaikan studi Doktornya di UI mengatakan setelah PRRI ini maka tidak pernah lagi terjadi gerakan radikal di Padang. Bahkan gerakan PRRI ini sebenarnya juga tidak berlangsung lama dan tidak didukung sepenuhnya oleh orang Padang dan juga sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi warga Sumatera Barat.

B. Radikalisme dan Intoleransi Menurut Tokoh, Ulama dan Peneliti di Kota Padang

Hasil wawancara dan penelitian lapangan kami pada para tokoh, ulama, ilmuwan, peneliti dan warga setempat menunjukkan bahwa pemahaman radikalisme dan intoleransi di kalangan laki-laki dan perempuan masih terus berkembang meskipun tidak dalam bentuk terror.

Di antara mereka yang kami wawancarai dan pendapatnya adalah:

1. Saifullah

Beliau salah seorang Guru Besar yang bertugas di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Padang. Beliau juga mantan kepala Pusat Penanggulangan Radikalisme di UIN padang. Hasil wawancara kami dengan beliau , peneliti menemukan beberapa analisis. Beliau lebih banyak melihat dari sisi etnologi di mana orang padang itu tidak mungkin menjadi pelaku teror karena mereka selalu berpikir sebelum melakukan apapun. Mereka selalu mempertanyakan apa manfaatnya melakukan teror, untung dan ruginya. Akan tetapi orang minang itu bisa menjadi provokator atau orator yang menimbulkan tindakan radikal.

Menurut beliau orang minang bisa menjadi provokator radikalisme karena pada umumnya orang minang itu kerjanya dagang, politik, ulama dan sastrawan. Orang minang tidak akan pernah jadi jendral yang berhasil meskipun mereka suka menjadi intelijen tapi dia pasti menjadi politikus yang berhasil, menjadi ulama, pedagang, dan sastrawan dari dulu sampai sekarang demikian. Oleh Karena orang minang itu biasanya suka bicara, dia komunikator yang baik dan juga pemikir yang baik tapi dia biasanya tidak jadi eksekutor yang baik. Jika pernah muncul radikalisme, saya kira orang padang hanya bisa menjadi penghasut yang baik. Karena itu menurut beliau juga sebagai orang minang bisa menjadi provokator yang baik, namun orang minang tidak mungkin pelaku bom bunuh diri. Menurut beliau ketika orang minang mau melakukan bom bunuh diri maka dia mirip seperti pedagang. Dia akan menghitung duduk di sini berapa untungnya, rebahan disini rugi atau belaba. Biasanya karakter orang padang itu duduknyapun dihitung kalau sejak jam 8 pagi berapa dapat untung dan kalau jam 9 berapa labanya sampai sedetil-detilnya. Kharakter dan budayanya orang minang yang berprofesi pedagang ya begitu, tandasnya.

Karena sudah ditakdirkan jadi pedagang, tidak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa dihitung berapa rugi. Oleh karena itu menurut beliau orang padang cenderung materialisme. Kharakter orang padang yang cenderung materialisme-individualisme inilah yang membuat orang padang kurang kompak sehingga orang padang tidak ada yang memiliki perusahaan besar yang menghubungkan orang padang-orang padang bergabung. Kharakter orang padang pemain tunggal yang baik oleh karenanya di mana-mana ada pedagang padang, tapi kecil-kecil tidak pernah besar dan banyak cabang karena mereka selalu tidak kompak.

Menurut beliau dalam hal persatuan, khususnya persatuan kekeluargaan dalam hal sosial orang padang bisa bersatu, namun dalam perdagangan, mereka tetap bersaing. Menurut beliau lebih mudah

menyatukan pedagang padang dalam hal sosial daripada mempertemukan orang padang yang berprofesi khusus pedagang. Jadi ketika bicara radikalisme saya kira orang padang di mana-mana bisa terlibat tapi pada posisi provokator atau perencana, namun jika sebagai pelaku bom bunuh diri atau terror menurut beliau tidak mungkin. Sekalipun ada iming-iming 70 bidadari, pasti orang padang masih berfikir; apakah mungkin 70 bidadari benar dan akan diterima.

Untuk itu menurut beliau dalam semua kasus teroris, kalau kita baca di media, semua teroris yang ada di Indonesia kita tidak akan temukan orang padang, kecuali pada level provokator atau perancang. Jika mengaduk-aduk orang atau menghasut orang padang bisa melakukannya dengan baik, tapi di level eksekusi biasanya orang padang tinggal di belakang. Apakah ini bisa dianggap watak yang tidak baik, mungkin juga tidak baik. Menurut beliau hal ini lebih berkaitan pada ekonomi mainset orang padang. Walau mungkin ada faktor politis, namun hal ini tidak dominan. Jika disebut politik tinggi yang paling benar menurut beliau adalah orang padang itu seperti kata pepatah padang di luar mau, di dalam mau, di atas mau, di bawah mau, di atas tempi na diate. Tempi na diate maksudnya dia tidak mau jadi prajurit. Oleh karena itulah orang padang jadi buritan tapi jadi jendral mau pak tahulah bapak anak buah gak mau mana mau jadi anak buah jadi jangan harap orang padang mau jadi cleaning servis dan tukang sapu

Menurut beliau jika orang padang mau menjadi tukang sapu, maka dia akan berfikir satu hari dia akan menjadi pengelola tukang sapu dan kemudian dia akan membawahi seluruh tukang sapu. Orang padang itu tidak akan jadi bawahan selamanya. Menurut beliau orang padang tidak akan mungkin ditemukan jadi bawahan selamanya. Mereka selalu berfikir satu hari menjadi bawahan/diatur, kemudian yang ke dua dia sudah mengatur orang, yang ketiga dia supir atau bos. Jika tidak bisa demikian dia pasti keluar. Jadi ketika kita menganalisis dengan pendekan watak etnik untuk melihat kasus radikalisme maka orang Padang tidak akan menjadi eksekutor.

Menurut beliau sebagaimana radikal yang sudah meninggal di Padang hanyalah dalam pelaku provokator, dia mengaturnya, dia mempertemukan orang dan dia menghasut orang yang mau bergejolak tapi setelah bergolak biasanya orang Padang berada pada garis belakang, sama juga seperti mulai dari komando jihad dulu orang Jawa pelakunya di padang. Beberapa bulan lalu juga ada yang mencoba

membakar Dasmara, polsek Dasmara itu orang Jawa yang transmigran tetapi bukan orang Padang.

Kalau orang Jawa, menurut beliau yang juga pernah tinggal di Jogja jadi tahu sedikit tentang karakter orang Jawa, jika kata bosnya atau kata Kiainya atau kata hati nuraninya maju, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Dia akan maju tidak banyak pertimbangan. Kalau orang Padang selalu banyak pertimbangan, jadi anda akan baca nama-nama provokator, meskipun ada orang Padang tapi kalau untuk pelaksana menurut beliau tidak akan kita temukan. Beliau memang tidak mengatakan Padang bersih dari terorisme tapi watak orang Padang hanya akan menempatkan mereka pada posisi provokator dan konseptor bukan pelaku atau eksekutor. Menurut beliau angkatan 60-an juga begitu dan kalau kita baca sejarah unsur-unsur politik, menurut beliau orang Padang juga banyak di depan kemerdekaan, termasuk tokoh kemerdekaan yang menurut pendapat beliau kira-kira 60% itu orang Padang. Menurut beliau ketika orang lain belum melek sastra, orang Padang sudah bersastraria, ketika orang mulai berpolitik juga dan masih merancang-rancang memajukan politik, orang Padang ini sudah jadi tokoh politik. Jadi oleh karena itu terorisme bisa dilihat dari pendekatan etnologi, watak orang Padang akan sukar ditemukan menjadi pelaku-pelaku atau eksekutor yang beresiko.

Beliau juga sedang mengkritik etnik Padang, yang cenderung materialis dan hedonis. Jadi untuk hal-hal terorisme ini tidak ada orang Padang yang mau melakukannya, tapi ketika di mesjid ada provokator yang berteriak-teriak Allahuakbar, biasanya orang Padang selalu berada di depan.

Kalau dikaitkan dengan perang Padri menurut Sapriyanto masalah itu sama juga dengan konteks perang PRRI yang berlangsung cuma 3 tahun. Dideklarasikan tahun 1958 dan tahun 1961 sudah berakhir. Menurut beliau orang Padang tidak berani perang, tidak pandai perang, tapi untuk melawan tentara pusat, dia mampu memberikan komando, namun yang perang adalah kolonel Simbolon. Yang perang Simbolon, tapi untuk deklarasi PRRI Ahmad Husein. Jadi yang mendeklarasikan perang adalah orang Padang, tapi untuk perang orang lain disuruh sehingga PRRI itu untuk pemberontakan paling pendek di Jawa Barat. Di daerah lain pemberontakan bisa mencapai 15 tahun, sedangkan di Padang cuma 3 tahun selesai. Orang Padang memang bisa berontak dan bisa melawan. Kita orang Padang paling

kritis, tidak suka dengan istilah *pake uwo* apa kata guru, atasan, bos ya sudah begitulah. Tradisi *fakeuwon* ada di tengah-tengah masyarakat jawa, berbeda dengan tradisi orang Padang yang sangat kritis, kata beliau.

Hal ini dapat dicontohkan dengan peristiwa Pemilu di Sumatera Barat ini. Sumatera Barat adalah daerah Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir di Jogja, namun besarnya di Sumatera Barat, tapi apa kata Amien Rais, ketua Muhammadiyah, tidak didengar orang Muhammadiyah Padang. Meskipun Amin Rais tokoh Muhammadiyah toko reformasi dulu, di Sumatera Barat Amien Rais waktu calon presiden dulu tidak menang di Padang. Mengapa tidak menang ? Menurut beliau di Padang sini tidak memang. Itulah watak orang padang, kalau di jawa pasti menang. Sekali Amien Rais katakan maju, maka orang akan maju.

Di padang walaupun orang Muhammadiyah di sini sayang Amien Rais semua, tapi ketika Amien Rais mengatakan maju, maka orang padang mengatakan nanti dulu, kita diskusikan dulu, mari kita diskusi dulu, mari kita seminarkan dulu. Sedangkan kalau di Jawa tidak bisa begitu kalau Kiyai mengatakan pilih maka mereka pilih. Di Jawa ada istilah “kualat” atau “berdosa besar”, tabuh atau terlarang untuk mempertanyakan ide Kiai. Sedangkan di Sumatera Barat tenang-tenang aja orang sambil ngopi-ngopi; itu amien rais ceritanya begini-begini tunggu dulu, orang yang milih, saya mau jadi apa ini kalau jadi, akhirnya tidak bisa menang. Pokoknya Amien Rais kalah di sini, itu lagi-lagi tidak bisa difahami kalau tidak mendekati watak tersebut. Menurut beliau terus terang saja Muhammadiyah itu kan di Indonesia ini paling besar di Sumatera Barat, meskipun lahirnya di solo, besarnya di Jogja, tapi lebih besar lagi di Padang. Orang padang rata-rata penganutnya Muhammaddiyah walaupun tidak dekat pada pengurus Muhammadiyah di sini.

Dengan pendekatan etnologi ini, menurut beliau akan mudah kita memasuki pembahasan ini, akan seperti apa radikalisme dan terorisme di Sumatera Barat ini. Seandainya pun ada teroris dari Padang, ini biasanya orang padang yang lama di luar Sumatera Barat. Kalau masih tetap di Sumatera Barat, masih berfikir seperti orang minang. Orang Padang baru berfikir sedikit jawa atau sedikit batak atau sedikit mana-mana kalau dia sudah merantau lama ke mana-mana. Baru ada sedikit penularan kultur jawa kepadanya, tapi selama dia masih di sini, dia masih tetap menjadi orang minang yang berfikirnya seperti ini. Dia

akan selalu mempertanyakan apa untungnya, karena diakan pedagang, kalau pedagang itu selalu mempertanyakan untungnya. Termasuk di UIN Sumatera Utara itu kalau ada orang padang pasti dia berfikir apa untungnya bagi saya, ada juga yang mau calon Gubernur dari Sumatera Utara dulu tapi gagal.

Di Padang juga terdapat gerakan Wahabi, Komite penegak Syariat Islam sumatera barat yang dipromotori Abidin dan juga ada Takanagari serta majelis mujahidin yang menggerakkan masyarakat Sumatera Barat/Padang datang ramai-ramai ke acara 212 Jakarta. Mereka carter 2 pesawat terbang 12 bis dari sumatera barat. Bis-bis itu meskipun di stop dilampung namun dengan nada keras mereka perjalanan itu tidak terhambat. Menurut beliau ini juga bagian dari gerakan radikal.

Menurut beliau radikal itu berfikir secara menyeluruh, mendasar pada pokok-pokoknya dan juga cabang-cabangnya. Cuma kadang-kadang ditambah dengan harus dilakukan secara cepat. Jika tidak pakai kata “cepat” ini saya kira semua kita radikal dan semua kita memang harus radikal dan semua orang beragama ini harus radikal. Kita tidak boleh setengah-setengah beragama harus sampai ke akar-akarnya paling dalam. Oleh karena itu semua kita ini radikal. Cuma radikal yang diterangkan di sini dalam pengertian sekarang versi BNPT KPT saya kira ada tambahannya bawa gerakan yang mendasar yang tuntas yang karena itu harus dilakukan secara menyeluruh dan cepat tidak bisa setengah-setengah dan tidak bisa sebagian-sebagian tidak bisa secara separadis harus menyeluruh tidak bisa secara bertahap. Diujung-ujungnya inilah yang menghasilkan terorisme sebenarnya.

Jadi terorisme adalah radikalisme pada dosisnya yang tertinggi memang kalau sudah menyeluruh harus cepat tidak bisa setengah-setengah tidak bisa juga bertahap tapi harus serentak. Di samping itu menurut beliau Salafi tidak dekat dengan politik karna salafi ini kan datang dari luar Indonesia, luar sumatera barat sama juga seperti jamaah tabligh, semuanya datang dari luar Indonesia. Menurut beliau Salafi tidak masuk dalam katagori radikal karena hanya gerakan keagamaan, Jamaah tabih juga tidak, malah mereka menolak untuk berpolitik praktis, mereka non partisi politik tapi kalau Majelis Mujahidin, Ansor Daulah banyak aspek politiknya, karena itulah kebanyaakannya mereka itu alumni kalau tidak Afganistan atau Filipina.

Menurut beliau adanya 212 dan adanya 12 bis yang dicarter dari padang itu kan menandakan di sini ada radikalisme. Tidak mungkin ada gerakan seperti itu kalau tidak terokordinir oleh orang yang punya karisma dan punya daya lekat emosi. Orang-orang seperti itu cenderung radikal dan menurut beliau radikal seperti itu pada awalnya positif dan baru akan menjadi negative ketika dia sudah disertai persinggungan dengan kepentingan dunia internasional seperti ISIS, al Qaeda, atau lainnya. Hal ini berubah menjadi negative, tapi untuk menjadi radikal bukan kah kita semua radikal ? apakah kita abangan beragama seperti orang jawa saya kira tidak, kita beragama sampai ke dasarnya dan saya kira Padri di Sumatera Barat sudah menunjukkan bahwa beragama itu harus sampai ke dasarnya. Jadi yang masih bercampur-campur dengan animisme itu disikat habis, itulah Padri, tegas beliau. Gerakan Padri itu menurut beliau adalah awal dari radikalisme sumatera barat dan PRRI lanjutannya.

Akan tetapi sekarang saya kira orang padang sudah mulai banyak belajar. Tidak bias melakukan gerakan Padri lagi. Akan tetapi karena saya cinta sejarah makan saya mengatakan Padri itu berhasil walaupun gagal secara ril. Kegagalan itu dibuktikan dengan anak Tuanku Imam Bonjol diangkat oleh belanda jadi residen di bonjol. Karena anak Tuanku imam bonjol diangkat oleh belanda jadi residen dibonjol, maka imam Bonjol ini dibuang ke Batak.

Adapun isu baru yang beredar di Padang bahwa ada 3000 orang berpotensi menjadi teroris menurut beliau perlu diklarifikasi ulang. Menurutny beliau tidak ada melihat 3000 orang, kecuali seluruh anggota Majelis Mujahidin dianggap sebagai teroris. Untuk itu perlu dijelaskan kriteria teroris menurut al-Chaidar yang menuduh 3000 itu tidak bisa begitu aja saya terus terang keberatan saya ketua FKPT SUMATERA BARAT Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme, tegasnya.

Di sini kalau ada orang padang radikal tentu mereka tidak karena ikut-ikutan orang Jakarta. Orang sini radikal karna wataknya, radikal tapi jangan sebut bahwa radikal disini itu sama dengan yang dimaksud oleh BNPT, bukan begitu, tegas beliau. Tradisi orang Padang berani merantau jauh-jauh dan tidak akan kembali sebelum berhasil. Orang padang saingan orang cina. Orang padang berani merantau walaupun sampai ke bulan dia akan buka rumah makan padang. Model sikap seperti ini dapat dikatakan radikal. Yang berani melakukan itu adalah orang Padang dan secara umum orang jawa tidak akan berani

merantau seperti itu. Kebanyakan orang Jawa ditransmigrasikan, kebanyakan mereka tidak berani merantau karena dianggap banyak resiko. Berbeda dengan orang Padang berani merantau sampai ke ujung-ujung bumi. Inilah yang saya maksudkan orang Padang umumnya radikal sudah dari sononya namun radikalisme seperti itu bukan radikal yang dimaksudkan oleh BNPT.

Menurut beliau orang Padang tidak radikal. Adapun pendapat al-Chaidar yang mengatakan ada 3000 orang berpotensi menjadi teroris, tidak bias dibuktikan. Kalau hanya menuduh bahwa massa Jemaah Ansorut Tauhid, KPSB (Komite Penegak Syariat) Sumatera Barat adalah radikal, maka menurut beliau ada banyak betul radikal dan semua massa mereka ini radikal. Tetapi jika dipakai kriteria radikal yang mendekati yang diinginkan oleh BNPT mereka tidak termasuk.

Namun, jika radikal yang negative seperti yang definisikan oleh BNPT menurut beliau mungkin ada sedikit orang Padang yang radikal untuk mengatakan tidak ada sama sekali. Kalau ada orang Padang radikal seharusnya bias disebut namanya. Orang yang melakukan teror di senayan di JW Mariot itu misalnya bukanlah orang Padang. Jadi simpulnya kalau radikal yang diinginkan oleh BNPT saya kira tidak banyak orang Padang yang mau melakukannya, tapi kalau radikal menurut versi orang sini seperti bersemangat tinggi, maka saya kira banyak orang Padang yang radikal, tegas beliau. Bahkan saya sendiri sering juga radikal (bersemangat). Hal ini harus digaris bawahi, harus catat betul sebab belum ada terbukti orang Padang yang melakukan bom bunuh diri.

Juga belum ada orang Padang yang mau bom bunuh diri dan dihukum mati karena tindakan terornya. Kalau ada yang ditangkap tangkap 3 atau 5 orang yang lalu mereka bukan orang Padang. Dahulu pernah ada yang melakukan kekerasan namun mereka menggunakan panah. Panah bukan senjata orang Padang. Panah adalah senjata orang Dayak, orang Papua. Mereka masuk koran bahwa mereka memiliki panah. Sepanjang sejarah yang saya baca tidak pernah orang Padang main panah. Jika menggunakan keris mungkin. Orang Padang kalau berkelahi menggunakan keris benar adanya, namun jika menggunakan panah sepanjang sejarah yang saya baca tidak ada budaya Padang dari dahulu sampai sekarang baik kerajaan minangkabau sampai hari ini tidak pernah orang Padang menggunakan panah, tegas beliau.

Demikian juga kasus dibakarnya polsek yang buat heboh Padang ternyata pelakunya orang Jawa transmigran (transmigran). Mirip seperti di Pasaman, di desa Bau namanya dan kalau di pesisir selatan namanya Sitium Lunam Silaut. Tiga wilayah Sumatera Barat transmigran paling banyak adalah di Sitium itu dan **Masrait**. Senjata yang digunakan tidak sesuai dengan tradisi Minang. Kemudian yang kedua setelah ditanya ternyata pelakunya juga orang-orang luar yang pindah ke sini (pendatang)

Jika gerakan agak keras di Padang pasti ada. Misalnya Abidin, di samping calon anggota DPR Pusat dari PBB (Partai Bulan Bintang) beliau juga Ketua Komite Penegak Syariah Islam Sumatera Barat. Menurut beliau Abidin ini cenderung radikal, namun tidak bisa digolongkan pada teroris. Beliau keberatan pernyataan al-Chaidar yang mengatakan yang menyebut ada 3000 orang potensial teroris di Sumatera Barat. Beliau keberatan karena beliau hidup di Padang, menghirup udara di sini dan tinggal di sini dan tidak pernah merasa ada gangguan keamanan. Terorisme itu ciri-cirinya membuat orang tidak aman, membuat orang selalu merasa ketakutan sepanjang waktu tanpa sebab. Lalu mari kita tanya orang kenapa Sumatera Barat tidak nyaman..? Jangan jangan nanti yang membuat mereka tidak nyaman justru bukan karena ada terorisnya, tapi karena dituduh ada terorisnya. Bahkan perempuan jalan-jalan di sore dan malam hari masih aman di sini tidak seperti di sebagian daerah lain.

2. Sufriyono

Menurut Sufriyono: Aliran salafi wahabi juga termasuk radikal. Namun radikal salafi itu dalam bentuk radikal cultural dan struktural. Hal ini disebabkan salafi wahabi itu menganggap aliran mereka saja yang benar yang lain tidak benar. Dari sisi radikal cultural mereka tidak mau bergabung dengan yang lain, mereka cenderung mengisolasi diri dan hanya bergabung dengan Jemaah mereka sendiri.

Mereka juga tidak mau disebut organisasi karena mereka cenderung anti organisasi. Namun kaum salafi sampai sekarang belum pernah melakukan tindakan radikal dalam bentuk teror, masih dalam tataran cultural saja dan sebatas klaim di lisan. Aliran ini juga, menurut Sufriyono anti tarikat. Di Payakumbuh, hasil penelitian beliau, katanya antara naqshabandi dengan salafi, semi salafi seperti MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) yang punya ideologi yang sama dengan salafi juga anti thariqat. Radikal yang mereka tampilkan masih dalam bentuk

kekerasan ancaman saja, misalnya; MMI dan salafi dalam ceramah-ceramah mereka membid'ahkan tarikat, kadang mereka menyebut nanti radionya itu akan kami bakar, karena salafi bilang tarikat itu penyakit masyarakat dan sebagainya.

Menurut Sufriyono tasauf dan tarikat adalah bagian dari khasanah Islam bukan penyakit seperti anggapan kaum salafi wahabi. Salafi menganggap penyakit karena jargonnya bid'ah. Ada 3 kolokium keilmuan yang dibid'ahkan oleh salafi yaitu: ilmu kalam, tasauf dan filsafat. Oleh karena itulah mereka mengharamkan ketiganya.

Sufriyono meneliti salafi dari segi gerakan sosialnya, ideologinya seperti apa, bagaimana dia menyebarkan ideologinya, media apa yang dipakai, artinya pola pola gerakannya, kalo bagi saya pola gerakan merka melakukan kekerasan tapi belum memakai kekerasan yang membunuh, tapi masih yang tidak sepaham masih dalam cultural dan structural, belum ikatan langsung, itu yang banyak yg saya tahu. Kalo kekerasan yang radikalisme yang aksi cenderung pada aksi dan terror, kalo MMI mereka punya dakwah di lapangan, di mana tempat maksiat seperti di MUS, tempat pacaran, mereka bergerak di sana tapi mendapat tantangan juga dari kelompok-kelompok sana mereka punya geng yang mempertahankan kelompok itu jadi punya klash dan kompleks juga kan.

Bentrokan ini terjadi di MUS (bungkus tempat wisata). MMI gitu sering sosialisasi sebagainya. Ini ga bersyariat, harusnya kan bersyariatnya seperti itu. Kalo MMI melakukan kegiatan langsung, kalau salafi setahu saya belum ada pemikiran seperti itu masih dalam sektarian cultural dan struktural, kata Sufriyono.

Kaum salafi selalu menafikkan pemahaman-pemahaman yang lain selain mereka sampai muhammadiyahpun dinafikan oleh nya, tidak hanya NU juga tarikat-tarikat. Namun di wilayah wilayah tarikat mereka tiddak bisa masuk misalmya wilayah Pariaman wilayah tarikat satria, wilayah 50 kota dan lainnya. Ringkasnya ada 8 wilayah tarikat di Sumbar. Kelompok-kelompok itu tidak bisa masuk karena itu musuhnya dan orang itu tidak bisa dimasukin oleh kelompok itu. Sebelum wilayah Sumbar dimekarkan juga sudah banyak thariqat. Walaupun sebagian orang mengatakan di sumbar itu anti thariqat ternyata banyak berthariqat.

Di Sumbar thariqat yang paling besar dan banyak pengikutnya adalah Naqsabandiah dan Satariah. Qadiriyyah lebih banyak di wilayah

pesisir. Kalau Bukit Tinggi itu kebanyakan Naqshabandiyah dan Satariyah. Salah satu tokohnya ust Safrudin yang termasuk Satariyah.

Menurut Sufriyono cikal bakalnya kekerasan dimulai dari sejarah Padri. Ini sejarah kelamnya sumbar, perang Padri di mana terjadi konflik berdarah orang minang Islam dengan Islam, sebagaimana Hilter menyebutkan jihad Islam vs Islam. Umat Islam terbelah. Hasil negosiasi antara kelompok radikal Padre dengan kelompok-kelompok adat atau kelompok tharikat.

Menurut Sufriyono, gerakan salafi termasuk salah satu identitas Islam yang ingin membangkitkan gerakan Padri. Beliau tidak mengetahui secara detil apa yang diinginkan dakwah Padri itu. Dakwah haji sumani, haji miskin di Padang sudah mulai tenggelam. Informasi tentang gerakan Salafi juga bisa diperoleh dari tokohnya di Sumbar seperti Ust Elfi Syam yang memiliki Yayasan Darul Iman Sumatera Barat.

Darul Iman punya lembaga mulai dari TK IT sampai Peguruan Tinggi. Salafi di Padang juga beragam. Ada yang agak moderat, lebih mudah dan ada salafi yang lebih kaku. Salafi model seperti ini sangat selektif tidak mau berubah sama sekali. Bagi mereka demokrasi adalah bid'ah. Namun Salafi di bawah pimpinan ust Elfisyam ini lebih moderat, dia milih orang yang sama manhajnya dengan beliau seperti PKS. Walaupun mereka tidak menerima demokrasi tapi mereka milih PKS karena PKS dianggap Salafisme, dekat dengan ideologi mereka.

Di Padang juga ada salafi Darul Hadis, namun kurang berkembang. Mungkin karena tingkat moderasinya yang rendah sehingga Yayasan Darul iman lebih berkembang dari Darul Hadis.

Menurut Sufiyono MMI, Salafi dan HTI tidak melakukan kekerasan structural, tetapi kekerasan kultural. Hal ini karena kekerasan yang mereka lakukan tidak langsung dalam bentuk teror melainkan dalam bentuk aksi kultural. MMI bias dikatakan melakukan kekerasan langsung secara kultural misalnya segala sesuatu yang mereka nilai tidak sesuai syariat (menurut mereka), maka mereka klaim ini tidak syariat, maka harus disyariatkan. Bahkan secara lisan Majelis mujahajidin kadang jemaahnya menggunakan kata-kata yang lebih keras seperti kita perang dalam bentuk aksi.

Namun, agak berbeda dengan Salafi tidak dapat dikatakan melakukan kekerasan structural secara langsung, karena salafi hanya bicara saja. Menurut Sufriyono Salafi masih dalam tataran ngomong aja, ini bid'ah tapi tidak sampai pada aksi pembubaran walaupun

perkataan bid'ah ini menyakiti kelomok lain, terutama kelompok-kelompok tarikat semuanya dianggap sesat oleh Salafi.

Salafi juga tidak sampai kepada takfir (mengkafirkan yang berbeda). Akan tetapi MMI sampai ke takfir. D sinilah bedanya antara Salafi dengan MMI. Kalo Salafi masih klaim mebid'ahkan yang berbeda tapi MMI sampai kepada takfir, MMI bahkan selalu menganggap sistem atau sesuatu yang mereka anggap bertentangan sebagai thagut (sesuatu yang disembah selain Allah). Salafi melakukan konflik terbesar dengan tidak mau menerima penghulu, padahal penghulu itu jabatan adat di minang. Satu waktu ketika itu ada penghulu suku, namanya suku payogodat mau mengangkat Salafi ni menjadi penghulu, kata salafi penghulu itu bid'ah , pemegang jabatan itu berdosa. Akibatnya kelompok adat marah sehingga mereka mengatakan: kamu orang minang apa tidak..? kalo kamu seperti itu kamu keluar dari minang/dikeluarkan dari adat.

MMI juga seperti itu, ketika anggota MMI nikah di minang itu salah satu syaratnya adalah penghulu. Menurut kata MMI mereka tidak butuh syarat adat, mereka hanya butuh syarat syariat. Lalu orang minang bilang ya kalo begitu kamu tidak beradat dong, lalu dia diusir dari adat, dikeluarkan oleh kelompok adat, didenda adat, sampai sekarang tidak diakui sebagai penduduk setempat. Orang minang di samping sebagai orang muslim yang taat juga sebagai orang pemangku adat yang kuat. Kaum Salafisme rata-rata tidak mengakui adat, jadi hilanglah salah satu ciri orang minang mereka dan orang yang seperti ini cenderung dianggap radikal.

Adapun MMI, menurut Seriyono, bisa juga dilihat tulisan beliau dari google, diambil dari google square . Apakah kultur minang itu radikal apa tidak. Menurut beliau yang juga merupakan bagian Disertasisaya proteksi radikal itu , misalnya pengolahan ibadah, pengolahan ibadah lokal bagi penjaga radikal, kemudian pemberdayaan adat bagi penjaga radikal, kemudian faiming lokal bagi penjaga radikal, kemudian program tarikat bagi pemberdaya radikal,jadi ada 4 elemen,

Menuurt beliau juga Thariqat itu merupakan bagian terdepan dalam memerangi radikalisme MMI, karena itu MMI memusuhinya. MMI juga memusuhi kaum adat karena hal yang sama. Jadi gerakan radikal juga pada dasarnya anti adat, dan tarikat. Karena kelompok-kelompok radikal itu anti adat seperti di perang Padri yang kelihatan jelas anti adatnya. Perang Padri ingin mengubah tatanan material

minang menjadi universitas bisnis Islam,, anti adat makanya saya melihat ada kelompok-kelompok di Sumbang yang sangat konsen dengan adat seperti Ulehaluha yang terdiri dari 3 wilayah : Luha kota, Luha 50 kota dan luha agama. Luha 50 kota sama luha kota itu yang kuat adatnya.

Dalam tradisi minang ada istilah darek. Minang itu terbagi dua darek dan luha. Darek itu merupakan pusat adat, kuat adatnya seeperti : tanah datar dan lima puluh kota. Di padang juga ada daerah rantau yang merupakan pusat agama, terutama tarikat. Daerah ini tidak kuat adatnya tapi kuat tarikatnya. Daerah rantau ini dihuni orang minang asli yang turun ke pantai. Rantau itu pada dasarnya daerah diluar territorial asli minang. Yang termasuk daerah rantau ini seperti daerah pesisir, pariaman, dan daerah-daerah pantai la. Kalau padang bisa dikatakan daerah luah bukan rantau.

Pariaman juga pusat adat sekaligus pusat Islamisasi minang kabau. Walaupun sebelumnya sudah ada kan tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam tapi yang menjadikan Islam itu pusat kultur dengan mendirikan surau adalah Pariaman. Seperti Safaruddin punya surau yang dijadikan sebagai pusat islamisasi. Islamisasi minang kabau awal pertama kali dilakukan Islamisasi tarikat/sufi terutama sebelum ada Padri. Setelah masuk Padre, padre berusaha menghancurkannya sehingga masyarakat terpilah menjadi kaum muda dan kaum tua.

Menurut Sufiyono perang Padri terjadi karena kelompok Islamis menginginkan pola-pola politknisme Islam. Menurut mereka adat itu tidak karena Islam tidak pernah mengenal adat. Perang Padri adalah perang muslim melawan muslim sesama asli orang minang. Si Hombing orang Luha dan orang Lima Puluh kota seperti haji sumaniak dan haji miskin.

Menurut beliau penduduk Luha itu kelompok adat juga termasuk orang yang hidup di wilayah adat juga. Tapi karena dapat pengaruh dari pemahaman Wahabi ya sebagaimana juga komentar Azyumardi Azra.

Era perang Padri ini adalah era Wahabi memang sangat jaya-jayanya. Melemahnya pengaruh Wahabi, menurut Sufriyono karena Padri juga tidak jaya lagi, seperti komentar pak Azra. Di samping itu pengaruh Wahabi tidak mengakar di kultur minang sehingga kelompok-kelompok itu tidak berkembang. Ditambah lagi kultur minang bertentangan dengan kultur itu. Kultur minang Matrelinial sementara

gerakan Wahabi tidak menyingkinkan itu. Nagari juga menolak dan tidak ingin merubah itu. Nagari adalah pusat pemerintahan lokal terendah di Sumbang. Itu ditentang padri. Padre ingin menukar tradisi itu sehingga seluruh Wali Nagari diganti dengan Kadi, tengku Kadi atau tengku imam. Jadi sentralisme demokrasi lokal di minang ditukar oleh Padri dengan Sentralisasi Islam.

Gerakan Padri ini dibangkitkan kembali oleh Salafi sebagaimana dijelaskan oleh Sufriyono dalam buku beliau yang juga hasil penelitian dengan judul “Gerakan Salafi di Sumbang”.

3. Zainal Azwar

Menurut Zainal Azwar, salah satu dosen Fakultas Syariah UIN Padang dosen/pelajar umum yang bukan dari madrasah/pesantren, memang cenderung lebih agresif berkaitan dengan perintah masalah agama. Hal ini disebabkan merak baru tersentuh, langsung semangat dia dan percaya berbeda dengan yang dari madrasah atau pesantren sering membicarakan hal itu lebih komprehensif.. Padahal menurut beliau ketaatan itu bias disembunyikan tidak semuanya harus ditampakkan.

Menurut beliau juga perlu didalami apakah karena perilaku buruk agamanya tidak lagi menggambarkan bahwa dia dipandang buruk dari sisi agama, padahal lebih taat secara perilakunya. Misalnya seorang guru matematika, dia mengatakan: saya permissi ya pak, saya mau shalat duha. Kalau guru agamakan udah sering dan sejak lama sholat duhanya, sehingga tidak perlu pamer begitu. Teman-teman guru matematika juga kadang mengatakan: maaf pak aku sekarang puasa senin kamis, padahal kalau guru agama kayaknya tidak pamer seperti itu.

Itulah sebabnya menurut beliau guru matematika itu lebih ekspresif dalam menjalankan agama seperti seseorang yang selalu pakai peci, baju koko dan identitas kecil keagamaan lainnya. Menurut beliau esensi agama itu tidak terletak dari peci, baju gamis dan identitas-identitas kecil tapi oleh teman-teman beliau guru matematika itu (guru umum) identitas keberagamaan itu harus lahir dalam bentuk identitas yang terlihat dan mereka itu memang terlihat. Ini antara lain riset-riset terdahulu, tapi terlebih lagi tidak, saya kira persepsi seperti ini lebih didalami, genrepresentifnya seperti apa karenakan asumsinya itu masalah kita itu partiakhi, misalnya jadi khatib, jadi penceramah gitu, saya ga punya data pun, misalnya kalo mau kelompok yg perempuan ini, tpi penelitian supriyono itu perlu krn gini hasil

penelitiannya itu gini pak, ketika suaminya itu sudah masuk kelompok tertentu itu istrinya ngikut, nah gitu loh

Asumsinya laki laki hebat karena pengaruh istri yang berada dibelakangnya. Meskipun demikian ada juga yang sebaliknya, ketika perempuan masuk harakah agama tertentu, dia tinggalkan suaminya seperti seorang dosen perempuan di Universitas Andalas, Padang yang tinggal di Jakarta itu. Dosen Unand itu dia minta diceraikan suaminya karena dia masuk kelompok harakah tertentu.

Jika kita pakai teori *ice bridge* (gunung es) satu kasus itu menggambarkan 98% ada di pedalaman, itu contoh kasus menarik, Personel dosen di Unand, dosen Ekonomi, menurut beliau menarik dipelajari. Demikian juga dosen Bahasa Inggris IAIN bukit tinggi yang memakai cadar, sampai sekarang sehingga menjadi viral.

Dosen tersebut (Nirosmiati) hingga berhenti mengambil program doctornya karena pengaruh doktrin gerakan agama yang dianut yaitu istri tidak boleh pergi tanpa suami. Menurut beliau kasus ini bisa dialami untuk entry. Kalo di sini yang lebih ekspreksif, ada keys bahwa kelompok perempuan tertentu sudah lebih menunjukkan identitas keislamannya yang tidak inklusif, kira kira begitu. Radikalisme itu seperti apa, apakah bentuk intelorensi itu termasuk kategori radikalisme, tidak inklusif dan seterusnya.

4. Agus Tamam Nurdin

Beliau salah seorang warga Sungai jernih sekaligus pengurus masjid Darul Amal lokasi wisata ikan sakti. Menurut beliau pernah diajak mendengar sebuah kajian Islam di masjid Istiqamah, Sawahan Sumbar. Dalam kajian bakda zuhur ini beliau mendengar berbagai pendapat penceramah dan Jemaah yang ikut serta cenderung radikal seperti;

- a. Umat harus punya pemimpin dan
- b. Pemerintah Thagut
- c. Sisitem Pemerintahan Thaghut
- d. Pernikahan mereka harus seakidah
- e. Music haram
- f. Jihad yang mereka fahami adalah hanya perang
- g. Tidak mengenal konsef kafir zimmi, semua kafir cenderung harbi dan halal darahnya

- h. Sistem bai'at pada pimpinan dan yang tidak bai'at dianggap ingkar bahkan kafir sampai-sampai ulama-ulama besar seperti Yusuf Qaradhawi juga dianggap kafir.
- i. Wanita-Wanitanya cenderung mewajibkan cadar.

Jumlah wanita yang ikut serta ada 1 shaf yang diperkirakan mencapai 45 orang dengankan laki-laki 3 shaff diperkirakan 135 orang.

Adapun pendanaan mereka diambil dari infak Jemaah, model berpakaian ala sunah celana di atas mata kaki.

5. Aulia

Beliau adalah seorang mahasiswi Pascasarjana UIN Padang yang rutin menggunakan cadar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Auliya ada sekitar 5% perempuan yang sudah bercadar bersamanya. Secara umum tidak ada universitas yang melarang perempuan, dosen atau mahasiswa yang bercadar. Adapun dosen IAIN bukit tinggi yang dilarang seperti komentar pak Munawir itupun sedang dalam perdebatan. Termasuk dosen yang background pendidikan umum, di UNP juga terdapat dosen yang bercadar.

C. Radikalisme dan Intoleransi di Kalangan Perempuan di Kota Padang

Menurut Saifullah perempuan minang di minang tidak sama dengan perempuan di Jawa. Mereka relative terkukuh (adat). Jangan katakan ke saya oo banyak orang minang di Jakarta yang sudah jadi wanita panggilan, misalnya mungkin saja saya tidak mengatakan tidak, tapi kalau disini relatif dia terkukuh tidak ada ruang bagi dia untuk bebas di sini jadi dengan cara gimana dia lalu bergerak dari satu tempat ketempat lain dengan menyamar lalu sebenarnya dia membawa satu misi terorisme kalau dia perempuan, tidak cocok di sini, tegas beliau.

Lalu siapa konsumennya ? kemana dia akan berkempanye ? Jika dia ingin mengrekrut orang di sini paling hanya orang dari masjid ke masjid, saya kira masjid masjid di Sumatera ini tidak mudah menerima penceramah. Orang Padang banyak yang kritis dan juga tukang ceramah. Oleh karena itu bagaimana mungkin orang menerima penceramah yang datang yang tidak kita ketahui tapi kalau di Jawa saya

tau memang asalkan pintar sedikit pasti bias diterima di Jawa karena saya di Jawa yaa, orang Jawa itu untuk agama ini memang lemah abangan yaa jadi kalau radikal ini sedikit agak keras sedikit agak mengigit biasanya orang suka karna rata-rata Islam nya orang Jawa itu abangannya jadi ketika ada sesuatu yang agak waw membuat dia terkejut dia suka membawa penceramah itu

Menurut beliau penceramah mungkin saja yang provokatif ada, tapi saya tidak mengatakan tidak bahwa masjid itu didoktrin. Jika ada yang mengatakan ada masjid yang penceramahnya diurus Majelis Mujahidin saja, saya kira itu tidak benar juga. Di Padang orangnya di sini kritis, ketika saya ceramah di mana di mana kalau udah dua atau tiga kali biasanya digantika. Masyarakatnya selalu pingin gonta-ganti. Orang di sini tidak mau mislanya penceramahnya Aagym terus meskipun dia bagus. Kalau di Jawa boleh, misalnya di Jawa barat boleh sekali penceramahnya Aagym seumur. Masyarakat seumur hidup dengar ceramah Aagym. Kalau di sini menurut beliau berbeda. Sekali dengar dua kali agak didengar dan ketiga kali sudah tidak didengar lagi sama sekali. Hal ini disebabkan karena karakter orang Padang tidak mau berada di suatu tempat berlama-lama, orang Padang suka bosan dan pemikirannya selalu mobile tidak berada di suatu tempat berlama-lama.

Menurut beliau perempuan Padang tidak sampai pada radikal yang minta memisahkan dari RI, memusuhi RI, mengkafirkan yang lain. Hanya saja orang Padang ini tidak mudah untuk menerima penceramah macam-macam. Orang Padang cukup kritis.

Tentang pakaian bercadar yang dilakukan saah seorang dosen bahasa Inggris, bukan dosen agama menurut beliau memang sudah masuk sikap radikal tapi tidak versi BNPT. Menurut beliau sebenarnya tidak ada yang salah dari cadar itu. Secara umum beliau setuju dengan cadar (terjadi pada dosen di bukit tinggi itu). Menurut beliau, beliau berbeda pendapat dengan dosen bukit tinggi yang menganggap dosen itu tidak bisa dilihat wajahnya. Menurutnya untuk apa dilihat wajahnya ? yang penting lihat otaknya, bukan wajahnya. Ada juga yang bilang pengucapan bahasa Inggrisnya menjadi tidak jelas, karna dia pakai cadar ini juga pendapat yang tidak logis.

Ketua MUI Padnag juga cenderung bersikap radikal dalam beragama, meskipun tidak dalam definisi radikal BNPT. Hal ini dapat dilihat bahwa satu-satunya MUI di daerah yang berani melawan MUI

pusat soal Islam Nusantara, saya kira baru MUI Sumatera Barat. Saya belum dengar MUI Sumatera Utara menolak Islam Nusantara atau jangan-jangan MUI Sumatera Utara memang yes karna NU Sumatera Utara itu agak besar khususnya di Tapanuli Selatan jadi kalau Sumatera utara yes untuk Islam Nusantara saya kira tidak masalah, saya dapat memahaminya, tegas beliau.

Kalau di sini Islam Nusantara ditolak resmi oleh MUI dan tidak main bahasa geneng-geneng tapi dengan bahasa frontal diucapkan Sumatera Barat tidak membutuhkan Islam Nusantara itu, kami sudah punya kaarifan local untuk mempertemukan Islam dan budaya masyarakat Islam local, jadi kami tidak membutuhkan Islam Nusantara. dan pegangan NU ya disponsori saya kira wajar aja di Sumatera Barat gak diterima itu jadi kalau anda katakan radikalisme di Sumatera Barat yes buktinya itu ketua MUI kami tu radikal kalau gak radikal mana berani dia menyatakan itu.

Demikian juga ketika Ketua MUI kami kemaren dia tanpa dibicarakan diangkat jadi relawan Jokowi jangan-jangan sudah sampai cerita ini ke bapak 2 ini tanpa memberitahukan dia dulu diangkat sebagai penasehat relawan Jokowi sejak masuk nama dia dikoran langsung marah besar, dia langsung respon bahwa itu tidak benar, itu mencatut nama saya dan mengucapkannya dengan tedeng aling-aling orang – orang Sumatera Barat ini gimana la MUI ini kalau menolak janganlah begitu keras kenapa nanti tahunya menang Jokowi di Sumatera Barat ini baru tahu diuntungkan baru tahu resikonya janganlah keras-keras kalau nolak-nolak aja kalau dia tidak menolaknya dengan gaya dia sekarang anda tahu sudah, cerita beliau.

MUI kami seperti itu itu khas Sumatera Barat kalau orang lain menolak mungkin anda menolak secara sembunyi, saya tidak suka itu jadi secara resmi tidak frontal gitu jadi tidak ada yang tersinggung tidak bijaksana menolak secara frontal dan terlalu dibesar-besarkan, kata beliau.

Kalau orang lain bicara dari aspek BNPT saya berdiri etnik aspek minang kultur minang jadi bagi saya kalau orang sini radikal dapat dipahami kultur minang memang begitu kalau tidak begitu tidak minang dia radikal versi BNPT atau radikal versi seperti kita beragama. Menurut beliau sikap ketua MUI Padang radikal tapi belum sampai pada radikal menurut versi BNPT.

Menurut beliau Rektor UIN Padang juga dijadikan sebagai relawan sama seperti ketua MUI, tapi Rektor kami mengatakan kami ASN oleh karenanya kami tidak bisa masuk relawan, kami tidak boleh memihak selesai sampai disitu. Tidak pakai kata kami tuntutan siapa yang memakai nama saya tanpa ijin. Berbeda dengan ketua MUI Padang tadi.

Dengan demikian secara umum sikap radikal di kalangan laki-laki dan juga diikuti oleh perempuan dalam beragama masih cukup berkembang, meskipun Radikal di sini tidak seperti radikal yang dimaksudnya oleh BNPT melainkan radikal dalam arti pelaksanaan agama secara radikal, mengakar dan kuat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini kami menemukan sikap dan pemahaman radikal dan intoleran masih terus berkembang di Kota Padang dan Medan. Hal ini juga melibatkan perempuan-perempuannya. Akan tetapi radikal di sini dimaksudkan adalah radikal dalam hal pengamalan agama secara mengakar dan detil sampai sekecil-kecilnya bukan radikal dalam arti dan dimaksudkan BNPT

Kota Padang dihuni masyarakat yang kritis sehingga pemahaman apapun tidak gampang mewarnai kota ini. Hanya saja pemahaman-pemahaman yang mengarah pada terror juga muncul meskipun hanya dalam bentuk ceramah propokatif belum dalam bentuk aksi terror. Penduduk Padang pada umumnya sulit terlibat terror, karena selalu berfikir untung rugi dan kaibatnya.

Adapun di Medan gerakan-gerakan harakah yang memiliki pemahaman radikal juga masih berkembang yang sebagiannya. Alasan-alasan mereka melakukan tindakan radikal seperti ketidakadilan sosial, tekanan dan perlakuan yang diskriminatif terhadap umat Islam dan juga kesalahan fahaman dalam memahami doktrin agama Islam.

Berkaitan dengan perempuan di Kota Medan, mereka terlibat dalam mendirikan institusi lembaga pendidikan Taman kanak-kanak dan juga bahkan menempel digerakan-gerakan remasja masjid dan demonstrasi seperti 212, 411 dan sebagainya. Pada dasarnya perempuan juga mengikuti pasangan mereka dan di posisi mana mereka bergerak. Perempuan terlibat karena kekuatan laki-laki semakin berkurang jumlahnya karena sebagian sudah tertangkap dan meninggal dunia.

B. Saran

Untuk itu perlu diadakan penanggulangan yang intensif seperti penyebaran pemahaman-pemahaman yang benar dan moderat tentang Islam, hubungan antara Islam dan non Islam secara damai sesuai ajaran agama dan UU yang berlaku di Indonesia, penegakan keadilan, menjauhi tekanan/sikap yang tidak adil terhadap umat Islam dan pemerataan kesejahteraan sosial oleh pemerintah dan semua kita.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rubaidi, Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007)
- Adams, J.S. Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (ed.). *Advances in Experimental Social Psychology*. Vol. 2, 267-269. New York: Wiley, 1965.
- Agus, SB. *Deradikalisasi Nusantara Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Jakarta: Daulat Press, 2016.
- Ali, Abdullah. *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*. Cirebon : STAIN Press. 2007.
- Alsa, Asmadi . 2003. Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, serta kombinasinya dalam
- Azca, Muhammad Najib. "Yang Muda yang Radikal: Refleksi Sosiologis terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslimdi Indonesia Pasca Orde Baru." Pidato Dies Natalis ke 57 (2011).
- Azra, Azyumardi. Konflik baru antar peradaban: globalisasi, radikalisme & pluralitas. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Perkasa, 2002.
- Azyumardi Azra. 2002. *Konflik Baru antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Basrowi, Sukidin. *Metode Penelitian Kualitatif, perspektif mikro*. Surabaya : Insane Cendikia, 2002.
- Bellah, Robert Neelly (1967). "Civil Religion in America". *Daedalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences* 96 (1):Berger, Peter. *The Sacred Canopy*. (1967)
- Bobbio, Norberto, *Left and Right: The Significance of a Political Distinction (translated by Allan Cameron)*, University of Chicago Press, 1997
- Bubalo, Anthony, and Greg Fealy. *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Mizan Pustaka, 2007.

- Cambridge University, *Cambridge Advanced Learners Dictionary*, (Singapore: Cambridge University Press, 2008)
- Casanova, Jose (1994). *Public Religions in the Modern World*. University of Chicago Press
- Durant, Will, *The Age of Faith*; Simon & Schuster (1980)
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. London: Fontana Press. 2012
- Dalmeri. *Membayangkan Islam dan Toleransi di Era Postmodernitas: Kritik terhadap Rasionalisme Kaum Muslim Modernis*. Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. IX, Nomor 35 Tahun 2010.
- Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of the Religious Life*. London: George Allen & Unwin (in French 1912, English translation 1915), 1976
- Effendi, Bahtiar, and Hendro Prasetyo. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM-IAIN (1998).
- Effendy, Bahtiar, and Soetrisno Hadi. *Agama dan radikalisme di Indonesia*. Nuqtah, 2007.
- England." Electronic Text Center, University of Virginia Library, Retrieved 1 August
- Fananie, Zainuddin, Atika Sabardila, and Dwi Purnanto. *Radikalisme Agama & Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press & The Asia Foundation (2002))
- Fathurin, Zen, *Radikalisme Retoris*. Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012
- Faturochman, *Keadilan, Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Gauchet, Marcel. *The Disenchantment of the World*. (1985/ 1997).
- Geertz, Clifford. 1993 [1966]. *Religion as a cultural system* (archived 25 September 2007).
- Greenberg, J, *The Quest for Justice on The Job*. (London: Sage Publication, 1996)
- Hasan, Noorhaidi. *"Ideologi, Identitas dan Ekonomi-Politik Kekerasan: Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia."* (Jakarta : Prisma 2010).

- Hasan, Noorhaidi. *"Multikulturalisme dan tantangan radikalisme."* Merayakan kebebasan beragama, bunga rampai 70 tahun Djohan Effendi (2009).
- Hasani, Ismail, and Bonar Tigor Naipospos. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme, Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta.* (Jakarta: Pustaka Media, 2012).
- Hasani, Ismail, and Bonar Tigor Naipospos. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.* 2010.
- Hobolt, Sara B.; Brug, Wouter Van der; Vreese, Claes H. De; Boomgaarden, Hajo G.; Hinrichsen, Malte C. (2011-09-01). *"Religious intolerance and Euroscepticism"*. European Union Politics 12 (3)
- Hosseini-Zadeh. I. *The Muslim world and the West: The roots of conflict.* Arab Studies Quarterly, Vol. 27.
- Ida, R. & Subiakto, H. 2014. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi.* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Indriyanto Seno Adji. 2001. *Terorisme dan HAM" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia,* (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates).
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010).
- Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia, 1974)
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007)
- Marx, Karl; "Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right", (1844).
- Mellon, J.G., *Islam and international politics: Examining Huntington's 'Civilizational Clash' thesis.* Totalitarian Movement and Political Religions, Vol. 2, No. 1, 2001

- Montesquieu, Book 11, Chapter 6, "Of the Constitution of England,"
Eletronic Text Center, Universirty of Virginia Library,Retrivied
1 August 2012.
- Mubarak, M. Zaki. *Genealogi Islam radikal di Indonesia: gerakan, pemikiran, dan prospek demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2008).
- Musa, Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al Qur'an*.
(Yogyakarta: LESFI 1992)
- Parsudi Suparlan dalam Robertson, Roland (ed). 1988. "Agama", dalam
Analisis dan
- Peet, R., *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO* (New York:
Zed Book, 2003)
- Pew Research Center (2012) The Global Religious Landscape. A
Report on the Size and Distribution of the World's Major
Religious Groups as of 2010. The Pew Forum on Religion &
Public Life.
- Pius Abdillah P, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Arkola,
2012)
- Purnomo, Agus. Ideologi kekerasan: argumentasi teologis-sosial
radikalisme Islam. (Jember: STAIN Ponorogo Press, 2009)
- Pusat Kajian Gender Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak
Asasi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007).
- Qodir, Zuly. Radikalisme agama di Indonesia. Pustaka Pelajar, 2014.
- Rawls, J. (1993/1996/2005) Political Liberalism (Columbia University
Press, New York, 2005)
- Rawls, John, A Theory of Justice (Original ed.). (Cambridge: Mass
Belknap Press of Harvard University Press, 1971)
- Republika. "Kurir Santoso Ditangkap." Jakarta: Republika, August 19,
2016. "Sudahi Konflik SARA." Jakarta: Republika, August 02,
2016.
- Ridwan, Nur Khalik. Doktrin Wahhabi dan benih-benih radikalisme
Islam di Tanah Air (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Rinusu (Ed). Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di
Indonesia: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kerjasama antara
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
dan United National Development Program (UNDP), 2007.

Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985),

Zuhdi, M. H. 2017. *Radikalisme Agama Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan*. AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam, 22(1), 199-224

Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Narasumber Wawancara:

Padang

Saifullah, Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN

Padang.

Sufriyono, Dosen Fakultas Adab UIN Padang

Zainal Azwar, Dosen Fakultas Syariah UIN Padang

Agus Tamam Nurdin, warga Jemaah Sungai jernih sekaligus pengurus masjid Darul Amal lokasi Wisata Ikan Sakti, Bukit Tinggi

Aulia, Mahasiswi Pascasarjana UIN Padang yang rutin menggunakan cadar dalam kehidupan sehari-hari.

Medan

Zulkarnain ST : Majelis Mujahidin (Bagian Pengkaderan)

Ahmad Daud, S.Sos : Eks. Majelis Mujahidin dan Aliran Keras lainnya

Afriani Efendi SPd : Sekretaris Liga Muslim Indonesia cabang Medan